



METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
2024

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA

Pengarah

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M

Penanggung jawab

Sapto Suhardiyo, S.STP, S.T

Penyusun

Dra. Jeni Preandini, M.Si

Fian Setyaningsih, S.Si

Tris Dianasari, S.Si

Penata Layout

Tris Dianasari, S.Si

Fian Setyaningsih, S.Si

Copy Right: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga

Diterbitkan oleh: Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Purbalingga

Jln. Letkol Isdiman No 17A Purbalingga

Ukuran Buku: 210 mm x 147.5 mm

ISBN: *** _*** _**** _** _*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku Metadata Variabel Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga ini dapat tersusun dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan buku Metadata Variabel Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga ini dilakukan dengan kerjasama yang erat antara berbagai instansi terkait, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal. Dalam prosesnya, kami berharap agar buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan serta program di Kabupaten Purbalingga.

Buku ini merupakan upaya untuk merangkum serta mengorganisir metadata variabel statistik sektoral Kabupaten Purbalingga. Metadata variabel statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.

Kehadiran buku Metadata Variabel Statistik Sektoral diharapkan dapat memberikan penjelasan lengkap tentang variabel yang digunakan dalam data, termasuk definisi, klasifikasi, dan karakteristiknya. Hal ini membantu pengguna data untuk memahami dengan jelas apa yang diukur atau diobservasi oleh variabel tersebut. Dengan memahami metadata variabel, pengguna data dapat menginterpretasikan hasil analisis dengan lebih akurat dan tepat. Mereka dapat mengetahui arti dari nilai-nilai yang ditemukan dan konteks di balik data tersebut.

Buku Metadata Variabel Statistik Sektoral ini ibarat tunas yang baru tumbuh, sehingga diharapkan akan terus berkembang



melalui koreksi dari berbagai pihak. Saran dan kritik konstruktif akan senantiasa kami terima demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan kualitas data statistik sektoral serta pengembangan Kabupaten Purbalingga ke arah yang lebih baik.

Purbalingga, Juni 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
PENDAHULUAN.....	7
KEMENTERIAN AGAMA.....	10
INSPEKTORAT	26
SEKRETARIAT DPRD	30
BAPPELITBANGDA	35
BADAN KEUANGAN DAERAH.....	47
BKPSDM	57
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	88
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	91
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	107
DINAS KESEHATAN	143
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	180
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	195
DINSOSDALDUKKBP3A.....	211
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.....	273
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	293
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	298
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	321
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	339
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	350
DINAS PERHUBUNGAN.....	374
DINAS KOPERASI DAN UKM	382



DPMPTSP.....	394
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.....	421
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	434
DINAS PERTANIAN	446
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.....	454
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	459
SETDA BAGIAN PEMERINTAHAN	479
SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	483
SETDA BAGIAN ORGANISASI.....	489
SETDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	498
SETDA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	500
SETDA BAGIAN HUKUM	507
SETDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA.....	518
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA.....	521
RSUD PANTI NUGROHO.....	532



PENDAHULUAN

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan variabel tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga.

Metadata variabel statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.

Struktur Baku Metada Variabel Statistik

No.	Nama Atribut	Penjelasan
1.	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa Kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar
2.	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik
3.	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.
4.	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu
5.	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi
6.	Referensi pemilihan	Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam



No.	Nama Atribut	Penjelasan
		melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.
7.	Referensi waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.
8.	Tipe data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (<i>Integer, Float, Char, String, dsb</i>)
9.	<i>Domain value</i>	<i>Domain value</i> atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional



No.	Nama Atribut	Penjelasan
10.	Kalimat pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.
11.	Apakah variabel dapat diakses umum	<i>Confidential status</i> merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah “ya” atau “tidak”.



KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENDIDIKAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Siswa RA/BA/TA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal/ Taman Athfal)

Alias	: -
Konsep	: Siswa RA/BA/TA
Definisi	: Anak usia dini yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat RA/BA/TA.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Siswa RA/BA/TA
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Siswa RA/BA/TA di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ RA/BA/TA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal/ Taman Athfal)

Alias	: -
Konsep	: RA/BA/TA
Definisi	: Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal yang dikelola oleh Kementerian Agama.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi RA/BA/TA
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah RA/BA/TA di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ RA/BA/TA Terakreditasi A

Alias	: -
Konsep	: RA/BA/TA Terakreditasi A
Definisi	: Sekolah RA/BA/TA yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh akreditasi dengan peringkat A.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi RA/BA/TA Terakreditasi A
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah RA/BA/TA Terakreditasi A di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik RA/BA/TA

Alias	: -
Konsep	: Guru/ Tenaga Pendidik RA/BA/TA
Definisi	: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah RA/BA/TA.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013



	tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi guru/ tenaga pendidik RA/BA/TA
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik RA/BA/TA di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik RA/BA/TA Berkualifikasi S1/D4

Alias	: -
Konsep	: Guru/ tenaga pendidik RA/BA/TA berkualifikasi S1/D4
Definisi	: Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat pendidikan RA/BA/TA yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi guru/ tenaga pendidik RA/BA/TA berkualifikasi S1/D4
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik RA/BA/TA berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa MI (Madrasah Ibtidaiyah)

Alias	: -
Konsep	: Siswa MI



Definisi	: Anak usia dini yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat MI.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa MI
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa MI di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa MTs (Madrasah Tsanawiyah)

Alias	: -
Konsep	: Siswa MTs
Definisi	: Anak usia dini yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat MTs.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa MTs
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa MTs di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Penduduk Usia 7-12 tahun yang Sedang Bersekolah di Tingkat MI

Alias	: -
Konsep	: Penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat MI



Definisi	: Anak-anak usia 7-12 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada tingkat pendidikan MI.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat MI
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat MI di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Penduduk Usia 13-15 Tahun yang Sedang Bersekolah di Tingkat MTs**

Alias	: -
Konsep	: Penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat MTs
Definisi	: Anak-anak usia 13-15 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada tingkat pendidikan MTs.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat MTs



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat MTs di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ MI (Madrasah Ibtidaiyah)

Alias : -

Konsep : MI (Madrasah Ibtidaiyah)

Definisi : Satuan pendidikan formal yang setara SD dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.

Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi MI (Madrasah Ibtidaiyah)

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah MI (Madrasah Ibtidaiyah) di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ MI Terakreditasi A

Alias : -

Konsep : MI Terakreditasi A

Definisi : Sekolah MI yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh akreditasi dengan peringkat A.

Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Referensi Waktu : 31 Desember 2023



Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi MI Terakreditasi A
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah MI Terakreditasi A di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ MTs (Madrasah Tsanawiyah)

Alias : -
 Konsep : MTs (Madrasah Tsanawiyah)
 Definisi : Satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan setara SMP kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi MTs (Madrasah Tsanawiyah)
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah MTs (Madrasah Tsanawiyah) di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ MTs Terakreditasi A

Alias : -
 Konsep : MTs Terakreditasi A



Definisi	: Sekolah MTs yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh akreditasi dengan peringkat A.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi MTs Terakreditasi A
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah MTs Terakreditasi A di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik MI

Alias	: -
Konsep	: Guru/ tenaga pendidik MI
Definisi	: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah MI.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi guru/ tenaga pendidik MI
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik MI di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



❖ Guru/ Tenaga Pendidik MI Berkualifikasi S1/D4

Alias	: -
Konsep	: Guru/ tenaga pendidik MI berkualifikasi S1/D4
Definisi	: Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat pendidikan MI yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi guru/ tenaga pendidik MI berkualifikasi S1/D4
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik MI berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik MTs

Alias	: -
Konsep	: Guru/ tenaga pendidik MTs
Definisi	: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah MTs.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi guru/ tenaga pendidik MTs
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik MTs di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik MTs Berkualifikasi S1/D4

Alias	: -
Konsep	: Guru/ Tenaga Pendidik MTs Berkualifikasi S1/D4
Definisi	: Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat pendidikan MTs yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi guru/ tenaga pendidik MTs berkualifikasi S1/D4
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik MTs berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Ruang Kelas MI

Alias	: -
Konsep	: Ruang Kelas MI
Definisi	: Kondisi ruang kelas MI yang diklasifikasikan menjadi kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang, kondisi rusak berat.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013



	tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat
Aturan Validasi	: Harus mengisi Ruang Kelas MI
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah ruang kelas MI dalam kondisi baik? 2. Berapa jumlah ruang kelas MI dalam kondisi rusak ringan? 3. Berapa jumlah ruang kelas MI dalam kondisi rusak sedang? 4. Berapa jumlah ruang kelas MI dalam kondisi rusak berat?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Ruang Kelas MTs

Alias	: -
Konsep	: Ruang Kelas MTs
Definisi	: Kondisi ruang kelas MTs yang diklasifikasikan menjadi kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang, kondisi rusak berat.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat



Aturan Validasi	: Harus mengisi Ruang Kelas MTs
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah ruang kelas MTs dalam kondisi baik? 2. Berapa jumlah ruang kelas MTs dalam kondisi rusak ringan? 3. Berapa jumlah ruang kelas MTs dalam kondisi rusak sedang? 4. Berapa jumlah ruang kelas MTs dalam kondisi rusak berat?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa MI Lulus

Alias	: -
Konsep	: Siswa MI lulus
Definisi	: Siswa yang menamatkan pendidikan MI.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa MI lulus
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa MI lulus di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa MTs Lulus

Alias	: -
Konsep	: Siswa MTs lulus
Definisi	: Siswa yang menamatkan pendidikan MTs.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi siswa MTs lulus
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah siswa MTs lulus di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Siswa Putus Sekolah MI

Alias : -
 Konsep : Siswa putus sekolah MI
 Definisi : Anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan MI.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi siswa putus sekolah MI
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah siswa putus sekolah MI di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Siswa Putus Sekolah MTs

Alias : -
 Konsep : Siswa putus sekolah MTs
 Definisi : Anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan MTs.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa putus sekolah MTs
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa putus sekolah MTs di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Anak Mengulang MI

Alias	: -
Konsep	: Anak mengulang MI
Definisi	: Siswa yang harus mengulang satu atau lebih tahun ajaran di tingkat pendidikan MI.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi anak mengulang MI
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah anak mengulang MI di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Anak Mengulang MTs

Alias	: -
Konsep	: Anak mengulang MTs
Definisi	: Siswa yang harus mengulang satu atau lebih tahun ajaran di tingkat pendidikan MI.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi anak mengulang MTs
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah anak mengulang MTs di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum : 1-Ya



INSPEKTORAT

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Obyek Pemeriksaan yang Diperiksa

Alias	: -
Konsep	: Obyek pemeriksaan
Definisi	: Obyek pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah dan dituangkan dalam SK Bupati Purbalingga tentang PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) (lingkup OPD, kecamatan, desa).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi nama obyek pengawasan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Temuan Hasil Pemeriksaan

Alias	: -
Konsep	: Temuan hasil pemeriksaan
Definisi	: Temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi temuan hasil pemeriksaan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa temuan hasil pemeriksaan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Aduan yang Masuk ke Inspektorat

Alias	: -
Konsep	: Aduan yang masuk ke Inspektorat
Definisi	: Pengaduan masyarakat yang masuk yang ditujukan ke inspektorat terkait tata kelola pemerintahan di Pemkab Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi aduan yang masuk ke Inspektorat
Kalimat Pertanyaan	: Berapa aduan yang masuk ke Inspektorat?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Alias	: -
Konsep	: Rekomendasi hasil pemeriksaan
Definisi	: Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak



	Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi rekomendasi hasil pemeriksaan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa rekomendasi hasil pemeriksaan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti

Alias	: -
Konsep	: Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti
Definisi	: Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



SEKRETARIAT DPRD

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK YANG DIHASILKAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Peraturan Daerah

Alias	: -
Konsep	: Peraturan daerah
Definisi	: Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi peraturan daerah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah peraturan daerah yang dihasilkan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Keputusan DPRD

Alias	: -
Konsep	: Keputusan DPRD
Definisi	: Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi keputusan DPRD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Keputusan Pimpinan

Alias	: -
Konsep	: Keputusan pimpinan
Definisi	: Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi keputusan pimpinan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah keputusan pimpinan yang dihasilkan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Persetujuan Bersama (Nota Kesepakatan)

Alias	: -
Konsep	: Persetujuan Bersama (Nota Kesepakatan)
Definisi	: Kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama



	Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi persetujuan bersama (nota kesepakatan)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah persetujuan bersama (nota kesepakatan) yang dihasilkan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Anggota DPRD

Alias	: -
Konsep	: Anggota DPRD
Definisi	: Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi anggota DPRD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah anggota DPRD Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin

Alias	: -
Konsep	: Anggota DPRD
Definisi	: Pengelompokkan anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin.



Referensi Pemilihan	: PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang berjenis kelamin laki-laki? 2. Berapa jumlah anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang berjenis kelamin perempuan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Fraksi**

Alias	: -
Konsep	: Fraksi
Definisi	: Pengelompokan anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat.
Referensi Pemilihan	: PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi fraksi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah fraksi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



BAPPELITBANGDA

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENELITIAN DAN KELITBANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Dokumen Penelitian

Alias	: -
Konsep	: Dokumen penelitian
Definisi	: Dokumen tentang kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis dilakukan secara swakelola maupun kerjasama/mitra dengan pihak ketiga.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi dokumen penelitian
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah dokumen penelitian di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Rekomendasi Penelitian yang Diterbitkan

Alias	: -
Konsep	: Rekomendasi penelitian yang diterbitkan
Definisi	: Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan penelitian.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi rekomendasi penelitian yang diterbitkan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah rekomendasi penelitian yang diterbitkan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Diseminasi Hasil Litbang**

Alias	: -
Konsep	: Diseminasi hasil litbang
Definisi	: Diseminasi hasil litbang
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi diseminasi hasil litbang
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah diseminasi hasil litbang di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Inovasi dan Inovensi**

Alias	: -
Konsep	: Inovasi dan inovensi
Definisi	: Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Inovensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada



	sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi inovasi dan invensi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah inovasi dan invensi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Inovasi dan Invensi yang Diterapkan

Alias	: -
Konsep	: Inovasi dan invensi yang diterapkan
Definisi	: Inovasi dan invensi yang telah dinyatakan sebagai bentuk perubahan/pembaruan dan digunakan dengan efektif untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kinerja.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi inovasi dan invensi yang diterapkan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah inovasi dan invensi yang diterapkan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



❖ Inovasi dan Inovensi yang Didesiminasikan

Alias	: -
Konsep	: Inovasi dan inovensi yang didesiminasikan
Definisi	: Inovasi dan inovensi yang didesiminasikan. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi inovasi dan inovensi yang didesiminasikan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah inovasi dan inovensi yang didesiminasikan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Jaringan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Lembaga/ Swasta

Alias	: -
Konsep	: Jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga/ swasta
Definisi	: MoU yang masuk di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan kerjasama dengan mahasiswa KKN Perguruan Tinggi.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga/swasta
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga/swasta di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PERENCANAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Skor Perencanaan

Alias	: -
Konsep	: Perencanaan
Definisi	: Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi skor Perencanaan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Alias	: -
Konsep	: Program dalam RPJMD



Definisi	: Program yang tercantum dan digunakan dalam RPJMD.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Alias	: -
Konsep	: Program dalam RKPD
Definisi	: Program yang tercantum dan digunakan dalam RKPD.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



❖ **Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD**

Alias	: -
Konsep	: Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
Definisi	: Perbandingan jumlah program dalam RKPD dengan jumlah program dalam RPJMD
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Program Rencana Strategis (Renstra) dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Alias	: -
Konsep	: Program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Definisi	: Banyaknya program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah



Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Program Rencana Strategis (Renstra) dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Program Rencana Strategis (Renstra) dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Program Rencana Kerja (renja) dengan RKPd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Alias	: -
Konsep	: Program Renja dengan RKPd bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Definisi	: Banyaknya Program Renja dengan RKPd bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Program Rencana Kerja (Renja) dengan RKPd bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Program Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Program Renstra dengan RPJMD Bidang Ekonomi

Alias : -

Konsep : Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi

Definisi : Banyaknya Program Renstra dengan RPJM bidang Ekonomi.

Referensi Pemilihan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
2. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Program Renja dengan RKPD Bidang Ekonomi

Alias : -

Konsep : Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi



Definisi	: Banyaknya Program Renja dengan RKPD Bidang Ekonomi
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Program Renstra dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Alias	: -
Konsep	: Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Definisi	: Banyaknya Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 2. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Program Renja dengan RKPd Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Alias	: -
Konsep	: Program Renja dengan RKPd bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Definisi	: Banyaknya Program Renja dengan RKPd bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Program Renja dengan RKPd bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Program Renja dengan RKPd bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



BADAN KEUANGAN DAERAH

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Pendapatan Daerah

Alias	: -
Konsep	: Pendapatan daerah
Definisi	: Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pendapatan daerah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Belanja Daerah

Alias	: -
Konsep	: Belanja Daerah
Definisi	: Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi belanja daerah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah belanja daerah Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Pembiayaan Daerah**

Alias	: -
Konsep	: Pembiayaan Daerah
Definisi	: Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pembiayaan daerah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Aset**

Alias	: -
Konsep	: Aset



Definisi	: Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi aset
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah aset Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Kewajiban

Alias	: -
Konsep	: Kewajiban
Definisi	: Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan



		antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi kewajiban
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah kewajiban Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	:	1-Ya

❖ **Ekuitas**

Alias	:	-
Konsep	:	Ekuitas
Definisi	:	Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
Referensi Pemilihan	:	1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi kewajiban
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah ekuitas Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	:	1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ATAS ASET YANG MENJADI PENDAPATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Target

Alias	: -
Konsep	: Target
Definisi	: Target yang menjadi potensi pendapatan daerah.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi target
Kalimat Pertanyaan	: Berapa target potensi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Realisasi

Alias	: -
Konsep	: Realisasi
Definisi	: Ketercapaian pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi realisasi



Kalimat Pertanyaan : Berapa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Target Pendapatan Asli Daerah

Alias : Target PAD
 Konsep : PAD
 Definisi : Target pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi target PAD
 Kalimat Pertanyaan : Berapa target PAD Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Alias : Realisasi PAD
 Konsep : PAD
 Definisi : Ketercapaian pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan di lingkup daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi realisasi PAD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa realisasi PAD Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ **Wajib Pajak**

Alias	: -
Konsep	: Wajib Pajak
Definisi	: Orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan perpajakan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi wajib pajak
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah wajib pajak di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Potensi Pajak Bumi dan Bangunan**

Alias	: Potensi PBB
Konsep	: PBB
Definisi	: Potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi potensi PBB
 Kalimat Pertanyaan : Berapa potensi PBB Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Pajak Bumi dan Bangunan yang Terbayar

Alias : PBB yang terbayar
 Konsep : PBB
 Definisi : Realisasi nilai PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak.
 Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi PBB yang terbayar
 Kalimat Pertanyaan : Berapa nilai PBB yang terbayar di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Bidang Tanah Milik Pemda

Alias : -
 Konsep : Bidang tanah
 Definisi : Bidang tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer



Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi bidang tanah milik Pemda
 Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah bidang tanah milik Pemda?
 2. Berapa luas bidang tanah milik Pemda?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat

Alias : -
 Konsep : Bidang tanah
 Definisi : Bidang tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan telah memiliki sertifikat kepemilikan.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi bidang tanah milik Pemda bersertifikat
 Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah bidang tanah milik Pemda bersertifikat?
 2. Berapa luas bidang tanah milik Pemda bersertifikat?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya



BKPSDM

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Pegawai Negeri Sipil

Alias	: PNS
Konsep	: Pegawai Negeri Sipil
Definisi	: Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional di Wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara2. Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 840 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 20214. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Calon Pegawai Negeri Sipil

Alias	: CPNS
Konsep	: Calon Pegawai Negeri Sipil



Definisi	: Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 840 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 4. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi CPNS
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah CPNS di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Pegawai Kontrak

Alias	: PTT
Konsep	: Pegawai Kontrak
Definisi	: Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian. Pegawai PTT diangkat berdasarkan SK Bupati Purbalingga.



Referensi Pemilihan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 39 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi PTT
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PTT di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Tenaga Harian Lepas

Alias : THL
 Konsep : Tenaga Harian Lepas
 Definisi : Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah/Bagian di wilayah pemerintah Kabupaten Purbalingga yang honoraria dibayar dengan APBD Tingkat Kabupaten/Kota pada masing-masing OPD/Bagian.
 Referensi Pemilihan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi THL
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah THL di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya



❖ Guru Tidak Tetap SK Bupati

Alias	: GTT SK Bupati
Konsep	: GTT SK Bupati
Definisi	: Seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah negeri di Wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi GTT SK Bupati
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah GTT SK Bupati di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Guru Tidak Tetap Belum SK Bupati

Alias	: GTT Belum SK Bupati
Konsep	: GTT Belum SK Bupati
Definisi	: Seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah Negeri di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi GTT belum SK Bupati



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah GTT belum SK Bupati di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Alias : P3K
Konsep : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi : Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK
3. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi P3K
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah P3K di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Alias : -
Konsep : Pegawai Negeri Sipil
Definisi : Pengelompokkan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin.
Referensi Pemilihan : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara



	2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. PNS Laki-laki 2. PNS Perempuan
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS berdasarkan jenis kelamin
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah PNS laki-laki di Kabupaten Purbalingga? 2. Berapa jumlah PNS perempuan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ PNS Berdasarkan Golongan

Alias	: -
Konsep	: Pegawai Negeri Sipil
Definisi	: Pengelompokan PNS yang dibagi berdasarkan tingkat atau kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian. Kenaikan pangkat seorang PNS merupakan sebuah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdianya kepada negara. Kenaikan pangkat ada dua jenis, yaitu reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. PNS Golongan I 2. PNS Golongan II 3. PNS Golongan III 4. PNS Golongan IV



Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS berdasarkan golongan
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah PNS Golongan I di Kabupaten Purbalingga? 2. Berapa jumlah PNS Golongan II di Kabupaten Purbalingga? 3. Berapa jumlah PNS Golongan III di Kabupaten Purbalingga? 4. Berapa jumlah PNS Golongan IV di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ PNS Berdasarkan Jabatan

Alias	: -
Konsep	: Pegawai Negeri Sipil
Definisi	: Pengelompokan PNS berdasarkan jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Fungsional Tertentu 2. Fungsional Umum 3. Eselon V 4. Eselon IV 5. Eselon III 6. Eselon II 7. Eselon I
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS berdasarkan jabatan
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah PNS fungsional tertentu di Kabupaten Purbalingga? 2. Berapa jumlah PNS fungsional umum di Kabupaten Purbalingga? 3. Berapa jumlah PNS Eselon V di Kabupaten Purbalingga?



4. Berapa jumlah PNS Eselon IV di Kabupaten Purbalingga?
5. Berapa jumlah PNS Eselon III di Kabupaten Purbalingga?
6. Berapa jumlah PNS Eselon II di Kabupaten Purbalingga?
7. Berapa jumlah PNS Eselon I di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ PNS Berdasarkan Pendidikan

Alias	: -
Konsep	: Pegawai Negeri Sipil
Definisi	: Pengelompokan PNS berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tamat SD 2. Tamat SMP 3. Tamat SMA/SMK 4. Tamat D1 5. Tamat D2 6. Tamat D3 7. Tamat D4 8. Tamat S1 9. Tamat S2 10. Tamat S3
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS berdasarkan pendidikan
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah PNS tamat SD di Kabupaten Purbalingga? 2. Berapa jumlah PNS tamat SMP di Kabupaten Purbalingga?



3. Berapa jumlah PNS tamat SMA/SMK di Kabupaten Purbalingga?
4. Berapa jumlah PNS tamat D1 di Kabupaten Purbalingga?
5. Berapa jumlah PNS tamat D2 di Kabupaten Purbalingga?
6. Berapa jumlah PNS tamat D3 di Kabupaten Purbalingga?
7. Berapa jumlah PNS tamat D4 di Kabupaten Purbalingga?
8. Berapa jumlah PNS tamat S1 di Kabupaten Purbalingga?
9. Berapa jumlah PNS tamat S2 di Kabupaten Purbalingga?
10. Berapa jumlah PNS tamat S3 di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ PNS Pensiun

- Alias : -
- Konsep : Pegawai Negeri Sipil
- Definisi : PNS Kabupaten Purbalingga yang telah mengajukan pengunduran diri dari ASN yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Referensi Pemilihan :
 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS



4. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi PNS pensiun
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PNS pensiun di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Usulan Kebutuhan CPNS

Alias : -
 Konsep : CPNS
 Definisi : Jumlah dan jenis jabatan ASN yang dibutuhkan pada masing-masing instansi
 Referensi Pemilihan :

1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS
3. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS
4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga

 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi usulan kebutuhan CPNS
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah usulan kebutuhan CPNS di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya



❖ CPNS yang Mendaftar

Alias	:	-
Konsep	:	CPNS
Definisi	:	CPNS yang mendaftar untuk mengikuti seleksi atau penerimaan sebagai PNS
Referensi Pemilihan	:	1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS 3. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS 4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi CPNS yang mendaftar
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah CPNS yang mendaftar di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	:	1-Ya

❖ CPNS Lulus

Alias	:	-
Konsep	:	CPNS
Definisi	:	Calon CPNS yang telah memenuhi kriteria berdasarkan ujian yang diadakan oleh BKN.
Referensi Pemilihan	:	1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS 3. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS 4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-



Aturan Validasi	: Harus mengisi CPNS lulus
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah CPNS lulus di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Mutasi Masuk

Alias	: -
Konsep	: Mutasi masuk
Definisi	: Perpindahan PNS yang masuk ke instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi mutasi masuk
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang mutasi masuk ke instansi Pemda Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Mutasi Keluar

Alias	: -
Konsep	: Mutasi keluar
Definisi	: Perpindahan PNS yang keluar dari instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi mutasi keluar
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang mutasi keluar dari instansi Pemda Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENINGKATAN KOMPETENSI PNS KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ PNS yang Melaksanakan Pendidikan Dokter Spesialis TB (Tugas Belajar)

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar
Definisi	: PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar profesi dokter spesialis.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang Melaksanakan Pendidikan Dokter Spesialis TB (Tugas Belajar)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang Melaksanakan Pendidikan Dokter Spesialis TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



❖ PNS yang Melaksanakan Pendidikan Profesi TB (Tugas Belajar)

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar
Definisi	: PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar profesi dokter/ profesi dokter gigi/ profesi apoteker/ profesi lainnya.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang melaksanakan pendidikan profesi TB (Tugas Belajar)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang melaksanakan pendidikan profesi TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ PNS yang Melaksanakan S3 TB (Tugas Belajar)

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar
Definisi	: PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar doktor (s-3/strata 3).
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi PNS yang melaksanakan S3 TB (Tugas Belajar)
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PNS yang melaksanakan S3 TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ PNS yang Melaksanakan S2 TB (Tugas Belajar)

Alias : -
 Konsep : Tugas belajar
 Definisi : PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar magister (s-2/strata 2)
 Referensi Pemilihan : 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi PNS yang melaksanakan S2 TB (Tugas Belajar)
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PNS yang melaksanakan S2 TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ PNS yang Melaksanakan S1 TB (Tugas Belajar)

Alias : -
 Konsep : Tugas belajar
 Definisi : PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar S-1



Referensi Pemilihan : 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi PNS yang melaksanakan S1 TB (Tugas Belajar)

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PNS yang melaksanakan S1 TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ PNS yang Melaksanakan Pendidikan Profesi IB (Izin Belajar)

Alias : -

Konsep : Izin belajar

Definisi : PNS yang akan mengikuti pendidikan profesi dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu.

Referensi Pemilihan : 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -



Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang melaksanakan pendidikan profesi IB (Izin Belajar)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang melaksanakan pendidikan profesi IB (Izin Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ PNS yang Melaksanakan S3 IB (Izin Belajar)

Alias	: -
Konsep	: Izin belajar
Definisi	: PNS yang akan mengikuti pendidikan S3 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang melaksanakan S3 IB (Izin Belajar)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang melaksanakan S3 IB (Izin Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ PNS yang Melaksanakan S2 IB (Izin Belajar)

Alias	: -
Konsep	: Izin belajar
Definisi	: PNS yang akan mengikuti pendidikan S2 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh



	izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang Melaksanakan S2 IB (Izin Belajar)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang Melaksanakan S2 IB (Izin Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ PNS yang Melaksanakan D3 IB (Izin Belajar)

Alias	: -
Konsep	: Izin belajar
Definisi	: PNS yang akan mengikuti pendidikan D3 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang Melaksanakan D3 IB (Izin Belajar)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang Melaksanakan D3 IB (Izin Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **PNS yang Melaksanakan Perpanjangan Pendidikan Dokter Spesialis TB (Tugas Belajar)**

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar
Definisi	: PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dokter spesialis sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan dokter spesialis.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang melaksanakan perpanjangan pendidikan dokter spesialis TB (Tugas Belajar)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang melaksanakan perpanjangan pendidikan dokter spesialis TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



❖ **PNS yang Melaksanakan Perpanjangan Pendidikan Profesi TB (Tugas Belajar)**

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar
Definisi	: PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan profesi sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan profesi.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang melaksanakan perpanjangan pendidikan profesi TB (Tugas Belajar)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang melaksanakan perpanjangan pendidikan profesi TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **PNS yang Melaksanakan Perpanjangan S3 TB (Tugas Belajar)**

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar
Definisi	: PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan S3 sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan S3.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022



tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi PNS yang melaksanakan perpanjangan S3 TB (Tugas Belajar)
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah PNS yang melaksanakan perpanjangan S3 TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	:	1-Ya

❖ **PNS yang Melaksanakan Perpanjangan S2 TB (Tugas Belajar)**

Alias	:	-
Konsep	:	Tugas belajar
Definisi	:	PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan S2 sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan S2.
Referensi Pemilihan	:	1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi PNS yang melaksanakan perpanjangan S2 TB (Tugas Belajar)



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PNS yang melaksanakan perpanjangan S2 TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ **PNS yang Melaksanakan Perpanjangan S1 TB (Tugas Belajar)**

Alias : -

Konsep : Tugas belajar

Definisi : PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan S1 sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan S1.

Referensi Pemilihan : 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi PNS yang melaksanakan perpanjangan S1 TB (Tugas Belajar)

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PNS yang melaksanakan perpanjangan S1 TB (Tugas Belajar) di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ **Peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) Pendidikan Dokter Spesialis**

Alias : -

Konsep : Tugas belajar, izin belajar

Definisi : Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali



	paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi izin belajar.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) pendidikan dokter spesialis
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) pendidikan dokter spesialis di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) Pendidikan Profesi**

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar, izin belajar
Definisi	: Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi izin belajar.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) pendidikan profesi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) pendidikan profesi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) S3

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar, izin belajar
Definisi	: Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi izin belajar.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) S3
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) S3 di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) S2

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar, izin belajar



Definisi	: Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi izin belajar.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) S2
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) S2 di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) S1**

Alias	: -
Konsep	: Tugas belajar, izin belajar
Definisi	: Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi izin belajar.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) S1
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah peralihan TB (Tugas Belajar) ke IB (Izin Belajar) S1 di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ PNS yang Mengikuti Diklat Teknis

Alias : -
 Konsep : Diklat teknis
 Definisi : PNS yang mengikuti diklat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan PNS, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS, dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
 Referensi Pemilihan :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelatihan Penyelenggara Pelatihan
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelatihan Pengelolaan Pelatihan
4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga

 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -



Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang mengikuti diklat teknis
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional**

Alias	: -
Konsep	: Diklat fungsional
Definisi	: PNS yang mengikuti diklat yang ditujukan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing, ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelatihan Penyelenggara Pelatihan 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelatihan Pengelolaan Pelatihan 4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang mengikuti diklat fungsional
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



❖ PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Alias	: -
Konsep	: Diklat kepemimpinan
Definisi	: PNS yang mengikuti diklat yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor.16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga



Administrasi Negara Nomor.15 Tahun
2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas

7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu
Data Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **PNS yang Mengikuti Diklat Pelatihan Dasar**

Alias	: -
Konsep	: Diklat pelatihan dasar
Definisi	: PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang sesuai dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi : Harus mengisi PNS yang mengikuti diklat pelatihan dasar

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PNS yang mengikuti diklat pelatihan dasar di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Potensi Konflik yang Dilaporkan

Alias	: -
Konsep	: Potensi konflik yang dilaporkan
Definisi	: Potensi konflik yang dilaporkan dari masyarakat ke Bakesbangpol atau APH (Aparat Penegak Hukum).
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2. Sasaran Renstra Bakesbangpol (Perda Nomor 5 Tahun 2021)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi potensi konflik yang dilaporkan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah potensi konflik yang dilaporkan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Potensi Konflik yang Diredam tidak Menjadi Konflik

Alias	: -
Konsep	: Potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik
Definisi	: Potensi konflik yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat, mediasi oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun APH, dan audiensi dengan pihak-pihak terkait, sehingga tidak berkembang menjadi konflik.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2. Sasaran Renstra Bakesbangpol (Perda Nomor 5 Tahun 2021)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik? 2. Berapa persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Konflik Sosial**

Alias	: -
Konsep	: Konflik sosial
Definisi	: Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2. Sasaran Renstra Bakesbangpol (Perda Nomor 5 Tahun 2021)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Konflik Sosial
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga? 2. Berapa angka konflik sosial Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KEJADIAN BENCANA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Kejadian Cuaca Extrem

Alias	: -
Konsep	: Cuaca extrem
Definisi	: Kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Puting Beliung 2. Angin Kencang 3. Angin Topan 4. Hujan Es 5. Siklon Tropis 6. Suhu Udara Extrem
Aturan Validasi	: Kejadian cuaca extrem wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kejadian cuaca extrem di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Kejadian Banjir

Alias	: -
Konsep	: Banjir



Definisi	:	Peristiwa atau keadaan dimana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Banjir Rob 2. Banjir Bandang 3. Banjir dan Tanah Longsor 4. Banjir Drainase dan Selokan 5. Banjir Waduk 6. Banjir Genangan 7. Tanggul Jebol
Aturan Validasi	:	Kejadian banjir wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah kejadian banjir di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	:	1-Ya

❖ Kejadian Gas Beracun

Alias	:	-
Konsep	:	Gas beracun
Definisi	:	Suatu gas yang bereaksi dengan darah dan dapat menyebabkan kematian jika terhirup atau terpapar dalam konsentrasi yang cukup tinggi.
Referensi Pemilihan	:	Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Kejadian gas beracun wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah kejadian gas beracun di Kabupaten Purbalingga
Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan

Alias : -
Konsep : Kebakaran hutan dan lahan
Definisi : Keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
Referensi Pemilihan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : 1. Kebakaran Hutan
2. Kebakaran Lahan
3. Kebakaran Gambut
Aturan Validasi : Kejadian kebakaran hutan dan lahan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah kejadian kebakaran hutan di Kabupaten Purbalingga
Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Kejadian Gempa Bumi

Alias : -
Konsep : Gempa bumi
Definisi : Kejadian getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi,



	patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian Dan Dampak Bencana
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Gempa Tektonik 2. Gempa Vulkanik 3. Gempabumi Runtuhan
Aturan Validasi	: Kejadian gempa bumi wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kejadian gempa bumi di Kabupaten Purbalingga
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Kejadian Kekeringan

Alias	: -
Konsep	: Kekeringan
Definisi	: Ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Kekeringan Meteorologis 2. Kekeringan Hidrologis



	3. Kekeringan Pertanian
Aturan Validasi	: Kejadian kekeringan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kejadian kekeringan di Kabupaten Purbalingga
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Kejadian Erupsi Gunung Api

Alias	: -
Konsep	: Erupsi gunung api
Definisi	: Bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Awan panas guguran (aliran piroklastik guguran) 2. Awan panas (aliran piroklastik) 3. Banjir lahar (lahar) 4. Hujan abu vulkanik 5. Gas vulkanik beracun
Aturan Validasi	: Kejadian erupsi gunung api wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kejadian letusan gunung berapi di Kabupaten Purbalingga
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Kejadian Tanah Longsor

Alias	: -
Konsep	: Tanah longsor
Definisi	: Salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya,



	menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Longsor 2. Gerakan Tanah
Aturan Validasi	: Kejadian tanah longsor wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kejadian tanah longsor di Kabupaten Purbalingga
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Korban Bencana

Alias	: -
Konsep	: Korban bencana
Definisi	: Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Korban bencana wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah korban bencana di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Pelayanan Korban Bencana

Alias : -
 Konsep : Pelayanan korban bencana
 Definisi : Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.
 Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Pelayanan korban bencana wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah kegiatan untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Desa Tangguh Bencana

Alias : -
 Konsep : Desa tangguh bencana
 Definisi : Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012).
 Referensi Pemilihan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023



Tipe Data	: String
Klasifikasi Isian	: 1. Desa Tangguh Bencana Utama 2. Desa Tangguh Bencana Madya 3. Desa Tangguh Bencana Pratama
Aturan Validasi	: Desa Tangguh Bencana wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/peraturan-kepala/2012/perka-1-tahun-2012.pdf
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Masyarakat Tangguh bencana

Alias	: -
Konsep	: Masyarakat tangguh bencana
Definisi	: Orang yang tergabung dalam sebuah tim khusus dalam penanggulangan/ mitigasi bencana. Masyarakat/ individu yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Masyarakat tangguh bencana Wajib Diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah masyarakat tangguh bencana?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Sosialisasi Mitigasi Bencana

Alias	: -
Konsep	: Sosialisasi mitigasi bencana
Definisi	: Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui



	pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Sosialisasi mitigasi bencana wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sosialisasi mitigasi bencana yang telah dilakukan ?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KONDISI KEBENCANAAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Sistem Peringatan Dini

Alias	: -
Konsep	: Sistem peringatan dini
Definisi	: Sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya banjir pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Sarana



dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

5. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : 1. Sistem Elektronik
2. Tradisional
Aturan Validasi : Sistem peringatan dini wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah sistem peringatan dini di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Kawasan Rawan Bencana

Alias : -
Konsep : Kawasan rawan bencana
Definisi : Wilayah atau daerah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami berbagai jenis bencana alam atau antropogenik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk geologi, topografi, iklim, dan aktivitas manusia.
Referensi Pemilihan : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



	5. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan rawan bencana banjir 2. Kawasan rawan bencana gunung meletus 3. Kawasan rawan bencana longsor 4. Kawasan rawan bencana gerakan tanah 5. Kawasan rawan bencana tsunami 6. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan lindung 7. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem
Aturan Validasi	: Kawasan rawan bencana wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa luas kawasan rawan bencana di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Pengungsi Akibat Bencana**

Alias	: -
Konsep	: Pengungsi akibat bencana
Definisi	: Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: String
Klasifikasi Isian	: 1. Meninggal 2. Luka-luka
Aturan Validasi	: Pengungsi akibat bencana wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pengungsi akibat bencana di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Kerugian Akibat Bencana

Alias	: -
Konsep	: Kerugian akibat bencana
Definisi	: Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kekeringan.
Referensi Pemilihan	: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Sarana dan



	Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	5. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kerugian akibat bencana banjir 2. Jumlah kerugian akibat bencana gunung meletus 3. Jumlah kerugian akibat bencana longsor 4. Jumlah kerugian akibat bencana gerakan tanah 5. Jumlah kerugian akibat bencana tsunami 6. Jumlah kerugian akibat bencana kebakaran hutan lindung 7. Jumlah kerugian akibat bencana angin topan
Aturan Validasi	: Kerugian akibat bencana wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kerugian akibat bencana di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

Alias	: -
Konsep	: Prasarana dan sarana tanggap bencana
Definisi	: Peralatan dan logistik yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika



3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi 2. Peralatan Komunikasi 3. Peralatan Kesehatan 4. Peralatan Air Bersih 5. MCK 6. Alat Berat 7. Peralatan Hunian Sementara 8. Kebakaran 9. Alat Labolatorium Bencana 10. Alat Komputer 11. Alat Bengkel 12. Alat Pertanian 13. Alat Kantor Rumah Tangga 14. Alat Kedokteran 15. Alat Semprot Mesin 16. Alat Sar 17. Peralatan Evakuasi di Air 18. Alat Penerangan 19. Alat Perlindungan 20. Alat Peraga 21. Peralatan Lainnya
Aturan Validasi	:	Prasarana dan sarana tanggap bencana wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah prasarana dan sarana
tanggap bencana?
Dapat Diakses umum : 1-Ya



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Sekolah Dasar (SD)

Alias	:	-
Konsep	:	Sekolah Dasar (SD)
Definisi	:	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
Referensi Pemilihan	:	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi Sekolah Dasar (SD)
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	:	1-Ya

❖ SD Terakreditasi A

Alias	:	-
Konsep	:	SD terakreditasi A
Definisi	:	Sekolah Dasar (SD) yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh akreditasi dengan peringkat A.
Referensi Pemilihan	:	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem



Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi SD terakreditasi A
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah SD terakreditasi A di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Siswa SD

Alias : -
Konsep : Siswa SD
Definisi : Anak yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat SD (Sekolah Dasar).

Referensi Pemilihan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi Siswa SD
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Siswa SD di Kabupaten Purbalingga?



Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ **Kondisi Ruang Kelas SD**

Alias	: -
Konsep	: Kondisi ruang kelas SD
Definisi	: Kondisi ruang kelas SD yang diklasifikasikan menjadi kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang, kondisi rusak berat.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat
Aturan Validasi	: Harus mengisi kondisi ruang kelas SD
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah ruang kelas SD dalam kondisi baik? 2. Berapa jumlah ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan? 3. Berapa jumlah ruang kelas SD dalam kondisi rusak sedang? 4. Berapa jumlah ruang kelas SD dalam kondisi rusak berat?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



❖ Siswa SD Lulus

Alias	: -
Konsep	: Siswa SD lulus
Definisi	: Siswa yang menamatkan pendidikan SD.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa SD lulus
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa SD lulus di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa SD Putus Sekolah

Alias	: -
Konsep	: Siswa SD putus sekolah
Definisi	: Anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan SD.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa SD putus sekolah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa SD putus sekolah di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa Mengulang SD

Alias	: -
Konsep	: Siswa mengulang SD
Definisi	: Siswa yang harus mengulang satu atau lebih tahun ajaran di tingkat pendidikan dasar.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Siswa mengulang SD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Siswa mengulang SD di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Kompetensi Literasi Siswa SD

Alias	: -
Konsep	: Kompetensi literasi siswa SD
Definisi	: Persentase peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) berdasarkan kemampuan dalam



memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).

Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kompetensi literasi siswa SD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kompetensi literasi siswa SD di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Kompetensi Numerasi Siswa SD

Alias	: -
Konsep	: Kompetensi numerasi siswa SD
Definisi	: Persentase peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah



	2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kompetensi numerasi siswa SD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kompetensi numerasi siswa SD di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Iklim Keamanan Sekolah Tingkat SD

Alias	: -
Konsep	: Iklim keamanan sekolah tingkat SD
Definisi	: Kondisi satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Iklim keamanan sekolah tingkat SD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Iklim keamanan sekolah tingkat SD di Kabupaten Purbalingga?



Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Iklim Kebhinekaan Tingkat SD

Alias : -

Konsep : Iklim kebhinekaan tingkat SD

Definisi : Kondisi sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.

Referensi Pemilihan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Float

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi Iklim kebhinekaan tingkat SD

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Iklim kebhinekaan tingkat SD di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Iklim Inklusivitas Tingkat SD

Alias : -

Konsep : Iklim inklusivitas tingkat SD

Definisi : Kondisi yang disediakan oleh sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.



Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Iklim inklusivitas tingkat SD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Iklim inklusivitas tingkat SD di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Alias	: -
Konsep	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Definisi	: Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ SMP Terakreditasi A

Alias	: -
Konsep	: SMP terakreditasi A
Definisi	: Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh akreditasi dengan peringkat A.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi SMP terakreditasi A
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah SMP terakreditasi A di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa SMP

Alias	: -
Konsep	: Siswa SMP
Definisi	: Anak yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama).



Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa SMP
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa SMP di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Kondisi Ruang Kelas SMP**

Alias	: -
Konsep	: Kondisi ruang kelas SMP
Definisi	: Kondisi ruang kelas SMP yang diklasifikasikan menjadi kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang, kondisi rusak berat.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat
Aturan Validasi	: Harus mengisi Kondisi Ruang Kelas SMP



Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah ruang kelas SMP dalam kondisi baik? 2. Berapa jumlah ruang kelas SMP dalam kondisi rusak ringan? 3. Berapa jumlah ruang kelas SMP dalam kondisi rusak sedang? 4. Berapa jumlah ruang kelas SMP dalam kondisi rusak berat?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa SMP Lulus

Alias	: -
Konsep	: Siswa SMP lulus
Definisi	: Siswa yang menamatkan pendidikan SMP.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa SMP lulus
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa SMP lulus di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa SMP Putus Sekolah

Alias	: -
Konsep	: Siswa SMP putus sekolah
Definisi	: Anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh



	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa SMP putus sekolah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa SMP putus sekolah di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa Mengulang SMP

Alias	: -
Konsep	: Siswa mengulang SMP
Definisi	: Siswa yang harus mengulang satu atau lebih tahun ajaran di tingkat pendidikan menengah.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa mengulang SMP
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa mengulang SMP di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Alias	: -
Konsep	: Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Definisi	: Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ PAUD Terakreditasi A

Alias	: -
Konsep	: PAUD terakreditasi A
Definisi	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh akreditasi dengan peringkat A.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi PAUD terakreditasi A
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PAUD terakreditasi A di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Siswa PAUD

Alias	: -
Konsep	: Siswa PAUD
Definisi	: Anak yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa PAUD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah siswa PAUD di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

Alias	: -
Konsep	: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Definisi	: Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal. Kegiatan Belajar mengajar masuk dalam pengawasan dan bimbingan oleh dinas pendidikan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ **Warga Belajar PKBM**

Alias : -

Konsep : Warga belajar PKBM

Definisi : Peserta didik yang mengikuti program pendidikan nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi Warga belajar PKBM

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Warga belajar PKBM di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ **PKBM Terakreditasi**

Alias : -

Konsep : PKBM Terakreditasi

Definisi : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang telah melewati proses akreditasi oleh otoritas pendidikan terkait.

Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi PKBM terakreditasi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PKBM terakreditasi di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya



❖ Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Alias	: -
Konsep	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Definisi	: Satuan pendidikan di luar sekolah atau pendidikan nonformal yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat lebih mengembangkan diri dan profesi hingga mengasah keterampilan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Murid LKP

Alias	: -
Konsep	: Murid LKP
Definisi	: Individu yang mendaftar dan mengikuti program pendidikan atau pelatihan di LKP.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi murid LKP
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah murid LKP di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Guru/ Tenaga Pendidik PAUD

Alias	: -
Konsep	: Guru/ tenaga pendidik PAUD
Definisi	: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah PAUD.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi guru/ tenaga pendidik PAUD
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik PAUD di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4

Alias	: -
Konsep	: Guru/ tenaga pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4
Definisi	: Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat PAUD yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi guru/ tenaga pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik SD

Alias : -

Konsep : Guru/ tenaga pendidik SD

Definisi : Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah dasar.

Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi guru/ tenaga pendidik SD

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik SD di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik SD Berkualifikasi S1/D4

Alias : -

Konsep : Guru/ tenaga pendidik SD berkualifikasi S1/D4

Definisi : Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat SD yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi guru/ tenaga pendidik SD berkualifikasi S1/D4



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik SD berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik SMP

Alias : -

Konsep : Guru/ tenaga pendidik SMP

Definisi : Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah menengah pertama.

Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi guru/ tenaga pendidik SMP

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik SMP di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Guru/ Tenaga Pendidik SMP Berkualifikasi S1/D4

Alias : -

Konsep : Guru/ tenaga pendidik SMP berkualifikasi S1/D4

Definisi : Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat SMP yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi guru/ tenaga pendidik SMP berkualifikasi S1/D4



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah guru/ tenaga pendidik SMP berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Tenaga Pengajar PKBM

Alias : -

Konsep : Tenaga pengajar PKBM

Definisi : Individu yang menjadi pengajar atau instruktur dalam Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi tenaga pengajar PKBM

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah tenaga pengajar PKBM di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Tenaga Pengajar LKP

Alias : -

Konsep : Tenaga pengajar LKP

Definisi : Individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan kepada peserta kursus atau program pelatihan di LKP tersebut.

Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi tenaga pengajar LKP

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah tenaga pengajar LKP di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses umum : 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Sanggar Kesenian

Alias	: -
Konsep	: Sanggar kesenian
Definisi	: Tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu kelompok, komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi sanggar kesenian
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sanggar kesenian?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Panggung Kesenian

Alias	: -
Konsep	: Panggung kesenian
Definisi	: Panggung dengan <i>event</i> yang memfasilitasi hasil kreasi seni dari pekerja seni kepada penikmat seni serta melestarikan kesenian tersebut.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi panggung kesenian
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah panggung kesenian?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Museum

Alias	: -
-------	-----



Konsep	: Museum
Definisi	: Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi museum
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah museum?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Pusat Kebudayaan/ Taman Budaya

Alias	: -
Konsep	: Pusat kebudayaan/ taman budaya
Definisi	: Wadah atau sarana yang mengembangkan/ mempromosikan kebudayaan tertentu.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pusat kebudayaan/ taman budaya
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pusat kebudayaan/ taman budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Alias	: -
Konsep	: Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Definisi	: <i>Event</i> yang diselenggarakan dalam festival seni dan budaya.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Sudah Ditetapkan**

Alias	: -
Konsep	: Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah ditetapkan
Definisi	: Berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut (UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003).
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah ditetapkan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah ditetapkan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **SDM Kesenian**

Alias	: -
Konsep	: SDM kesenian



Definisi	: Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan stratifikasai yang mumpuni di bidang kesenian.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi SDM kesenian
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah SDM kesenian?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)**

Alias	: -
Konsep	: Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
Definisi	: Dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Yang termasuk dalam Obyek PPKD adalah Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Purbalingga No. 430/400 Tahun 2018 ttg Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Obyek Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah (PPKD)?
Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ **Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang
Dilestarikan/Dikembangkan**

Alias : -
Konsep : Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
(PPKD)
Definisi : Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
(PPKD) yang dijaga, dikembangkan, dan
dilestarikan agar tidak hilang atau
terdegradasi.
Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi Obyek Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah (PPKD) yang
dilestarikan/dikembangkan
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Obyek Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah (PPKD) yang
dilestarikan/dikembangkan?
Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ **Kelompok Seni**

Alias : -
Konsep : Kelompok seni
Definisi : Sekumpulan seniman yang
mengekspresikan seni dalam berbagai
wujud.
Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : 1. Seni rupa



	2. Seni tari klasik
	3. Seni tari kreasi baru
	4. Seni tari tradisional
	5. Seni tari modern
	6. Seni suara/vocal
	7. Seni musik tradisional
	8. Seni sastra
	9. Seni teater/drama
Aturan Validasi	: Harus mengisi kelompok seni
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah kelompok seni rupa?
	2. Berapa jumlah kelompok seni tari klasik?
	3. Berapa jumlah kelompok seni tari kreasi baru?
	4. Berapa jumlah kelompok seni tari tradisional?
	5. Berapa jumlah kelompok seni tari modern?
	6. Berapa jumlah kelompok seni suara/vocal?
	7. Berapa jumlah kelompok seni musik tradisional?
	8. Berapa jumlah kelompok seni sastra?
	9. Berapa jumlah kelompok seni teater/drama?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Anggota Kelompok Seni

Alias	: -
Konsep	: Kelompok seni
Definisi	: Individu-individu yang bergabung atau menjadi bagian dari sebuah kelompok atau komunitas seni.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Seni rupa



	2. Seni tari klasik
	3. Seni tari kreasi baru
	4. Seni tari tradisional
	5. Seni tari modern
	6. Seni suara/vocal
	7. Seni musik tradisional
	8. Seni sastra
	9. Seni teater/drama
Aturan Validasi	: Harus mengisi anggota kelompok seni
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah anggota kelompok seni rupa?
	2. Berapa jumlah anggota kelompok seni tari klasik?
	3. Berapa jumlah anggota kelompok seni tari kreasi baru?
	4. Berapa jumlah anggota kelompok seni tari tradisional?
	5. Berapa jumlah anggota kelompok seni tari modern?
	6. Berapa jumlah anggota kelompok seni suara/vocal?
	7. Berapa jumlah anggota kelompok seni musik tradisional?
	8. Berapa jumlah anggota kelompok seni sastra?
	9. Berapa jumlah anggota kelompok seni teater/drama?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Pagelaran Seni Budaya

Alias	: -
Konsep	: Pagelaran seni budaya
Definisi	: Kegiatan dalam rangka mempertunjukkan karya seni kepada orang lain (masyarakat umum) agar mendapat tanggapan dan penilaian.



Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pagelaran seni budaya
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pagelaran seni budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Pengunjung Pagelaran Seni Budaya**

Alias	: -
Konsep	: Pagelaran seni budaya
Definisi	: Individu atau kelompok orang yang datang atau hadir untuk menyaksikan dan menikmati berbagai pertunjukan seni dan budaya.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pengunjung pagelaran seni budaya
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pengunjung pagelaran seni budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Pameran Seni Budaya**

Alias	: -
Konsep	: Pameran seni budaya
Definisi	: Pameran yang diadakan untuk mempromosikan seni dan budaya dari suatu daerah.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pameran seni budaya
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pameran seni budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Pengunjung Pameran Seni Budaya**

Alias	: -
Konsep	: Pameran seni budaya
Definisi	: Individu atau kelompok orang yang menghadiri pameran seni untuk melihat, mengevaluasi, dan mengapresiasi karya seni yang dipamerkan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pengunjung pameran seni budaya
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pengunjung pameran seni budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Benda Cagar Budaya**

Alias	: -
Konsep	: Benda cagar budaya
Definisi	: Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: 1. Milik pemerintah daerah 2. Milik swasta
Aturan Validasi	: Harus mengisi benda cagar budaya
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah benda cagar budaya milik pemerintah daerah? 2. Berapa jumlah benda cagar budaya milik swasta? 3. Berapa jumlah benda cagar budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Bangunan Cagar Budaya**

Alias	: -
Konsep	: Bangunan cagar budaya
Definisi	: Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan beratap.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Milik pemerintah daerah 2. Milik swasta
Aturan Validasi	: Harus mengisi bangunan cagar budaya
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah bangunan cagar budaya milik pemerintah daerah? 2. Berapa jumlah bangunan cagar budaya milik swasta? 3. Berapa jumlah bangunan cagar budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Struktur Cagar Budaya**

Alias	: -
Konsep	: Struktur cagar budaya
Definisi	: Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk



memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Milik pemerintah daerah 2. Milik swasta
Aturan Validasi	: Harus mengisi struktur cagar budaya
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah struktur cagar budaya milik pemerintah daerah? 2. Berapa jumlah struktur cagar budaya milik swasta? 3. Berapa jumlah struktur cagar budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Situs Cagar Budaya**

Alias	: -
Konsep	: Situs cagar budaya
Definisi	: Lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Milik pemerintah daerah 2. Milik swasta
Aturan Validasi	: Harus mengisi situs cagar budaya
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah situs cagar budaya milik pemerintah daerah? 2. Berapa jumlah situs cagar budaya milik swasta? 3. Berapa jumlah situs cagar budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



❖ Penetapan Cagar Budaya

Alias	: -
Konsep	: Penetapan cagar budaya
Definisi	: Inventarisasi cagar budaya dan ditetapkan dengan Sk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Sudah ditetapkan 2. Belum ditetapkan
Aturan Validasi	: Harus mengisi siswa mengulang SD
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah cagar budaya milik pemerintah daerah yang sudah ditetapkan? 2. Berapa jumlah cagar budaya milik pemerintah daerah yang belum ditetapkan? 3. Berapa jumlah cagar budaya milik swasta yang sudah ditetapkan? 4. Berapa jumlah cagar budaya milik swasta yang belum ditetapkan?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Pelestarian Cagar Budaya

Alias	: -
Konsep	: Pelestarian cagar budaya
Definisi	: Usaha/ kegiatan dalam rangka melestarikan cagar budaya supaya tidak punah dari peradaban.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Dipugar 2. Belum dipugar



Aturan Validasi	: Harus mengisi pelestarian cagar budaya
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah cagar budaya milik pemerintah daerah yang dipugar? 2. Berapa jumlah cagar budaya milik pemerintah daerah yang belum dipugar? 3. Berapa jumlah cagar budaya milik swasta yang dipugar? 4. Berapa jumlah cagar budaya milik swasta yang belum dipugar?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **SDM Arkeolog**

Alias	: -
Konsep	: Arkeolog
Definisi	: Individu atau profesional yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan dalam bidang arkeologi.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi SDM arkeolog
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah SDM arkeolog?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Juru Pelihara Cagar Budaya**

Alias	: -
Konsep	: Cagar budaya
Definisi	: Salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak atau musnah.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi juru pelihara cagar budaya
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah juru pelihara cagar budaya?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Pengunjung Museum**

Alias	: -
Konsep	: Museum
Definisi	: Perorangan dan/ organisasi yang memanfaatkan layanan museum.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pengunjung museum
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pengunjung museum?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya



DINAS KESEHATAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI

DATA ANGKA KEMATIAN IBU KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2023

❖ Tanggal Meninggal

Alias	:	Angka kematian ibu maternal
Konsep	:	Tanggal
Definisi	:	Tanggal terjadinya kematian ibu
Referensi Pemilihan	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Char
Klasifikasi Isian	:	Tanggal meninggal ibu
Aturan Validasi	:	Harus mengisi tanggal kematian ibu
Kalimat Pertanyaan	:	Kapan tanggal meninggal ibu hamil?
Dapat Diakses umum	:	1-Ya

❖ Kabupaten / Kota

Alias	:	Kabupaten Purbalingga
Konsep	:	Kabupaten
Definisi	:	Kabupaten / kota tempat ibu meninggal



Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas. e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: String
Klasifikasi Isian	: Kabupaten Purbalingga
Aturan Validasi	: Kabupaten harus diisi
Kalimat Pertanyaan	: Dimana tempat kabupaten/kota tempat ibu meninggal dunia?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Nama Ibu

Alias	: Nama ibu yang meninggal
Konsep	: Nama
Definisi	: Nama ibu yang mengalami kematian
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi



- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : string
 Klasifikasi Isian : Nama ibu yang meninggal
 Aturan Validasi : Nama ibu yang mengalami kematian wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Siapakah nama ibu yang meninggal?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Umur

Alias : Usia
 Konsep : Umur
 Definisi : Umur ibu yang mengalami kematian
 Referensi Pemilihan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
- b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : float
 Klasifikasi Isian : Umur ibu ketika meninggal
 Aturan Validasi : Umur ibu ketika meninggal harus diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa umur ibu ketika meninggal?
 Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ KTP

Alias : Kartu Tanda Kependudukan
 Konsep : Alamat berdasarkan KTP
 Definisi : Alamat Ibu yang mengalami kematian berdasarkan KTP
 Referensi Pemilihan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
 b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
 c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
 e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

Referensi Waktu : 31 Desember 2023



Tipe Data	: Char
Klasifikasi Isian	: Alamat berdasarkan KTP
Aturan Validasi	: Alamat ibu meninggal berdasarkan KTP harus diisi
Kalimat Pertanyaan	: Dimana alamat ibu meninggal berdasarkan KTP?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Domisili

Alias	: Alamat domisili
Konsep	: Domisili
Definisi	: Alamat ibu yang mengalami kematian berdasarkan domisilinya
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: char
Klasifikasi Isian	: Alamat domisili ibu meninggal
Aturan Validasi	: Alamat domisili harus diisi
Kalimat Pertanyaan	: Dimana alamat ibu meninggal berdasarkan domisili?



Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Hamil ke

Alias : Hamil ke
Konsep : Hamil ke
Definisi : Jumlah urutan kehamilan dari ibu pada saat mengalami kematian
Referensi Pemilihan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : 1-10
Aturan Validasi : Urutan kehamilan yang menyebabkan ibu meninggal harus diisi
Kalimat Pertanyaan : Urutan kehamilan ke berapa saat ibu mengalami kematian?
Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Sebab

Alias : Alasan
Konsep : Sebab



Definisi	: Penyebab kematian ibu berdasarkan diagnosis dokter
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: String
Klasifikasi Isian	: Penyebab kematian ibu
Aturan Validasi	: Penyebab kematian ibu wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Apa yang menjadi penyebab kematian ibu?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Tempat Meninggal

Alias	: Tempat meninggal
Konsep	: Tempat meninggal
Definisi	: Tempat terjadinya kematian ibu
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi



Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Char
Klasifikasi Isian	:	Tempat terjadinya kematian ibu
Aturan Validasi	:	Tempat terjadinya kematian ibu wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Dimana tempat ibu mengalami kematian?
Dapat Diakses umum	:	1-Ya

❖ Masa

Alias	:	Periode
Konsep	:	Masa
Definisi	:	Masa terjadinya kematian ibu
Referensi Pemilihan	:	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatanb. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasic. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



	d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
	e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: String
Klasifikasi Isian	: 1. Hamil 2. Bersalin 3. Nifas
Aturan Validasi	: Masa terjadinya kematian ibu wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Kapan terjadinya kematian ibu?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Status Pernikahan

Alias	: Marital status
Konsep	: Status pernikahan
Definisi	: Status pernikahan dari ibu yang mengalami kematian
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas



	e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: String
Klasifikasi Isian	: 1. Kawin 2. Belum kawin
Aturan Validasi	: Status pernikahan ibu meninggal wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Apakah ibu meninggal sudah menikah?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ **Diagnosis**

Alias	: Perkiraan
Konsep	: Diagnosis dokter
Definisi	: Kode diagnosis penyebab kematian ibu berdasarkan kode ICD-10.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Char
Klasifikasi Isian	: Kode ICD-10



Aturan Validasi	: Kode diagnosis penyebab kematian wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Apakah diagnosis penyebab kematian ibu?
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA ANGKA KEMATIAN NEONATAL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Identitas Janin

Alias	: -
Konsep	: Identitas janin
Definisi	: Informasi yang terkait dengan karakteristik dan data khusus yang mengidentifikasi janin yang sedang dalam perkembangan dalam rahim ibu. Identitas janin biasanya dicatat dan tercatat dalam rekam medis prenatal untuk tujuan pemantauan kehamilan, perawatan prenatal, dan persiapan untuk prosedur medis yang mungkin diperlukan selama kehamilan atau persalinan.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Char
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Identitas janin wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: 1. Nama janin/neonatus 2. Jenis kelamin



3. Berat lahir
4. Usia gestasi
5. Apakah bayi yang meninggal masih hidup?

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Identitas Ibu

Alias : -

Konsep : Identitas ibu

Definisi : Informasi yang secara khusus terkait dengan data pribadi dan medis ibu yang dicatat dalam rekam medis tersebut.

Referensi Pemilihan : a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Float

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Identitas ibu wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : 1. Nama ibu
2. Umur ibu
3. NIK ibu
4. Pekerjaan ibu
5. Pendidikan terakhir ibu
6. Alamat KTP ibu
7. Alamat domisili Ibu

Dapat Diakses umum : 1-Ya

❖ Identitas Bapak

Alias : -

Konsep : Identitas bapak



Definisi	: Informasi yang secara khusus terkait dengan data pribadi dan medis bapak yang dicatat dalam rekam medis tersebut.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Identitas bapak wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: 1. Nama bapak 2. Umur bapak 3. Pekerjaan bapak 4. Pendidikan terakhir bapak
Dapat Diakses umum	: 1-Ya

❖ Identitas Fasilitas Kesehatan

Alias	: -
Konsep	: Identitas fasilitas kesehatan
Definisi	: Deskripsi lengkap dan terinci tentang suatu fasilitas kesehatan tertentu.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	:	Identitas fasilitas kesehatan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	1. Nama Faskes 2. Alamat Faskes 3. Tempat terjadinya kematian
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Informasi Kematian

Alias	:	-
Konsep	:	Informasi kematian
Definisi	:	Data dan catatan yang terkait dengan kejadian kematian bayi yang meninggal.
Referensi Pemilihan	:	a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Informasi kematian wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	1. Kelompok kematian 2. Waktu kematian 3. Penyebab kematian
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Kondisi Neonatus

Alias	:	-
Konsep	:	Kondisi neonatus
Definisi	:	Data dan detail medis yang terkait dengan bayi yang baru lahir (neonatus) dan periode perinatal, yang mencakup waktu sejak kehamilan dimulai hingga beberapa minggu setelah kelahiran.



Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kondisi neonatus wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: 1. Kulit bayi 2. Tali pusar 3. Menangis 4. Gerakan bayi 5. Suhu tubuh 6. Mata 7. Mulut bayi 8. Gangguan napas 9. Telinga 10. Gangguan minum 11. Perut 12. Buang air besar
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pemeriksaan Penunjang selama Neonates Menjalani Perawatan

Alias	: -
Konsep	: Pemeriksaan penunjang selama neonates menjalani perawatan
Definisi	: Serangkaian uji atau evaluasi tambahan yang dilakukan untuk mendukung diagnosis, pemantauan, dan penanganan kesehatan bayi yang baru lahir (neonatus) selama periode perawatan.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang



Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024

- b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten
Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023
tentang Manual Rujukan Maternal
Neonatal

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Pemeriksaan penunjang selama neonates menjalani perawatan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: 1. Hemoglobin 2. Hematokrit 3. Leukosit 4. Trombosit 5. Skrining pendarahan 6. Bilirubin 7. Kalsium 8. Natrium 9. Kalium 10. Gula darah 11. Albumin 12. Saturasi oksigen 13. Analisis gas darah
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Tindakan yang Dilakukan selama Neonates Menjalani Perawatan**

Alias	: -
Konsep	: Tindakan yang dilakukan selama neonates menjalani perawatan
Definisi	: Tindakan perawatan yang melibatkan serangkaian intervensi medis yang bertujuan untuk memastikan kesehatan dan perkembangan yang optimal selama periode kritis setelah kelahiran.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang



Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024

b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten
Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023
tentang Manual Rujukan Maternal
Neonatal

Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Tindakan yang dilakukan selama neonates menjalani perawatan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah dilakukan perawatan neonatal esensial?2. Apakah dilakukan stabilisasi?3. Apakah Bayi mendapat resusitasi?4. Adakah catatan resusitasi?5. Apakah diberi alat bantu napas/oksigen?6. Lama pemakaian alat bantu napas?7. Bila hanya diberi oksigen, bagaimana cara pemberiannya?8. Apakah bayi dipuaskan?9. Bila YA, kapan bayi dipuaskan?10. Apakah bayi diberi minum per- enternal?11. Minuman apa yang diberikan?12. Bagaimana cara pemberiannya?13. Tuliskan dosis pemberian nutrisi?14. Tuliskan asupan kalori harian?15. Apakah bayi mendapatkan trophic feeding dan peningkatan volume minum?16. Apakah ada intoleransi minum?17. Apakah ada pemberian HMF?18. Apakah bayi mendapat nutrisi patenetrat?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya



❖ **Kehamilan**

Alias	:	-
Konsep	:	Kehamilan
Definisi	:	Kondisi di mana seorang wanita membawa janin dalam rahimnya, dimulai dari pembuahan hingga proses persalinan.
Referensi Pemilihan	:	a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Char
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Kehamilan Wajib Diisi
Kalimat Pertanyaan	:	1. Status obstetrik 2. Jumlah janin 3. Apakah ibu pernah memeriksakan kehamilan 4. Frekuensi ANC 5. Apakah selama hamil ibu menerima suplementasi
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ **Persalinan**

Alias	:	-
Konsep	:	Persalinan
Definisi	:	Proses fisiologis atau intervensi medis yang melibatkan keluarnya bayi, plasenta, dan produk-produk konsepsi lainnya dari rahim ibu.
Referensi Pemilihan	:	a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang



Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

- b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Char
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Persalinan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: <ol style="list-style-type: none">1. Lama persalinan2. Pada waktu bersalin, apa yang keluar terlebih dahulu?3. Cara persalinan4. Apakah ada trauma lahir yang diperlihatkan dengan adanya jejas pada neonatus akibat proses persalinan?5. Berat lahir6. Pertumbuhan janin7. Apakah terdapat kelainan bawaan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Komplikasi**

Alias	: -
Konsep	: Komplikasi
Definisi	: Komplikasi yang dialami selama masa kehamilan, persalinan dan nifas.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Char



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Komplikasi Wajib Diisi
Kalimat Pertanyaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anemia? 2. Apakah ada pendarahan? 3. Apakah ibu memiliki salah satu atau lebih penyakit? 4. Apakah terdapat hipertensi dalam kehamilan, preklamsia, eklampsia atau HELLP syndrome? 5. Atonia Uteri? 6. Penurunan kesadaran? 7. Penuruna kesadaran? 8. Demam tinggi? 9. Partus macet? 10. Ketuban pecah dini? 11. berapa lama bayi dilahirkan sejak ketuban pecah? 12. Air Ketuban bercampur mekonium? 13. Cairan ketuban berbau? 14. Polihidramnion? 15. Oligohidramnion? 16. Kondisi janin spesifik?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tenaga Kesehatan

Alias	: -
Konsep	: Tenaga kesehatan
Definisi	: Para profesional kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan khusus dalam merawat ibu hamil, bayi yang baru lahir (neonatus), dan keluarganya selama periode kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024



	b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Char
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Tenaga kesehatan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kehamilan, persalinan dan paska salin?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA BERAT BADAN BAYI RENDAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Bayi dengan BBLR

Alias	: -
Konsep	: Bayi dengan BBLR
Definisi	: Bayi dengan berat badan kurang dari 2,5 kg
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Jumlah bayi dengan BBLR wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Balita

Alias : -

Konsep : Balita

Definisi : Anak yang berusia 0-59 bulan dalam kurun waktu tertentu

Referensi Pemilihan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -



Aturan Validasi : Jumlah balita wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah balita di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Balita Gizi Buruk**

Alias : -
Konsep : Balita gizi buruk
Definisi : Anak usia 0-59 bulan dengan keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan Zscore berdasarkan BB/PB atau BB/TB (Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan) kurang dari sama dengan -3SD (Standar Deviasi) baku WHO.
Referensi Pemilihan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Jumlah balita gizi buruk wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Balita Gizi Kurang**

Alias	: -
Konsep	: Balita gizi kurang
Definisi	: Anak usia 0-59 bulan dengan keadaan kurang zat gizi tingkat ringan yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan Zscore berdasarkan BB/PB atau BB/TB (Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan) berada pada <-2 SD sampai dengan >-3 SD baku WHO.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Jumlah balita gizi kurang wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah balita gizi kurang di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENYAKIT TIDAK MENULAR KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Diabetes Melitus

Alias	: -
Konsep	: Diabetes melitus
Definisi	: Suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas



	e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Jumlah diabetes melitus wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penderita diabetes melitus di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Penderita Hipertensi

Alias	: -
Konsep	: Penderita hipertensi
Definisi	: Peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas



	e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	:
Aturan Validasi	: Jumlah penderita hipertensi wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kasus Kanker

Alias	: -
Konsep	: Kasus kanker
Definisi	: Penyakit yang ditandai dengan adanya sel yang abnormal yang bisa berkembang tanpa terkendali dan memiliki kemampuan untuk menyerang dan berpindah antar sel dan jaringan tubuh.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Jumlah kasus kanker wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penderita kasus kanker di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Penderita ODGJ

Alias	: -
Konsep	: Penderita ODGJ
Definisi	: Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Jumlah penderita ODGJ wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah penderita ODGJ di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA RASIO DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ **Dokter Umum**

Alias : -
 Konsep : Dokter umum
 Definisi : Tenaga kesehatan profesional yang berlatar belakang pendidikan kedokteran dan memberikan pelayanan kesehatan, misal membuat diagnosis medis dan penanganannya.
 Referensi Pemilihan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
- b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas



e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Jumlah dokter umum wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah dokter umum di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Dokter Spesialis

Alias : -

Konsep : Dokter spesialis

Definisi : Dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Referensi Pemilihan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

Referensi Waktu : 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anak 2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3. Dokter Spesialis Bedah 4. Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan 5. Dokter Spesialis THT 6. Dokter Spesialis Mata 7. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 8. Dokter Spesialis Saraf 9. Dokter Spesialis Patologi Klinik 10. Dokter Spesialis Radiologi 11. Dokter Spesialis Anestesi 12. Dokter Spesialis Orthopedi 13. Dokter Spesialis Gigi
Aturan Validasi	: Jumlah dokter spesialis wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah dokter spesialis di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Dokter Gigi

Alias	: -
Konsep	: Dokter gigi
Definisi	: Dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu



- Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Jumlah dokter gigi wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah dokter gigi di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Perawat

Alias : -
 Konsep : Perawat
 Definisi : Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Referensi Pemilihan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
 b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
 c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



	d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas
	e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Jumlah perawat wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah perawat di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Bidan**

Alias	: -
Konsep	: Bidan
Definisi	: Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas



	e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Jumlah bidan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah bidan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tenaga Farmasi

Alias	: -
Konsep	: Tenaga farmasi
Definisi	: Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Jumlah tenaga farmasi wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah tenaga farmasi di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Tenaga Gizi

Alias : -
 Konsep : Tenaga gizi
 Definisi : Setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan.
 Referensi Pemilihan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
 b. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
 c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
 e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : jumlah tenaga gizi wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah tenaga gizi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



SURVEI KONDISI JALAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Jenis Perkerasan

Alias	: -
Konsep	: Perkerasan rigid dan fleksibel
Definisi	: Jenis struktur/konstruksi perkerasan jalan (aspal, beton, macadam, dll).
Referensi Pemilihan	: Survei Jalan dan Jembatan Tahun 2021
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: 1. Rigid 2. Fleksibel
Aturan Validasi	: Harus mengisi data jenis perkerasan
Kalimat Pertanyaan	: Apa jenis perkerasan ruas jalan tersebut?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kondisi Jalan

Alias	: -
Konsep	: Kondisi jalan
Definisi	: Kondisi kualitas suatu ruas jalan.
Referensi Pemilihan	: Survei Jalan dan Jembatan Tahun 2021
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: 1. baik 2. sedang 3. rusak
Aturan Validasi	: Harus mengisi data kondisi jalan baik, sedang dan rusak
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana kondisi ruas jalan tersebut?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Dimensi Jalan

Alias	: -
Konsep	: Dimensi jalan



Definisi	: Angka panjang, lebar dan ketebalan jalan di Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Survei Jalan dan Jembatan Tahun 2021
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: 1. Panjang 2. Lebar 3. Ketebalan
Aturan Validasi	: Harus mengisi data dimensi jalan
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa panjang ruas jalan tersebut? 2. Berapa lebar ruas jalan tersebut? 3. Berapa ketebalan ruas jalan tersebut?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Jenis Kelengkapan Sarana Pendukung Jalan

Alias	: -
Konsep	: Drainase, talud, trotoar
Definisi	: Ketersediaan kelengkapan yang mendukung fungsi jalan.
Referensi Pemilihan	: Survei Jalan dan Jembatan Tahun 2021
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: 1. Drainase 2. Talud 3. Trotoar
Aturan Validasi	: Harus mengisi data kelengkapan sarana pendukung jalan
Kalimat Pertanyaan	: Apa jenis kelengkapan sarana pendukung jalan yang terdapat pada ruas jalan tersebut?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Rencana Tata Ruang Wilayah

Alias	: RTRW
Konsep	: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Definisi	: Dokumen perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang wilayah di suatu wilayah atau daerah tertentu.
Referensi Pemilihan	: Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi RTRW
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah RTRW?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Rencana Detail Tata Ruang

Alias	: RDTR
Konsep	: Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Definisi	: Rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten. RDTR merupakan instrumen perencanaan yang lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Referensi Pemilihan	: Perbup Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021-2041 dan Perbup Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bobotsari Tahun 2023-2043.



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi RDTR
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah RDTR?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Permohonan Kesesuaian Tata Ruang**

Alias : -
 Konsep : Permohonan kesesuaian tata ruang
 Definisi : Permohonan kesesuaian lokasi lahan/ ruang yang diajukan oleh masyarakat/ instansi kepada instansi yang menangani penataan ruang kabupaten.
 Referensi Pemilihan : Permen ATR/Ka.BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi permohonan kesesuaian tata ruang
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah permohonan kesesuaian tata ruang?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Rekomendasi Forum Penataan Ruang**

Alias : Rekomendasi FPR
 Konsep : Rekomendasi FPR
 Definisi : Rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Tim Forum Penataan Ruang Purbalingga sesuai dengan SK Bupati Purbalingga Nomor 600/346 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Purbalingga.



Referensi Pemilihan	: SK Bupati Purbalingga Nomor 600/346 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Sesuai 2. Sesuai Sebagian 3. Tidak Sesuai
Aturan Validasi	: Harus mengisi Rekomendasi FPR
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah Rekomendasi FPR? 2. Berapa jumlah Rekomendasi FPR yang sesuai? 3. Berapa jumlah Rekomendasi FPR yang sesuai sebagian? 4. Berapa jumlah Rekomendasi FPR yang tidak sesuai?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Informasi Tata Ruang

Alias	: ITR
Konsep	: Informasi Tata Ruang (ITR)
Definisi	: Informasi kesesuaian tata ruang berdasarkan rencana pola ruang yang tertuang dalam dokumen tata ruang.
Referensi Pemilihan	: Permen ATR/Ka.BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Sesuai 2. Tidak Sesuai
Aturan Validasi	: Harus mengisi ITR
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah ITR? 2. Berapa jumlah ITR yang sesuai? 3. Berapa jumlah ITR yang tidak sesuai?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang

Alias	: -
Konsep	: Ketaatan pelaksanaan penataan ruang
Definisi	: Realisasi pemanfaatan ruang terhadap rencana peruntukan (pola ruang).
Referensi Pemilihan	: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi ketaatan pelaksanaan penataan ruang
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang? 2. Berapa jumlah total permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KONDISI JARINGAN IRIGASI/ PENGAIRAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Jaringan Irigasi Non Teknis

Alias	: -
Konsep	: Jaringan irigasi
Definisi	: Jaringan irigasi yang memperoleh pengairan jaringan irigasinya masih sederhana dan saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi



	b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi jaringan irigasi non teknis
Kalimat Pertanyaan	: Berapa panjang jaringan irigasi non teknis?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis

Alias	: -
Konsep	: Jaringan irigasi, saluran kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat
Definisi	: Kondisi jaringan Irigasi non teknis yang diklasifikasikan menjadi saluran kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Kondisi Baik 2. Kondisi Sedang 3. Kondisi Rusak Ringan 4. Kondisi Rusak Berat
Aturan Validasi	: Harus mengisi kondisi jaringan irigasi non teknis



- Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa panjang saluran jaringan irigasi non teknis dalam kondisi baik?
2. Berapa panjang saluran jaringan irigasi non teknis dalam kondisi sedang?
3. Berapa panjang saluran jaringan irigasi non teknis dalam kondisi rusak ringan?
4. Berapa panjang saluran jaringan irigasi non teknis dalam kondisi rusak berat?
- Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Jaringan Irigasi Teknis

- Alias : -
- Konsep : Jaringan irigasi
- Definisi : Irigasi dimana pengairannya bisa diatur dan diukur. Sistem pengairan ini dilengkapi dengan pintu untuk mengatur keluar masuk air.
- Referensi Pemilihan : a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi
- Referensi Waktu : 31 Desember 2023
- Tipe Data : Integer
- Klasifikasi Isian : -
- Aturan Validasi : Harus mengisi jaringan irigasi teknis
- Kalimat Pertanyaan : Berapa panjang jaringan irigasi teknis?
- Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Saluran Irigasi Primer

- Alias : -
- Konsep : Saluran irigasi



Definisi	:	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnnya.
Referensi Pemilihan	:	a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi saluran irigasi primer
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa panjang saluran irigasi primer?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Kondisi Saluran Irigasi Primer

Alias	:	-
Konsep	:	Saluran irigasi, saluran kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat
Definisi	:	Kondisi saluran Irigasi primer yang diklasifikasikan menjadi saluran kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat.
Referensi Pemilihan	:	a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah



Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun
2013 tentang Irigasi

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Kondisi Baik 2. Kondisi Sedang 3. Kondisi Rusak Ringan 4. Kondisi Rusak Berat
Aturan Validasi	: Harus mengisi kondisi saluran irigasi primer
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa panjang saluran jaringan irigasi primer dalam kondisi baik? 2. Berapa panjang saluran jaringan irigasi primer dalam kondisi sedang? 3. Berapa panjang saluran jaringan irigasi primer dalam kondisi rusak ringan? 4. Berapa panjang saluran jaringan irigasi primer dalam kondisi rusak berat?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Saluran Irigasi Sekunder**

Alias	: -
Konsep	: Saluran irigasi
Definisi	: Jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi saluran irigasi sekunder
 Kalimat Pertanyaan : Berapa panjang saluran irigasi sekunder?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Kondisi Saluran Irigasi Sekunder**

Alias : -
 Konsep : Saluran irigasi, saluran kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat
 Definisi : Jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
 Referensi Pemilihan : a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
 b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : 1. Kondisi Baik
 2. Kondisi Sedang
 3. Kondisi Rusak Ringan
 4. Kondisi Rusak Berat
 Aturan Validasi : Harus mengisi kondisi saluran irigasi sekunder
 Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa panjang saluran jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik?



2. Berapa panjang saluran jaringan irigasi sekunder dalam kondisi sedang?
3. Berapa panjang saluran jaringan irigasi sekunder dalam kondisi rusak ringan?
4. Berapa panjang saluran jaringan irigasi sekunder dalam kondisi rusak berat?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Bendung

Alias : -

Konsep : Bendung

Definisi : Bangunan yang dibangun melintang sungai sehingga dapat membelokkan air menuju jaringan irigasi. Adanya bendung akan membentuk genangan pada hulu bangunan, selain itu bendung juga dapat berfungsi sebagai penghalang banjir.

Referensi Pemilihan : a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi bendung

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah bendung?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Daerah Irigasi/ Bangunan Irigasi

Alias : -

Konsep : Daerah irigasi/ bangunan irigasi



Definisi	: Bangunan yang berfungsi untuk membagi air irigasi dari satu saluran kedalam dua atau lebih saluran. Contohnya pada saluran dari bendung dibawa oleh saluran primer, kemudian terdapat bangunan bagi yang membagi saluran tersebut menjadi saluran sekunder kanan dan saluran sekunder kiri. Kondisi bangunan Irigasi hanya membagi saluran kedalam satu saluran sekunder, sedangkan saluran pada lengan yang lain tetap merupakan sebagai saluran primer.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi daerah irigasi/ bangunan irigasi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah daerah irigasi/ bangunan irigasi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Daerah Irigasi

Alias	: -
Konsep	: Irigasi
Definisi	: Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor



	14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
	b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi daerah irigasi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa luas daerah irigasi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi

Alias	: -
Konsep	: Irigasi
Definisi	: Area yang menerima manfaat atau pelayanan dari sistem jaringan irigasi
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERUMAHAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Kepemilikan Rumah

Alias	: -
Konsep	: Kepemilikan rumah
Definisi	: Rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kepemilikan rumah wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kepemilikan rumah di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Alias	: -
Konsep	: Rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Definisi	: Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Rusun Hunian Milik

Alias	: -
Konsep	: Rusun hunian milik
Definisi	: Rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Rusun hunian milik wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah rusun hunian milik di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Daya Tampung Rusun Hunian Milik

Alias	: -
Konsep	: Daya tampung rusun hunian milik



Definisi	: Kapasitas Rusunami (Rusun Hunian Milik) dalam menampung jumlah penghuninya. Daya tampung rusunami merujuk pada jumlah unit hunian yang tersedia dalam rusun hunian milik untuk dihuni individu atau keluarga.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Daya tampung rusun hunian milik wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah daya tampung rusun hunian milik di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Rusun Hunian Sewa

Alias	: -
Konsep	: Rusun hunian sewa
Definisi	: Rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Rusun hunian sewa wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah rusun hunian sewa di Kabupaten Purbalingga?



Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Daya Tampung Rusun Hunian Sewa

Alias : -
Konsep : Daya tampung rusun hunian sewa
Definisi : Kapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya.
Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Daya tampung rusun hunian sewa wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah daya tampung rusun hunian sewa di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Perumahan Developer

Alias : -
Konsep : Perumahan *developer*
Definisi : Perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain.
Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Perumahan *developer* wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah perumahan *developer* di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Rumah Layak Huni

Alias : -
Konsep : Rumah layak huni
Definisi : Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan kriteria atap yang memadai, tertutup dan tidak bocor, memiliki lantai dan dindingnya kokoh layak.
Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Rumah layak huni wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah rumah layak huni di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Rumah Tidak Layak Huni

Alias : -
Konsep : Rumah tidak layak huni
Definisi : Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan kriteria pondasi tidak kokoh, material tidak berkualitas, sirkulasi cahaya udara yang buruk.
Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada



	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Rumah tidak layak huni wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penanganan Rumah Tidak Layak Huni**

Alias	: -
Konsep	: Penanganan rumah tidak layak huni
Definisi	: Penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Penanganan rumah tidak layak huni wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Backlog Rumah**

Alias	: -
Konsep	: Backlog rumah
Definisi	: Selisih antara jumlah kartu keluarga dengan jumlah rumah yang ada.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada



	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Backlog rumah wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah backlog rumah di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Rumah Korban Bencana

Alias	: -
Konsep	: Rumah korban bencana
Definisi	: Rumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin rebut, dll).
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Rumah korban bencana wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah rumah korban bencana di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Kawasan Permukiman Kumuh

Alias	: -
Konsep	: Kawasan permukiman kumuh
Definisi	: Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan



	kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga).
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kawasan permukiman kumuh wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh

Alias	: -
Konsep	: Rumah tangga yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh
Definisi	: Rumah tangga yang menghuni kawasan permukiman dalam kategori kumuh.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Rumah tangga yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah rumah tangga yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga?



Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh**

Alias : -

Konsep : Bangunan rumah di kawasan pemukiman kumuh

Definisi : Bangunan rumah yang terdapat di kawasan permukiman dalam kategori kumuh.

Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Bangunan rumah di kawasan pemukiman kumuh wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah bangunan rumah di kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Luas Penanganan Kawasan Kumuh**

Alias : -

Konsep : Luas penanganan kawasan kumuh

Definisi : Ukuran atau area kawasan kumuh yang ditangani atau yang tertangani.

Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Luas penanganan kawasan kumuh wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah luas penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh**

Alias : -
 Konsep : Sisa luas kawasan kumuh/ luas kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh
 Definisi : Ukuran atau area dari kawasan permukiman yang masih memenuhi kriteria pemukiman kumuh atau tidak layak huni dan belum mendapatkan intervensi atau tindakan perbaikan.
 Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Sisa luas kawasan kumuh/ luas kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah sisa luas kawasan kumuh/ luas kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Luas Kawasan Permukiman Perkotaan**

Alias : -
 Konsep : Luas kawasan permukiman perkotaan
 Definisi : Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pekoataan, pemusatan dan distribusi



	pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Luas kawasan permukiman perkotaan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah luas kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Air Minum Layak

Alias	: -
Konsep	: Air minum layak
Definisi	: Air minum yang terlindung meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. air ledeng (kran), kran umum, hydrant umum, terminal air, Penampungan Air Hujan (PAH) atau; 2. mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. (Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Air minum layak wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah air minum layak di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Sanitasi Layak

Alias	: -
Konsep	: Sanitasi layak
Definisi	: Sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Sanitasi layak wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sanitasi layak di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Luas Tanah Milik Pemda (Eks-Bengkok) yang Dimanfaatkan

Alias	: -
Konsep	: Luas tanah milik pemda (eks-bengkok) yang dimanfaatkan



Definisi	: Jumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan masyarakat melalui proses lelang dan mekanisme sewa.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Luas tanah milik pemda (eks-bengkok) yang dimanfaatkan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah luas tanah milik pemda (eks-bengkok) yang dimanfaatkan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)

Alias	: -
Konsep	: Luasan tanah milik pemda (eks bengkok)
Definisi	: Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Luasan tanah milik pemda (eks bengkok) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah luasan tanah milik pemda (eks bengkok) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya

Alias	: -
Konsep	: Pengadaan tanah yang diselesaikan pengadaannya
Definisi	: Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Pengadaan tanah yang diselesaikan pengadaannya wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pengadaan tanah yang diselesaikan pengadaannya di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Rencana Pengadaan Tanah

Alias	: -
Konsep	: Rencana pengadaan tanah
Definisi	: Rencana kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Rencana pengadaan tanah wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah rencana pengadaan tanah di Kabupaten Purbalingga?



Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok

Alias : -

Konsep : Kasus sengketa tanah eks bengkok

Definisi : Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Kasus sengketa tanah eks bengkok wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah kasus sengketa tanah eks bengkok di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya



DINSOSDALDUKKBP3A

**METADATA VARIABEL
STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN PURBALINGGA**



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PROFIL ANAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Komposisi Penduduk Anak

Alias	:	-
Konsep	:	Anak
Definisi	:	Distribusi penduduk anak terhadap populasi penduduk.
Referensi Pemilihan	:	Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. usia 0-4 tahun 2. usia 5-9 tahun 3. usia 10-14 tahun 4. usia 15-19 tahun
Aturan Validasi	:	Harus mengisi komposisi penduduk anak
Kalimat Pertanyaan	:	1. Berapa jumlah penduduk anak usia 0-4 tahun? 2. Berapa jumlah penduduk anak usia 5-9 tahun? 3. Berapa jumlah penduduk anak usia 10-14 tahun? 4. Berapa jumlah penduduk anak usia 15-19 tahun?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Kepemilikan Akta Kelahiran

Alias	:	-
Konsep	:	Akta kelahiran
Definisi	:	Identitas diri anak sejak kelahirannya
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kepemilikan akta kelahiran
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kepemilikan akta kelahiran?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Perkawinan Usia Dini

Alias	: -
Konsep	: Perkawinan usia dini
Definisi	: Anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah, anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.
Referensi Pemilihan	: Pasal 26 Undang-undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 jo UU Nomor 16 tahun 2019 jo UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi perkawinan usia dini
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah anak laki-laki usia < 19 tahun yang menikah? 2. Berapa jumlah anak perempuan usia <16 tahun yang menikah? 3. Berapa jumlah anak perempuan usia 16-19 tahun yang menikah? 4. Berapa jumlah perkawinan anak?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Bina Keluarga Balita (BKB)

Alias	: -
Konsep	: BKB
Definisi	: Upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota Keluarga lain dalam membina tumbuh kembang melalui rangsangan fisik,



motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota Keluarga lainnya dengan anak balita.

Referensi Pemilihan	: Program Bina Keluarga Balita, Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Bina Keluarga Balita (BKB)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Bina Keluarga Balita (BKB)?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Bina Keluarga Remaja (BKR)**

Alias	: -
Konsep	: BKR
Definisi	: Wadah untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun.
Referensi Pemilihan	: UU Nomor 10 Tahun 1992 Juncto UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Bina Keluarga Remaja (BKR)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR)?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ **Kematian Neonatal**

Alias	: -
Konsep	: Kematian neonatal
Definisi	: Kematian bayi berusia dibawah 28 hari.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kematian neonatal
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kasus kematian neonatal?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Kematian Bayi**

Alias	: -
Konsep	: Kematian bayi
Definisi	: Kematian bayi berusia dibawah 2 tahun.
Referensi Pemilihan	: Undang - Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kematian bayi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kasus kematian bayi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Kematian Balita**

Alias	: -
Konsep	: Kematian balita
Definisi	: Kematian anak berusia dibawah 5 tahun.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kematian balita
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kasus kematian balita?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Bayi dengan Berat Badan Lebih Rendah (BBLR)**

Alias	: -
Konsep	: BBLR
Definisi	: Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Bayi dengan Berat Badan Lebih Rendah (BBLR)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Bayi dengan Berat Badan Lebih Rendah (BBLR)?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Status Gizi Balita**

Alias	: -
Konsep	: Status gizi balita
Definisi	: Keadaan gizi anak balita umur 0-59 bulan yang ditentukan dengan metode Antropometri, berdasarkan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB).
Referensi Pemilihan	: Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak jo Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi status gizi balita
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah balita gizi kurang? 2. Berapa jumlah balita gizi buruk?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Pemberian ASI Eksklusif**

Alias	: -
Konsep	: Pemberian ASI eksklusif
Definisi	: Pemberian ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi sejak baru lahir hingga berumur 6 bulan tanpa digantikan oleh minuman serta makanan lain.
Referensi Pemilihan	: Pasal 21 Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak jo Undang-undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: 1. tidak disusui 2. disusui 0-5 bulan 3. disusui 6-11 bulan 4. disusui 12-17 bulan 5. disusui 17-23 bulan
Aturan Validasi	: Harus mengisi pemberian ASI eksklusif
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa persentase baduta tidak disusui? 2. Berapa persentase baduta disusui selama 0-5 bulan? 3. Berapa persentase baduta disusui selama 6-11 bulan? 4. Berapa persentase baduta disusui selama 12-17 bulan? 5. Berapa persentase baduta disusui selama 17-23 bulan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ **Imunisasi**

Alias	: -
Konsep	: Imunisasi
Definisi	: Suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
Referensi Pemilihan	: Pasal 1 Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi jo UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi imunisasi
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa persentase cakupan imunisasi HB 0? 2. Berapa persentase cakupan imunisasi BCG? 3. Berapa persentase cakupan imunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3? 4. Berapa persentase cakupan imunisasi polio 4? 5. Berapa persentase cakupan imunisasi campak?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Partisipasi Sekolah**

Alias	: -
Konsep	: Partisipasi sekolah
Definisi	: Anak yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.
Referensi Pemilihan	: Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Amandemen



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi partisipasi sekolah
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Purbalingga? 2. Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Purbalingga? 3. Berapa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Anak Balita Terlantar

Alias	: -
Konsep	: Anak balita terlantar
Definisi	: Balita yang membutuhkan pengasuhan orang tua dengan baik secara jasmani, rohani dan sosial.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi anak balita terlantar
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah anak balita terlantar?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Anak Terlantar

Alias	: -
Konsep	: Anak terlantar
Definisi	: Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.



Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi anak terlantar
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah anak terlantar?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)

Alias	: -
Konsep	: Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)
Definisi	: Anak yang sedang berkonflik dengan hukum, menjadi korban hukum dan anak sebagai saksi tindak pidana.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Anak Jalanan

Alias	: -
Konsep	: Anak jalanan
Definisi	: Anak-anak yang melakukan sebagian besar di jalanan untuk mencari nafkah.



Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi anak jalanan
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah anak jalanan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Anak dengan Kedisabilitas

Alias	:	-
Konsep	:	Anak dengan kedisabilitas
Definisi	:	Anak yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental yang dapat mengganggu aktivitas lainnya.
Referensi Pemilihan	:	Pasal 1 Nomor 7 UU Nomor 35 tahun 2014 jo UU Nomor 23 tahun 2002
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi anak dengan kedisabilitas
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah anak dengan kedisabilitas?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan

Alias	:	-
Konsep	:	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
Definisi	:	Anak yang mengalami perlakuan kurang baik serta mengalami tindak kekerasan.
Referensi Pemilihan	:	Pasal 59 UU Nomor 23 tahun 2002
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi anak yang menjadi korban tindak kekerasan



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)**

Alias : -
Konsep : AMPK
Definisi : Anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Referensi Pemilihan : Pasal 59 UU Nomor 35 tahun 2014
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PROFIL GENDER KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk
Definisi	:	Distribusi penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. usia 0-4 tahun 2. usia 5-9 tahun 3. usia 10-14 tahun 4. usia 15-19 tahun 5. usia 20-24 tahun 6. usia 25-29 tahun 7. usia 30-34 tahun 8. usia 35-39 tahun 9. usia 40-44 tahun 10. usia 45-49 tahun 11. usia 50-54 tahun 12. usia 55-59 tahun 13. usia 60-64 tahun 14. usia 65+ tahun
Aturan Validasi	:	Harus mengisi penduduk berdasarkan kelompok umur
Kalimat Pertanyaan	:	1. Berapa jumlah penduduk usia 0-4 tahun? 2. Berapa jumlah penduduk usia 5-9 tahun? 3. Berapa jumlah penduduk usia 10-14 tahun? 4. Berapa jumlah penduduk usia 15-19 tahun?



5. Berapa jumlah penduduk usia 20-24 tahun?
6. Berapa jumlah penduduk usia 25-29 tahun?
7. Berapa jumlah penduduk usia 30-34 tahun?
8. Berapa jumlah penduduk usia 35-39 tahun?
9. Berapa jumlah penduduk usia 40-44 tahun?
10. Berapa jumlah penduduk usia 45-49 tahun?
11. Berapa jumlah penduduk usia 50-54 tahun?
12. Berapa jumlah penduduk usia 55-59 tahun?
13. Berapa jumlah penduduk usia 60-64 tahun?
14. Berapa jumlah penduduk usia 65+ tahun?
15. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Ketergantungan penduduk

Alias	: -
Konsep	: Penduduk
Definisi	: Ketergantungan penduduk umur 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja/usia non produktif) terhadap penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/ usia produktif).
Referensi Pemilihan	: UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi ketergantungan penduduk
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas? 2. Berapa jumlah penduduk usia 15-64 tahun? 3. Berapa rasio ketergantungan penduduk?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pelayanan Antenatal

Alias	: -
Konsep	: Pelayanan antenatal
Definisi	: Pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.
Referensi Pemilihan	: UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pelayanan antenatal
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah kunjungan ibu hamil K1? 2. Berapa jumlah kunjungan ibu hamil K4?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Persalinan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)

Alias	: -
Konsep	: Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (nakes)
Definisi	: Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (bidan, dokter, dan tenaga para medis lainnya).



Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual jo UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pelayanan Ibu Nifas

Alias : -
 Konsep : Pelayanan ibu nifas
 Definisi : Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual jo UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi pelayanan ibu nifas
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah ibu nifas mendapatkan pelayanan s.d KF3?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya



❖ Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

Alias	: -
Konsep	: Ibu nifas mendapat vitamin A
Definisi	: Ibu yang baru melahirkan atau nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A 200.000 SI sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A melalui ASI.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual jo UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi ibu nifas mendapat vitamin A
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah ibu nifas mendapat vitamin A?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Penanganan Komplikasi Kebidanan

Alias	: -
Konsep	: Penanganan komplikasi kebidanan
Definisi	: Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Puskesmas, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).
Referensi Pemilihan	: UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penanganan komplikasi kebidanan



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah penanganan komplikasi kebidanan?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Penanganan Komplikasi Neonatal**

Alias : -
 Konsep : Penanganan komplikasi neonatal
 Definisi : Penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/ kegawatdaruratan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan.
 Referensi Pemilihan : UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi penanganan komplikasi neonatal
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah penanganan komplikasi neonatal?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Penolong Terakhir Kelahiran Anak**

Alias : -
 Konsep : Penolong terakhir kelahiran anak
 Definisi : Tenaga penolong kelahiran yang terakhir membantu proses kelahiran seorang ibu.
 Referensi Pemilihan : UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : 1. Dokter kandungan



	2. Dokter umum
	3. Bidan
	4. Perawat
	5. Dukun
	6. Lainnya
	7. Tidak ada
Aturan Validasi	: Harus mengisi penolong terakhir kelahiran anak
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah kelahiran yang penolong terakhirnya dokter kandungan? 2. Berapa jumlah kelahiran yang penolong terakhirnya dokter umum? 3. Berapa jumlah kelahiran yang penolong terakhirnya bidan? 4. Berapa jumlah kelahiran yang penolong terakhirnya perawat? 5. Berapa jumlah kelahiran yang penolong terakhirnya dukun? 6. Berapa jumlah kelahiran yang penolong terakhirnya selain dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dukun (lainnya)?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Harapan Hidup

Alias	: -
Konsep	: Harapan hidup
Definisi	: Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
Referensi Pemilihan	: UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi harapan hidup
Kalimat Pertanyaan	: Berapa angka harapan hidup Kabupaten Purbalingga?



Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Keluhan Kesehatan

Alias : -
Konsep : Keluhan kesehatan
Definisi : Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan kriminal atau hal lain.
Referensi Pemilihan : UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi keluhan kesehatan
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pasangan Usia Subur (PUS)

Alias : -
Konsep : Pasangan Usia Subur (PUS)
Definisi : Pasangan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Referensi Pemilihan : UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : 1. PUS usia < 20 tahun
2. PUS usia 20-29 tahun
3. PUS usia > 29 tahun
Aturan Validasi : Harus mengisi PUS
Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah PUS usia < 20 tahun?
2. Berapa jumlah PUS usia 20-29 tahun?
3. Berapa jumlah PUS usia > 29 tahun?



4. Berapa jumlah PUS?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Kesertaan ber-KB PUS

Alias : -
Konsep : Kesertaan ber-KB PUS
Definisi : Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.
Referensi Pemilihan : UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi kesertaan ber-KB PUS
Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah PUS peserta KB?
2. Berapa jumlah PUS bukan peserta KB?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Jenis Alat Kontrasepsi

Alias : -
Konsep : Alat kontrasepsi, MKJP, Non MKJP
Definisi : Pengelompokan alat kontrasepsi yang terdiri dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Metode Non MKJP.
Referensi Pemilihan : UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : 1. MKJP
2. Non-MKJP
Aturan Validasi : Harus mengisi jenis alat kontrasepsi
Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah peserta KB metode MKJP?
2. Berapa jumlah peserta KB metode non-MKJP?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya



❖ Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Alias	: -
Konsep	: Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Definisi	: Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 jo Pasal 28 UUD Republik Indonesia
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ol style="list-style-type: none">1. Tidak/ belum pernah sekolah2. Tidak/ belum tamat SD/ MI3. SD/ SDLB/ MI4. SMP/ SMPLB/ MTs5. SMA/ SMK/ SMLB/ MA6. DI, DII, DIII/ Sarjana Muda7. DIV/ S1 dan S2/S3
Aturan Validasi	: Harus mengisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Kalimat Pertanyaan	: <ol style="list-style-type: none">1. Berapa jumlah penduduk usia 10 ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah?2. Berapa jumlah penduduk usia 10 ke atas yang tidak/ belum tamat SD/MI?3. Berapa jumlah penduduk usia 10 ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD/ SDLB/ MI?4. Berapa jumlah penduduk usia 10 ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP/ SMPLB/ MTs?



5. Berapa jumlah penduduk usia 10 ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA/ SMK/ SMPLB/ MA?
6. Berapa jumlah penduduk usia 10 ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan DI, DII, DIII/ Sarjana Muda?
7. Berapa jumlah penduduk usia 10 ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan DIV/ S1 dan S2/S3?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Penduduk Usia Kerja

Alias : -
 Konsep : Penduduk usia kerja
 Definisi : Penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
 Referensi Pemilihan : UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi penduduk usia kerja
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah penduduk usia kerja?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Status Pekerjaan Utama

Alias : -
 Konsep : Status pekerjaan utama
 Definisi : Jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
 Referensi Pemilihan : UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : 1. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar



		2. Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar
		3. Buruh/ karyawan/ pegawai
		4. Pekerja bebas
		5. Pekerja keluarga/ tak dibayar
Aturan Validasi	:	Harus mengisi status pekerjaan utama
Kalimat Pertanyaan	:	1. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar?
		2. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar?
		3. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang merupakan buruh/ karyawan/ pegawai?
		4. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang merupakan pekerja bebas?
		5. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang merupakan pekerja keluarga/ tak dibayar?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Lapangan Usaha Utama

Alias	:	-
Konsep	:	Lapangan usaha utama
Definisi	:	Bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/ perusahaan/ kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/ kantor tempat responden bekerja.
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Pertanian, perkebunan dan perikanan 2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan



4. Konstruksi
5. Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
6. Angkutan dan pergudangan
7. Penyediaan akomodasi dan makan minum
8. Jasa keuangan dan asuransi
9. Jasa perusahaan
10. Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib
11. Jasa pendidikan
12. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
13. Jasa lainnya
14. Pertambangan, energi dan informasi

- Aturan Validasi : Harus mengisi lapangan usaha utama
- Kalimat Pertanyaan :
1. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada pertanian, perkebunan dan perikanan?
 2. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada pertambangan dan penggalian?
 3. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada industri pengolahan?
 4. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada konstruksi?
 5. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor?
 6. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada angkutan dan pergudangan?
 7. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada penyediaan akomodasi dan makan minum?



8. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada jasa keuangan dan asuransi?
9. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada jasa perusahaan?
10. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib?
11. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada jasa pendidikan?
12. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial?
13. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada jasa lainnya?
14. Berapa jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja pada pertambangan, energi dan informasi?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Jam Kerja

Alias	: -
Konsep	: Jam kerja
Definisi	: Lamanya seorang pekerja bekerja dalam seminggu.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Jam kerja 0 jam 2. Jam kerja 1-14 jam 3. Jam kerja 15-24 jam 4. Jam kerja 25-34 jam



	5. Jam kerja 35-40 jam
	6. Jam kerja 41+ jam
Aturan Validasi	: Harus mengisi jam kerja
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 0 jam selama seminggu?
	2. Berapa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 1-14 jam selama seminggu?
	3. Berapa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 15-24 jam selama seminggu?
	4. Berapa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 25-34 jam selama seminggu?
	5. Berapa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 35-40 jam selama seminggu?
	6. Berapa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 41+ jam selama seminggu?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Anggota DPRD

Alias	: -
Konsep	: DPRD
Definisi	: Mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
Referensi Pemilihan	: UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi anggota DPRD



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah anggota DPRD Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pegawai Negeri Sipil

Alias : -
 Konsep : Pegawai Negeri Sipil
 Definisi : Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 Referensi Pemilihan : UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi pegawai negeri sipil
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah pegawai negeri sipil?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Calon Pegawai Negeri Sipil

Alias : -
 Konsep : Calon Pegawai Negeri Sipil
 Definisi : Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
 Referensi Pemilihan : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara jo UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi calon pegawai negeri sipil
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah calon pegawai negeri sipil?



Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Jenis Kekerasan

Alias	: -
Konsep	: Kekerasan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, trafficking, eksploitasi, kekerasan lainnya
Definisi	: Jenis dari setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Seksual 2. Fisik 3. Psikis 4. Penelantaran 5. Trafficking 6. Eksploitasi 7. Lainnya
Aturan Validasi	: Harus mengisi jenis kekerasan
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah kasus kekerasan seksual yang ditangani Tim Harapan? 2. Berapa jumlah kasus kekerasan fisik yang ditangani Tim Harapan? 3. Berapa jumlah kasus kekerasan psikis yang ditangani Tim Harapan? 4. Berapa jumlah kasus penelantaran yang ditangani Tim Harapan? 5. Berapa jumlah kasus trafficking yang ditangani Tim Harapan?



6. Berapa jumlah kasus eksploitasi yang ditangani Tim Harapan?
7. Berapa jumlah kasus lainnya yang ditangani Tim Harapan?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Karang Taruna

Alias	: -
Konsep	: Karang taruna
Definisi	: Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi karang taruna
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah karang taruna di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Sosial

Alias	: LKs/Orsos
Konsep	: LKs/Orsos
Definisi	: Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan



	Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi LKs/Orsos
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah LKs/Orsos di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Pekerja Sosial Masyarakat**

Alias	: PSM
Konsep	: PSM
Definisi	: Warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PSM
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PSM di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan**

Alias	: TKSK
Konsep	: TKSK



Definisi	: Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta di tingkat kecamatan yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi TKSK
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah TKSK di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Alias	: LK3
Konsep	: LK3
Definisi	: Unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi LK3
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah LK3 di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Dunia Usaha

Alias	: -
Konsep	: Dunia usaha
Definisi	: Lembaga yang memfasilitasi usaha di bidang sosial.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi dunia usaha
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah dunia usaha di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Taruna Siaga Bencana

Alias	: Tagana
Konsep	: Tagana
Definisi	: Organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruan Siaga Bencana
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi tagana
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah tagana di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Family Care Unit

Alias	: FCU
Konsep	: FCU



Definisi	: Pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan. Keberadaan FCU ini dimaksudkan untuk membangun keterpaduan yang sinergis dalam pemberdayaan keluarga berbasis PSKS.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi FCU
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah FCU di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Satuan Bakti Pekerja Sosial

Alias	: Sakti Peksos
Konsep	: Sakti Peksos
Definisi	: Tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial RI dan akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk melakukan tugas pendampingan PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak), pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Anak
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Sakti Peksos
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Sakti Peksos di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ **Pekerja Sosial Profesional/ Fungsional**

Alias	: -
Konsep	: Pekerja sosial profesional/ fungsional
Definisi	: Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pekerja sosial profesional/ fungsional
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pekerja sosial profesional/ fungsional di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat**

Alias	: WKSBM
Konsep	: WKSBM
Definisi	: Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya



	Manusia	Penyelenggara	Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023	
Tipe Data	:	Integer	
Klasifikasi Isian	:	-	
Aturan Validasi	:	Harus mengisi WKSBM	
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah WKSBM di Kabupaten Purbalingga?	
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya	

❖ **Penyuluh Sosial Fungsional**

Alias	:	-	
Konsep	:	Penyuluh sosial fungsional	
Definisi	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023	
Tipe Data	:	Integer	
Klasifikasi Isian	:	-	
Aturan Validasi	:	Harus mengisi penyuluh sosial fungsional	
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah penyuluh sosial fungsional di Kabupaten Purbalingga?	
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya	

❖ **Penyuluh Sosial Masyarakat**

Alias	:	-	
Konsep	:	Penyuluh sosial masyarakat	
Definisi	:	Tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab	



	wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penyuluh sosial masyarakat
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penyuluh sosial masyarakat di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Alias	: PPNS
Konsep	: PPNS
Definisi	: Pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PPNS
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PPNS di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Pelopor Perdamaian

Alias	:	-
Konsep	:	Pelopor perdamaian
Definisi	:	Relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi pelopor perdamaian
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah pelopor perdamaian di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ SDM Program Keluarga Harapan

Alias	:	SDM PKH
Konsep	:	SDM PKH
Definisi	:	Tenaga pelaksana PKH yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi SDM PKH
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah SDM PKH di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya



❖ Populasi PSKS

Alias	: -
Konsep	: PSKS
Definisi	: Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi populasi PSKS
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah populasi PSKS di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ PSKS Peserta Penguatan Kapasitas

Alias	: -
Konsep	: PSKS
Definisi	: PSKS yang mengikuti peningkatan kapasitas bagian Sumber Daya Manusia.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi PSKS peserta penguatan kapasitas
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PSKS peserta penguatan kapasitas Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI CAKUPAN PELAYANAN BIDANG SOSIAL (SPM) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ **Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**

Alias	: -
Konsep	: Penyandang disabilitas
Definisi	: Individu dengan disabilitas yang sebelumnya mungkin berada dalam kondisi terlantar, tetapi kini mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di luar panti.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Alias	: -
Konsep	: Anak terlantar
Definisi	: Anak-anak yang sebelumnya berada dalam kondisi terlantar, tetapi kini mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di luar institusi panti.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Alias	: -
Konsep	: Lanjut usia terlantar
Definisi	: Anak-anak yang sebelumnya berada dalam kondisi terlantar, tetapi kini mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di luar institusi panti.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi anak terlantar yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah anak terlantar yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**

Alias	: -
Konsep	: Gelandangan dan pengemis
Definisi	: Individu-individu yang sebelumnya berada dalam kondisi gelandangan atau mengemis dan kini mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di luar institusi panti.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi gelandangan dan pengemis yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**

Alias	: -
Konsep	: Korban bencana



Definisi	: Individu-individu yang telah mengalami dampak negatif akibat bencana alam atau bencana sosial, tetapi kini mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi korban bencana alam dan sosial yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah korban bencana alam dan sosial yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Populasi Penyandang Disabilitas yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti**

Alias	: -
Konsep	: Penyandang disabilitas
Definisi	: Kelompok individu dengan disabilitas yang memerlukan bantuan dan dukungan rehabilitasi untuk memulihkan atau meningkatkan kemandirian mereka, dan bantuan ini diberikan di luar institusi atau panti khusus.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi populasi penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah populasi penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Populasi Anak Terlantar yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti**

Alias	: -
Konsep	: Anak terlantar
Definisi	: Kelompok anak-anak yang sebelumnya berada dalam kondisi terlantar, dan saat ini memerlukan bantuan dan dukungan rehabilitasi untuk memulihkan atau meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan mereka.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi populasi anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah populasi anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ **Populasi Lanjut Usia Terlantar yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti**

Alias	: -
Konsep	: Lanjut usia terlantar
Definisi	: Kelompok lanjut usia (lansia) yang sebelumnya mungkin berada dalam kondisi terlantar, dan saat ini memerlukan bantuan dan dukungan rehabilitasi untuk memulihkan atau meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi populasi lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah populasi lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Populasi Gelandangan dan Pengemis yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti**

Alias	: -
Konsep	: Gelandangan dan pengemis
Definisi	: Kelompok individu yang sebelumnya berada dalam kondisi gelandangan atau mengemis, dan saat ini membutuhkan bantuan dan dukungan rehabilitasi untuk memulihkan atau meningkatkan kesejahteraan mereka.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan



	Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial yang Membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah**

Alias	: -
Konsep	: Korban bencana alam dan sosial
Definisi	: Kelompok individu yang terkena dampak bencana alam atau sosial, dan memerlukan perlindungan serta jaminan sosial baik selama tanggap darurat maupun dalam periode pemulihan pasca-bencana.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat



dan setelah tanggap darurat bencana daerah

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Keterlibatan Perempuan di Parlemen/ Lembaga Politik

Alias : -

Konsep : Keterlibatan perempuan di parlemen/ lembaga politik

Definisi : Perempuan yang menjadi anggota DPRD II.

Referensi Pemilihan : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi keterlibatan perempuan di parlemen/ lembaga politik

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah keterlibatan perempuan di parlemen/ lembaga politik Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Keterlibatan Perempuan di Lembaga Swasta

Alias : -

Konsep : Keterlibatan perempuan di lembaga swasta

Definisi : Perempuan yang bekerja di perusahaan



Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-undang Dasar RI pasal 28
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi keterlibatan perempuan di lembaga swasta
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah keterlibatan perempuan di lembaga swasta Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Keterlibatan Perempuan di Lembaga Pemerintah

Alias	:	-
Konsep	:	Keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah
Definisi	:	Perempuan yang bekerja sebagai ASN
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Pemberdayaan Perempuan

Alias	:	-
Konsep	:	Pemberdayaan perempuan
Definisi	:	Upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial,



budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jo UU No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi pemberdayaan perempuan
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik**

Alias	:	-
Konsep	:	Pemberdayaan perempuan
Definisi	:	Perempuan yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jo UU No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pemberdayaan perempuan bidang politik
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pemberdayaan perempuan bidang politik di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Perangkat Daerah yang Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender)**

Alias	: -
Konsep	: PUG, GAP, GBS
Definisi	: Perangkat daerah yang sudah menyusun GAP (<i>Gender Analysis Pathway</i>) dan GBS (<i>Gender Budget Statement</i>).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Negara PPA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah jo Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi perangkat daerah yang sudah menerapkan PUG
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah perangkat daerah yang sudah menerapkan PUG di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Perangkat Daerah yang Melaksanakan Analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)**

Alias	: -
Konsep	: ARG



Definisi	: Perangkat daerah yang melakukan analisis terhadap anggaran dengan fokus responsivitas gender.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender jo Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi perangkat daerah yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah perangkat daerah yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa**

Alias	: -
Konsep	: Laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa
Definisi	: Laporan yang diajukan ke PPT Harapan untuk mengadukan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jo UU No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa yang Ditindaklanjuti**

Alias	: -
Konsep	: Laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang ditindaklanjuti
Definisi	: Laporan pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jo UU No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang ditindaklanjuti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang ditindaklanjuti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak

Alias	: -
Konsep	: Laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak
Definisi	: Laporan yang diajukan ke PPT Harapan untuk mengadukan kasus kekerasan terhadap anak
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jo UU No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti

Alias	: -
Konsep	: Laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti
Definisi	: Laporan pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang



	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jo UU No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan

Alias	: -
Konsep	: Laporan pengaduan kasus kekerasan
Definisi	: Laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak yang diajukan ke PPT Harapan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jo UU No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi laporan pengaduan kasus kekerasan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan yang Ditindaklanjuti

Alias	: -
Konsep	: Laporan pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti
Definisi	: Laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak yang telah ditindaklanjuti.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jo UU No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi laporan pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Desa/ Kelurahan Layak Anak

Alias	: -
Konsep	: Desa/ kelurahan layak anak
Definisi	: Kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat



	anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri (Permen) PPA Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan jo Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi desa/ kelurahan layak anak
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah desa/ kelurahan layak anak di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus

Alias	: -
Konsep	: Lembaga penampungan anak berkebutuhan khusus
Definisi	: Lembaga yang menyediakan perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
Referensi Pemilihan	: UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 59
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi lembaga penampungan anak berkebutuhan khusus
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah lembaga penampungan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Alias	: UPPA
Konsep	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
Definisi	: Unit yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Polri
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi UPPA
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah UPPA di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pusat Krisis Terpadu

Alias	: PKT
Konsep	: Pusat Krisis Terpadu (PKT)
Definisi	: Salah satu lembaga pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PKT
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PKT di Kabupaten Purbalingga?



Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Women Crisis Center

Alias : WWC
Konsep : Women Crisis Center (WCC)
Definisi : Lembaga yang memberikan perlindungan, dukungan, dan pelayanan terpadu bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.
Referensi Pemilihan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi WWC
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah WWC di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Rumah Perlindungan Trauma Center

Alias : RPTC
Konsep : Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)
Definisi : Suatu unit yang memberikan pelayanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan yang dilaksanakan secara terpadu dan komperhensif.
Referensi Pemilihan : Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -



Aturan Validasi	: Harus mengisi RPTC
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah RPTC di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Satgas Perlindungan TKI Bermasalah**

Alias	: -
Konsep	: Satgas Perlindungan TKI Bermasalah
Definisi	: Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perUndang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 28 UUD RI 1945
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Satgas Perlindungan TKI bermasalah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Satgas Perlindungan TKI bermasalah di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **UPT Dinas Sosial**

Alias	: -
Konsep	: UPT Dinas Sosial
Definisi	: Unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit



	Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi UPT Dinas Sosial
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah UPT Dinas Sosial di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tenaga Rehabilitasi Sosial

Alias	: -
Konsep	: Tenaga rehabilitasi sosial
Definisi	: Individu yang memiliki kualifikasi dan keahlian khusus dalam bidang rehabilitasi sosial.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi tenaga rehabilitasi sosial
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah tenaga rehabilitasi sosial di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tenaga Psikolog

Alias	: -
Konsep	: Tenaga psikolog
Definisi	: Profesi yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus gangguan mental, termasuk mendiagnosis dan melakukan berbagai macam intervensi sebagai bentuk penanganannya



Referensi Pemilihan : UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi pasal 34
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi tenaga psikolog
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah tenaga psikolog di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**

Alias : -
 Konsep : Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
 Definisi : Lembaga milik pemerintah atau Masyarakat yang melakukan upaya peningkatan Kualitas Keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya



❖ Lembaga Pemenuhan Hak Anak

Alias	: PHA
Konsep	: Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Definisi	: Lembaga yang memberikan penyediaan layanan terkait pemenuhan hak anak
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak jo UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PHA
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PHA di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI

DATA KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2023

❖ Angkatan Kerja

Alias	: -
Konsep	: Angkatan kerja
Definisi	: Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Laki-Laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	: Angkatan kerja wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Penduduk yang Bekerja

Alias	: -
Konsep	: Penduduk yang bekerja
Definisi	: Angkatan kerja yang bekerja (penduduk >15 tahun) bekerja paling sedikit satu jam berturut-turut selama satu minggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Laki-Laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	: Penduduk yang bekerja Wajib Diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa Jumlah Penduduk yang bekerja di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Bukan Angkatan Kerja**

Alias	: -
Konsep	: Bukan angkatan kerja
Definisi	: Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Laki-Laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	: Bukan angkatan kerja wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah bukan angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penduduk Usia Kerja**

Alias	: -
Konsep	: Penduduk usia kerja
Definisi	: Angkatan kerja (Penduduk yang berusia 15-65 tahun).
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



		Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Laki-Laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	:	Penduduk usia kerja wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Pencari Kerja yang Terdaftar

Alias	:	-
Konsep	:	Pencari kerja yang terdaftar
Definisi	:	Angkatan kerja yang terdaftar (membuat AK 1). AK 1 adalah kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu kuning.
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Laki-Laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	:	Pencari kerja yang terdaftar wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Permintaan Tenaga Kerja

Alias	:	-
Konsep	:	Permintaan tenaga kerja



Definisi	: Perusahaan yang membutuhkan dan membuka lowongan pekerjaan untuk angkatan kerja
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Permintaan tenaga kerja wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah permintaan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pencari Kerja yang Ditempatkan

Alias	: -
Konsep	: Pencari kerja yang ditempatkan
Definisi	: Pencari kerja yang sudah diterima dan bekerja.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Pencari kerja yang ditempatkan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Penduduk yang Bekerja

Alias	: -
Konsep	: Penduduk yang bekerja



Definisi	: Angkatan kerja yang bekerja (penduduk >15 tahun) bekerja paling sedikit satu jam berturut-turut selama satu minggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Pertanian 2. Manufaktur 3. Jasa
Aturan Validasi	: Penduduk yang bekerja wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Bekerja Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Buruh tidak Dibayar**

Alias	: -
Konsep	: Bekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
Definisi	: Bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Bekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah bekerja berusaha dibantu buruh tetap/buruh tidak dibayar di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Bekerja Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar**

Alias : -

Konsep : Bekerja berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar

Definisi : Berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Bekerja berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Wajib Diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah bekerja berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Buruh/ Karyawan**

Alias : -

Konsep : Buruh/ karyawan

Definisi : Seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas.



Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Buruh/ karyawan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah buruh/ karyawan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Pekerja Bebas di Pertanian**

Alias	: -
Konsep	: Pekerja bebas di pertanian
Definisi	: Seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Pekerja bebas di pertanian wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pekerja bebas di pertanian di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Pekerja Bebas di Non Pertanian**

Alias	: -
Konsep	: Pekerja bebas di non pertanian
Definisi	: Seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan), di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha nonpertanian meliputi: usaha di lapangan usaha pertambangan, industri, listrik, gas dan air, lapangan usaha konstruksi/ persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Pekerja bebas di non pertanian wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pekerja bebas di non pertanian di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Pekerja Keluarga/ tak Dibayar**

Alias	: -
Konsep	: Pekerja keluarga/ tak dibayar



Definisi	: Seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/ gaji, baik berupa uang maupun barang.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Pekerja keluarga/ tak dibayar wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pekerja keluarga/ tak dibayar di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Bekerja**

Alias	: -
Konsep	: Bekerja
Definisi	: Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 jam (tidak Terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Bekerja wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah bekerja di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penduduk yang Bekerja di Bidang Pertanian**

Alias	: -
Konsep	: Penduduk yang bekerja di bidang pertanian
Definisi	: Penduduk yang bekerja pada komoditas tanaman pangan, perkebunan, buah-buahan dan sayuran, kehutanan, peternakan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Penduduk yang bekerja di bidang pertanian wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penduduk yang Bekerja Di Bidang Manufaktur**

Alias	: -
Konsep	: Penduduk yang bekerja di bidang manufaktur
Definisi	: Penduduk yang bekerja pada sektor industri mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya,



	dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Penduduk yang bekerja di bidang manufaktur wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penduduk yang bekerja di bidang manufaktur di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Penduduk yang Bekerja di Bidang Jasa

Alias	: -
Konsep	: Penduduk yang bekerja di bidang jasa
Definisi	: Penduduk yang bekerja pada sektor setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Penduduk yang bekerja di bidang jasa wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah penduduk yang bekerja di bidang jasa di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Perusahaan**

Alias : -
Konsep : Perusahaan
Definisi : Perusahaan yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Perusahaan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah perusahaan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Kasus yang Diselesaikan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Alias : -
Konsep : Kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Definisi : Perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan melalui mediasi.
Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat Diselesaikan**

Alias	: -
Konsep	: Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan
Definisi	: Perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Kasus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Alias	: -
Konsep	: Kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial



Definisi	: Perselisihan antara pihak pengusaha dengan pekerja / Serikat Pekerja karena adanya perselisihan hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK Perselisihan antara Serikat Pekerja dalam satu perusahaan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kasus yang Diselesaikan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Alias	: -
Konsep	: Kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Definisi	: Perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan melalui mediasi.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan**

Alias	: -
Konsep	: Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan
Definisi	: Perbandingan antara jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan jumlah kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Balai Latihan Kerja**

Alias	: -
Konsep	: Balai Latihan Kerja



Definisi	: Prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan ketrampilan atau yang ingin menalami keahlian dibidangnya masing-masing.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Balai Latihan Kerja wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Program Kerja Balai Latihan Kerja

Alias	: -
Konsep	: Program kerja balai latihan kerja
Definisi	: Serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh BLK untuk mencapai tujuan dan tugasnya dalam menyelenggarakan pelatihan kerja. Pelatihan yang dilaksanakan di BLK meliputi: TIK (office & design grafis), jahit, tata boga, las, perbengkelan dan
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Program kerja balai latihan kerja wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah program kerja balai latihan kerja di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Peserta Pelatihan Balai Latihan Kerja

Alias : -

Konsep : Peserta pelatihan balai latihan kerja

Definisi : Orang yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di BLK.

Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Peserta pelatihan balai latihan kerja wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah peserta pelatihan balai latihan kerja di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENGIRIMAN TRANSMIGRAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Animo

Alias : -

Konsep : Animo

Definisi : KK yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi.

Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Animo wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah animo di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Kuota Pusat Transmigrasi

Alias : -
 Konsep : Kuota pusat transmigrasi
 Definisi : Transmigran yang dianggarkan oleh APBN (Kemenaker).
 Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Kuota pusat transmigrasi wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah kuota pusat transmigrasi di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Calon Transmigran yang Ditempatkan

Alias : -
 Konsep : Calon transmigran yang ditempatkan
 Definisi : Transmigran yang mengikuti program transmigrasi dan ditempatkan di lokasi transmigran.
 Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer



Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Calon transmigran yang ditempatkan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah calon transmigran yang ditempatkan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Produksi Ikan Tangkap

Alias	: -
Konsep	: Produksi ikan tangkap
Definisi	: Semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya yang ditangkap dari sumber perikanan alami dilaut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan c. Permen KKP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Produksi ikan tangkap wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah produksi ikan tangkap?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Produksi Ikan Budidaya

Alias	: -
Konsep	: Produksi ikan budidaya
Definisi	: Semua hasil budidaya ikan/binatang air lainnya yang dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan perusahaan perikanan, maupun rumah tangga perikanan.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan



- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
- c. Permen KKP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Float
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Produksi ikan budidaya wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa produksi ikan budidaya?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Produksi Olahan Ikan**

Alias :
 Konsep : Produksi olahan ikan
 Definisi : Semua hasil olahan yang berasal dari ikan yang bisa dikonsumsi.
 Referensi Pemilihan : a. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
 c. Permen KKP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Float
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Produksi olahan ikan wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa produksi olahan ikan?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Produksi Ikan Hias**

Alias : -
 Konsep : Produksi ikan hias



Definisi	: Semua hasil budidaya ikan hias yang dipanen dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi budidaya ikan hias dihitung dalam bentuk jumlah ekor ikan hias budidaya.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan c. Permen KKP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Produksi ikan hias wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa produksi ikan hias?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Produksi Benih Ikan**

Alias	: -
Konsep	: Produksi benih ikan
Definisi	: Semua hasil benih ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi benih dihitung dalam bentuk ekor benih ikan hasil budidaya.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan



c. Permen KKP Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penetapan Nilai
Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Float
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Produksi Benih Ikan Wajib Diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa Produksi Benih Ikan?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Timbulan Sampah

Alias	: -
Konsep	: Sampah
Definisi	: Sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat perkapita per hari, atau perluas bangunan atau perpanjang jalan.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none">a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampahb. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupc. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggad. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampahe. Perbup Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi timbulan sampah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah timbulan sampah?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Penanganan Sampah

Alias	: -
Konsep	: Sampah



Definisi	: Cara menangani sampah mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah f. Perbup Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga g. Perbup Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber h. Perbup Purbalingga Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penanganan sampah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sampah yang tertangani?



Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pengelolaan Sampah

Alias : -

Konsep : Sampah

Definisi : Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Referensi Pemilihan : a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
f. Perbup Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
g. Perbup Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
h. Perbup Purbalingga Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam

Referensi Waktu : 31 Desember 2023



Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pengelolaan sampah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa cakupan pengelolaan sampah?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Pengurangan Sampah**

Alias	: -
Konsep	: Sampah
Definisi	: Kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah f. Perbup Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



	g. Perbup Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
	h. Perbup Purbalingga Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pengurangan sampah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa cakupan pengurangan sampah?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Sarana Pengangkutan Sampah

Alias	: -
Konsep	: Sampah
Definisi	: Segala bentuk alat atau kendaraan yang digunakan untuk mengumpulkan dan membawa sampah dari sumbernya ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir.
Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



	e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Truk pengangkut sampah (<i>dump truck</i>) 2. Truk container (<i>arm roll</i>) 3. <i>Container</i> 4. Transfer depo 5. Gerobak pengangkut sampah 6. Beco 7. Buldozer
Aturan Validasi	: Harus mengisi sarana pengangkutan sampah
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah truk pengangkut sampah? 2. Berapa jumlah truk <i>container</i> ? 3. Berapa jumlah <i>container</i> ? 4. Berapa jumlah transfer depo? 5. Berapa jumlah gerobak pengangkut sampah? 6. Berapa jumlah beco? 7. Berapa jumlah buldozer?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Bank Sampah

Alias	: -
Konsep	: Sampah
Definisi	: Tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga



dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga

- d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013
tentang Penyelenggaraan Prasarana dan
Sarana Persampahan Dalam
Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga
- e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah
- f. Perbup Purbalingga Nomor 96 Tahun
2019 tentang Kebijakan dan Strategi
Kabupaten Purbalingga Dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga
- g. Perbup Purbalingga Nomor 51 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Sampah
Berbasis Sumber
- h. Perbup Purbalingga Nomor 52 Tahun
2023 tentang Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik dan Styrofoam

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi bank sampah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah bank sampah?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tempat Penampungan Sementara

Alias	: TPS
Konsep	: TPS
Definisi	: Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.



Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah TPS? 2. Berapa kapasitas TPS?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle

Alias	: TPS 3R
Konsep	: TPS 3R
Definisi	: Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi TPS 3R
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah TPS 3R?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Alias : TPST
 Konsep : TPST
 Definisi : Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 Referensi Pemilihan :

- a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana



dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi TPST
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah TPST?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Tempat Pemrosesan Akhir

Alias : TPA
Konsep : TPA
Definisi : Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Referensi Pemilihan : a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



	e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi TPA
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah TPA?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Sampah Rumah Tangga

Alias	: -
Konsep	: Sampah
Definisi	: Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Permen PU RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e. Perda Kab. Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah f. Perbup Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga



	dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	g. Perbup Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
	h. Perbup Purbalingga Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi sampah rumah tangga
Kalimat Pertanyaan	: Berapa volume sampah yang dihasilkan rumah tangga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Perusahaan Industri/Pabrik

Alias	: -
Konsep	: Perusahaan industri/ pabrik
Definisi	: Suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi perusahaan industri/ pabrik
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah perusahaan industri/ pabrik?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Kepemilikan Pengolahan Limbah**

Alias : -
Konsep : Pengolahan limbah
Definisi : Status kepemilikan pengolahan limbah perusahaan industri/pabrik.



Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Permen LHK No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional e. Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Memiliki pengolahan limbah 2. Tidak memiliki pengolahan limbah
Aturan Validasi	: Harus mengisi kepemilikan pengolahan limbah
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah perusahaan industri/pabrik yang memiliki pengolahan limbah? 2. Berapa jumlah perusahaan industri/pabrik yang tidak memiliki pengolahan limbah?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Perusahaan yang Memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)

Alias	: -
Konsep	: Perusahaan, AMDAL, UKL/UPL, SPPL
Definisi	: Perusahaan yang telah melakukan kajian dampak lingkungan dan mengimplementasikan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	: <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undangPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPeraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan



Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. AMDAL 2. UKL/UPL 3. SPPL
Aturan Validasi	: Harus mengisi perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah perusahaan yang memiliki AMDAL? 2. Berapa jumlah perusahaan yang memiliki UKL/UPL? 3. Berapa jumlah perusahaan yang memiliki SPPL?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Perusahaan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Air sesuai Persyaratan Teknis**

Alias	: -
Konsep	: Perusahaan
Definisi	: Perusahaan yang menghasilkan limbah cair yang memiliki izin/persetujuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan pelaporan kegiatan/usaha sesuai dengan ketentuan.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Permen LHK No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Float
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Perusahaan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Persyaratan Khusus**

Alias : -
 Konsep : Perusahaan
 Definisi : Perusahaan yang menghasilkan emisi udara dan melakukan pelaporan kegiatan/usaha sesuai dengan ketentuan.
 Referensi Pemilihan : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Permen LHK No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional

Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ RTH Perkotaan

Alias	: -
Konsep	: RTH
Definisi	: Bagian dari ruang-ruang terbuka (<i>open spaces</i>) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang b. Permen Argaria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau c. Pergub Jawa Tengah nomor 60 tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau d. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi RTH perkotaan
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah RTH perkotaan? 2. Berapa luas RTH perkotaan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ RTH Dikelola DLH

Alias	:	-
Konsep	:	RTH
Definisi	:	RTH yang pengelolaan dan operasionalnya berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Referensi Pemilihan	:	a. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang b. Permen Argaria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau c. Pergub Jawa Tengah nomor 60 tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau d. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Float
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi RTH dikelola DLH
Kalimat Pertanyaan	:	1. Berapa jumlah RTH yang dikelola DLH? 2. Berapa luas RTH yang dikelola DLH?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ RTH Dikelola di Luar DLH (DPUPR, Swasta/ Masyarakat)

Alias	:	-
Konsep	:	RTH
Definisi	:	RTH yang pengelolaan dan operasionalnya berada di tangan DPUPR dan swasta/masyarakat
Referensi Pemilihan	:	Permen Argaria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI nomor 14 tahun 2022 tentang



	Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi RTH dikelola di luar DLH (DPUPR, Swasta/ Masyarakat)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa luas RTH yang dikelola di luar DLH (DPUPR, Swasta/ Masyarakat)?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pemakaman Umum

Alias	: -
Konsep	: Pemakaman umum
Definisi	: Areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
Referensi Pemilihan	: Pergub Jawa Tengah Nomor 60 tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pemakaman umum
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah pemakaman umum? 2. Berapa luas pemakaman umum?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pemakaman Umum Dikelola Pemerintah

Alias	: -
Konsep	: Pemakaman umum
Definisi	: Pemakaman umum yang dioperasikan dan dikelola oleh pemerintah.
Referensi Pemilihan	: Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011



	tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pemakaman umum dikelola pemerintah
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah pemakaman umum yang dikelola pemerintah? 2. Berapa luas pemakaman umum yang dikelola pemerintah?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Pemakaman Umum Dikelola Swasta/ Masyarakat**

Alias	: -
Konsep	: Pemakaman umum
Definisi	: Pemakaman umum yang dioperasikan dan dikelola oleh entitas swasta atau masyarakat, bukan oleh pemerintah atau lembaga publik.
Referensi Pemilihan	: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pemakaman umum dikelola swasta/ masyarakat
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah pemakaman umum yang dikelola swasta/ masyarakat? 2. Berapa luas pemakaman umum yang dikelola swasta/ masyarakat?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



DINAS KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Akta Kelahiran

Alias	:	-
Konsep	:	Akta kelahiran
Definisi	:	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.
Referensi Pemilihan	:	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1) b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Akta kelahiran wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Kepemilikan Akta Kelahiran

Alias	:	-
Konsep	:	Kepemilikan akta kelahiran



Definisi	: Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kepemilikan akta kelahiran wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Akta Kematian

Alias	: -
Konsep	: Akta kematian
Definisi	: Bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 90 ayat (1) b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu



		Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Akta kematian wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah akta kematian di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Akta Perkawinan

Alias	:	-
Konsep	:	Akta perkawinan
Definisi	:	Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam dengan diterbitkan berupa dokumen yang namanya Akta Perkawinan atau biasa disebut juga dengan Akta Nikah
Referensi Pemilihan	:	Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Akta Perkawinan Wajib Diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa Jumlah Akta Perkawinan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Akta Perceraian

Alias	:	-
Konsep	:	Akta perceraian
Definisi	:	Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah pasangan suami dan istri memperoleh



	salinan putusan penetapan perceraian dari pengadilan negeri.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Akta perceraian wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah akta perceraian di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Akta Pengangkatan Anak

Alias	: -
Konsep	: Akta pengangkatan anak
Definisi	: Akta otentik yang berisi catatan lengkap mengenai pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) UU b. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Akta pengangkatan anak wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah akta pengangkatan anak di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Akta Pengesahan Anak

Alias	: -
Konsep	: Akta pengesahan anak
Definisi	: Akta pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat atau setelah pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pencatatan Sipil c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Akta Pengesahan Anak Wajib Diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa Jumlah Akta Pengesahan Anak di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Wajib KTP-el

Alias	: -
Konsep	: Wajib KTP-el
Definisi	: Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.



Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Wajib KTP-el wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah wajib ktp-el di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kepemilikan KTP-el

Alias	: -
Konsep	: Kepemilikan KTP-el
Definisi	: Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pencatatan Sipil c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kepemilikan KTP-el wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kepemilikan KTP-el di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Kartu Keluarga**

Alias	: -
Konsep	: Kartu keluarga
Definisi	: Seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai Kepala Keluarga.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pencatatan Sipil c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan d. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kartu keluarga wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kartu keluarga di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Kepemilikan Kartu Keluarga**

Alias	: -
Konsep	: Kepemilikan kartu keluarga



Definisi	: Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kepemilikan kartu keluarga wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Kartu Identitas Anak (KIA)**

Alias	: -
Konsep	: Kartu Identitas Anak (KIA)
Definisi	: Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri 96/2018 b. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kartu Identitas Anak (KIA) wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Kepemilikan KIA**

Alias : -
Konsep : Kepemilikan KIA
Definisi : Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Referensi Pemilihan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018
c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Kepemilikan KIA wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Kepemilikan KIA di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Penduduk**

Alias : -
Konsep : Penduduk
Definisi : Terhitung penduduk jika memiliki dokumen ADMINDUK (Administrasi Kependudukan) Purbalingga biarpun domisili di luar Purbalingga tetap terhitung penduduk



	Purbalingga, bagi yang sudah berdomisili lama tetapi belum memiliki ADMINDUK Purbalingga tidak terhitung sebagai penduduk Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Penduduk wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Alias	: -
Konsep	: Penduduk menurut jenis kelamin
Definisi	: Pengelompokkan penduduk berdasarkan jenis kelamin.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu



	Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Laki-laki 2. Perempuan
Aturan Validasi	: Penduduk menurut jenis kelamin wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Purbalingga? 2. Berapa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Penduduk Menurut Usia

Alias	: -
Konsep	: Penduduk menurut usia
Definisi	: Pengelompokkan penduduk berdasarkan usia
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Usia 0-14 tahun 2. Usia 5-9 tahun 3. Usia 10-14 tahun 4. Usia 15-19 tahun 5. Usia 20-24 tahun 6. Usia 25-29 tahun



7. Usia 30-34 tahun
8. Usia 35-39 tahun
9. Usia 40-44 tahun
10. Usia 45-49 tahun
11. Usia 50-54 tahun
12. Usia 55-59 tahun
13. Usia 60-64 tahun
14. Usia 65+ tahun

- Aturan Validasi : Penduduk menurut usia wajib diisi
- Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 0-14 tahun?
2. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 5-9 tahun?
3. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 10-14 tahun?
4. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 15-19 tahun?
5. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 20-24 tahun?
6. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 25-29 tahun?
7. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 30-34 tahun?
8. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 35-39 tahun?
9. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 40-44 tahun?
10. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 45-49 tahun?
11. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 50-54 tahun?
12. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 55-59 tahun?
13. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 60-64 tahun?
14. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 65+ tahun?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya



❖ Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
Definisi	:	Pengelompokkan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
Referensi Pemilihan	:	a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Tidak/belum sekolah 2. Tamat SD 3. Belum/tidak tamat SD 4. Tamat SMP 5. Tidak tamat SMP 6. Tamat SMA 7. Tidak tamat SMA 8. Diploma 9. Sarjana S1 10. Sarjana S2 11. Sarjana S3
Aturan Validasi	:	Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	1. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tidak/belum sekolah? 2. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tamat SD? 3. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga belum/ tidak tamat SD?



4. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tamat SMP
5. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tidak tamat SMP?
6. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tamat SMA?
7. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tidak tamat SMA?
8. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga diploma?
9. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sarjana S1?
10. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sarjana S2?
11. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sarjana S3?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Alias	: -
Konsep	: Penduduk berdasarkan status perkawinan
Definisi	: Pengelompokkan penduduk berdasarkan status perkawinan
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Belum kawin



		2. Sudah kawin
		3. Cerai hidup
		4. Cerai mati
Aturan Validasi	:	Penduduk berdasarkan status perkawinan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	1. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalinga yang belum kawin?
		2. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalinga yang sudah kawin?
		3. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalinga yang cerai hidup?
		4. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalinga yang cerai mati?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Penduduk Berdasarkan Agama

Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk berdasarkan agama
Definisi	:	Pengelompokkan penduduk berdasarkan agama
Referensi Pemilihan	:	a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Islam 2. Kristen Katolik 3. Kristen Protestan 4. Budha



	5. Hindu
	6. Kong Hu Cu
Aturan Validasi	: Penduduk berdasarkan agama wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang beragama Islam?
	2. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang beragama Kristen Katolik?
	3. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang beragama Kristen Protestan?
	4. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang beragama Budha?
	5. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang beragama Hindu?
	6. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang beragama Kong Hu Cu?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Migrasi Penduduk

Alias	: -
Konsep	: Migrasi penduduk
Definisi	: Perpindahan penduduk dari suatu wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Dirjen Dukcapil Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pencatatan Pindah Datang Penduduk dan Penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
	b. Peraturan Dirjen Dukcapil Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Dukcapil Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pencatatan Pindah Datang Penduduk



dan Penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

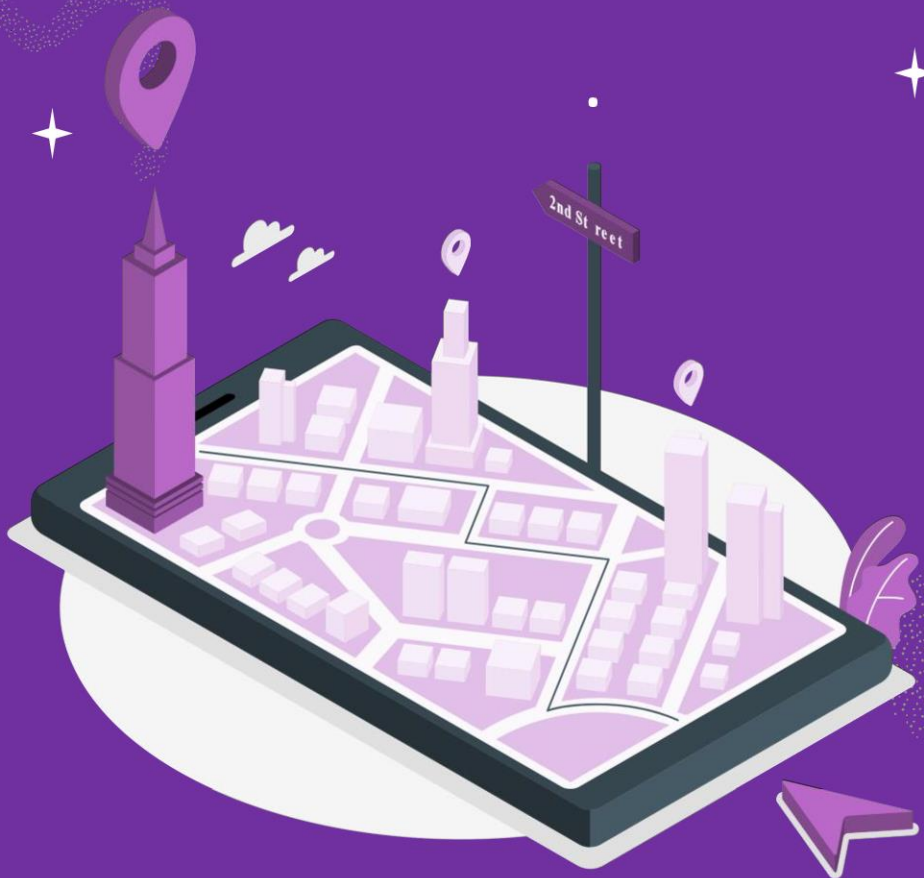
- c. Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	1. Migrasi keluar 2. Migrasi masuk
Aturan Validasi	:	Migrasi penduduk wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	1. Berapa jumlah penduduk migrasi keluar dari Kabupaten Purbalingga? 2. Berapa jumlah penduduk migrasi masuk ke Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Desa

Alias	: -
Konsep	: Desa
Definisi	: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi desa
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah desa Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kelurahan

Alias	: -
Konsep	: Kelurahan
Definisi	: Wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang



	pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan kelurahan Di Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kelurahan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kelurahan Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ RT (Rukun Tetangga)

Alias	: -
Konsep	: RT
Definisi	: Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan kelurahan Di Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi RT
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah RT?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ RW (Rukun Warga)

Alias	: -
Konsep	: RW



Definisi	: Bagian wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan kelurahan Di Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi RW
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah RW?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kantor Pemerintah Desa

Alias	: -
Konsep	: Pemerintah desa
Definisi	: Kantor Kepala Desa/Lurah adalah bangunan aset desa/kelurahan yang diperuntukan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintah desa/kelurahan yang tidak dimiliki oleh pribadi.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan kelurahan Di Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kantor pemerintahan desa
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kantor pemerintahan desa?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Aparat Pemerintah Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Alias	: -
Konsep	: Aparat pemerintah desa
Definisi	: Pengelompokan aparat pemerintah desa berdasarkan tingkat pendidikan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ol style="list-style-type: none">1. Tidak sekolah/belum tamat SD2. Tamat SD atau sederajat3. Tamat SMP dan sederajat4. Tamat SMA dan sederajat5. Lulusan akademi (DI, DII dan DIII)6. Lulusan S17. Lulusan S2
Aturan Validasi	: Harus mengisi aparat desa berdasarkan tingkat pendidikan
Kalimat Pertanyaan	: <ol style="list-style-type: none">1. Berapa jumlah aparat pemerintah desa yang tidak sekolah/ belum tamat SD?2. Berapa jumlah aparat pemerintah desa yang tamat SD atau sederajat?3. Berapa jumlah aparat pemerintah desa yang tamat SMP dan sederajat?4. Berapa jumlah aparat pemerintah desa yang tamat SMA dan sederajat?5. Berapa jumlah aparat pemerintah desa lulusan akademi (DI, DII dan DIII)?6. Berapa jumlah aparat pemerintah desa lulusan S1?7. Berapa jumlah aparat pemerintah desa lulusan S2?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ **Karang Taruna**

Alias	: -
Konsep	: Karang taruna
Definisi	: Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi karang taruna
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah karang taruna?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)**

Alias	: -
Konsep	: TP PKK
Definisi	: Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ? (TP PKK)?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Alias	: -
Konsep	: LPMK
Definisi	: Organisasi/lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ BUMDesa

Alias	: -
Konsep	: BUMDesa
Definisi	: Usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi BUMDesa
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah BUMDesa?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Perkembangan BUMDesa

Alias	: -
Konsep	: BUMDesa
Definisi	: Tingkat perkembangan BUMDesa yang dinilai dari beberapa aspek yaitu: <ul style="list-style-type: none">- aspek usaha (bobot 25%),- dampak BUMDesa kepada masyarakat (bobot 20%),- permodalan (bobot 15%)- SOP/aturan (10%) dan- administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban (bobot 10%)
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. BUMDes Dasar 2. BUMDes Tumbuh 3. BUMDes Berkembang 4. BUMDes Maju
Aturan Validasi	: Harus mengisi perkembangan BUMDesa
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah BUMDes Dasar? 2. Berapa jumlah BUMDes Tumbuh? 3. Berapa jumlah BUMDes Berkembang? 4. Berapa jumlah BUMDes Maju?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DAN STATUS DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Desa Mandiri

Alias	: -
Konsep	: Desa Mandiri
Definisi	: Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga
Aturan Validasi	: Jumlah desa mandiri wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah desa mandiri di wilayah Kabupaten Purbalingga?



Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Desa Maju

Alias : Desa Prasembada
Konsep : Desa Maju
Definisi : Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.
Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga
Aturan Validasi : Jumlah desa maju wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah desa maju di Wilayah Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Desa Berkembang

Alias : -
Konsep : Desa Berkembang
Definisi : Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989.
Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor



	2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga
Aturan Validasi	: Jumlah desa berkembang wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah desa berkembang di wilayah Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Desa Tertinggal

Alias	: -
Konsep	: Desa Tertinggal
Definisi	: Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih atau desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga
Aturan Validasi	: Jumlah desa tertinggal wajib diisi



DINAS KOMUNIKASI ✦ DAN INFORMATIKA

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERSANDIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Alias	: -
Konsep	: OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
Definisi	: Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Referensi Pemilihan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf o Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: OPD (Organisasi Perangkat Daerah) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah OPD di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ OPD yang Memiliki Keamanan Informasi > 80

Alias	: -
Konsep	: OPD yang memiliki keamanan informasi > 80
Definisi	: OPD yang memiliki nilai kemanan informasi > 80% (berdasarkan indeks KAMI). Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan



	penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.
Referensi Pemilihan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf o Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: OPD yang memiliki keamanan informasi > 80 wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah OPD yang memiliki keamanan informasi > 80 di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Aplikasi

Alias	: -
Konsep	: Aplikasi
Definisi	: Menunjukkan evaluasi pengamanan informasi di pemerintah daerah yang mencakup Profil Penyelenggaraan Urusan Persandian, Kebijakan Pengamanan Informasi, Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik, Layanan Keamanan Informasi dan Pola hubungan Komunikasi Sandi.
Referensi Pemilihan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu



	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf o Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Aplikasi wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah aplikasi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya

Alias	: -
Konsep	: Aplikasi yang diassesment keamanan informasinya
Definisi	: Aplikasi yang diassesment keamanan informasinya menunjukkan kesadaran dan komitmen dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang disimpan dan diproses oleh aplikasi tersebut.
Referensi Pemilihan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf o Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Aplikasi yang diassesment keamanan informasinya wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **SDM Pengelola Persandian**

Alias	: -
Konsep	: SDM pengelola persandian
Definisi	: SDM baik Jabatan Fungsional maupun Jabatan Umum yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian.
Referensi Pemilihan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf o Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Char
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: SDM pengelola persandian wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah SDM pengelola persandian di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **SDM Pengelola Persandian yang Ditingkatkan Kapasitasnya**

Alias	: -
Konsep	: SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya



Definisi	: SDM pengelola persandian yang mengikuti pelatihan kompetensi sandiman dari BSSN (Diklat Sandiman Dasar dan Muda).
Referensi Pemilihan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf o Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: char
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Informasi

Alias	: -
Konsep	: Informasi
Definisi	: Surat masuk melewati email sanapati. Email Sanapati merupakan layanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendukung pengamanan informasi.
Referensi Pemilihan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf o Undang-undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Informasi wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah informasi di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi

Alias : -

Konsep : Informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi

Definisi : Informasi yang diistribusikan ke OPD melalui Jaringan Komunikasi Sandi yang merupakan keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi.

Referensi Pemilihan : Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Char

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Data Center

Alias	: -
Konsep	: Perangkat daerah yang terhubung dengan data center
Definisi	: Perangkat daerah yang terhubung dengan sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Perangkat daerah yang terhubung dengan data center wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan data center di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ OPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK

Alias	: -
Konsep	: OPD yang terintegrasi infrastruktur TIK
Definisi	: Perangkat daerah yang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan layanan TI berupa komponen fisik, berbagai perangkat lunak dan komponen jaringan.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional



	c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: OPD yang terintegrasi infrastruktur TIK wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah OPD yang terintegrasi infrastruktur TIK di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Server Milik Kabupaten Purbalingga**

Alias	: -
Konsep	: Server
Definisi	: Suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Server milik Kabupaten Purbalingga wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah server milik Kabupaten Purbalingga ?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Lokasi yang Terhubung Jaringan Fiber Optik Milik Kabupaten Purbalingga

Alias	: -
Konsep	: Lokasi yang terhubung jaringan fiber optik milik Kabupaten Purbalingga
Definisi	: Lokasi yang terhubung teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang (serat) kaca atau plastik.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Lokasi yang terhubung jaringan fiber optik milik Kabupaten Purbalingga wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optik milik Kabupaten Purbalingga ?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Dokumen Pengelolaan TIK

Alias	: -
Konsep	: Dokumen pengelolaan TIK
Definisi	: Dokumen arsip/alur kerja kegiatan yang disimpan pada infrastruktur TIK dimana di dalam teknologi tersebut dapat digunakan berbagai fungsi diantaranya mengolah, menyimpan, menemukan kembali, menyebarkan dan mendayagunakan



informasi yang ada didalam dokumen itu sendiri.

- Referensi Pemilihan : a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Referensi Waktu : 31 Desember 2023
- Tipe Data : Integer
- Klasifikasi Isian : -
- Aturan Validasi : Dokumen pengelolaan TIK wajib diisi
- Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah dokumen pengelolaan TIK di Kabupaten Purbalingga?
- Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Kapasitas Bandwidth yang Tersedia

- Alias : -
- Konsep : Kapasitas *bandwidth* yang tersedia
- Definisi : Besar kapasitas atau lebar pita yang tersedia untuk mentransfer data melalui jaringan komunikasi. *Bandwidth* merupakan ukuran jumlah data yang dapat dikirim melalui suatu jaringan dalam periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam bit per detik (bps) atau kilobit per detik (Kbps), megabit per detik (Mbps), gigabit per detik (Gbps), atau terabit per detik (Tbps).
- Referensi Pemilihan : a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem



Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

- c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kapasitas <i>bandwidth</i> yang tersedia wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kapasitas <i>bandwidth</i> yang tersedia di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Aplikasi Berbagi Pakai yang Dikembangkan/ Dikelola**

Alias	: -
Konsep	: Aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola
Definisi	: Perangkat lunak/ aplikasi yang memiliki layanan berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola oleh Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Ciri aplikasi berbagi pakai adalah ketersediaan API (<i>Application Programming Interface</i>) secara publik.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/ dikelola wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/ dikelola di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ e-Government

Alias	: -
Konsep	: e-Government
Definisi	: Penyelenggaraan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.
Referensi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: e-Government wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah e-Government di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Regulasi Aplikasi yang Terbit

Alias	: -
Konsep	: Regulasi aplikasi yang terbit



Definisi	: Peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang terkait dengan aplikasi yang diterbitkan atau dirilis ke publik. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan, perlindungan pengguna, keamanan data, dan isu lain yang terkait dengan penggunaan aplikasi.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Regulasi aplikasi yang terbit wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah regulasi aplikasi yang terbit di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Informasi Publik Disebarluaskan

Alias	: -
Konsep	: Informasi publik disebarluaskan
Definisi	: Publikasi berita dan <i>flyer</i> tentang program penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara daring maupun luring.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik



- c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah.

Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Informasi publik disebarluaskan wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah informasi publik disebarluaskan di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Rekomendasi Analisis Berita dan Pendapat Umum

Alias : -
 Konsep : Rekomendasi analisis berita dan pendapat umum
 Definisi : Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berdasarkan analisis berita sesuai dengan kesimpulan isu sedang berkembang.
 Referensi Pemilihan : a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
 b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah.
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Rekomendasi analisis berita dan pendapat umum wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya



❖ **Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang Diberdayakan dan Dikoordikasikan**

Alias	: -
Konsep	: Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang diberdayakan dan dikoordikasikan
Definisi	: Pelibatan komunitas masyarakat dalam mendiseminasi/ publikasi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang diberdayakan dan dikoordikasikan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang diberdayakan dan dikoordikasikan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Pelibatan Masyarakat Tradisional Diseminasi Informasi**

Alias	: -
Konsep	: Pelibatan masyarakat tradisional diseminasi informasi
Definisi	: Komunitas masyarakat tradisional yang terlibat dalam diseminasi program pemerintah (FK-Metra/ Forum Komunikasi Media Tradisional) dalam bentuk kesenian tradisional (ketoprak, drama).



Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Pelibatan masyarakat tradisional diseminasi informasi wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pelibatan masyarakat tradisional diseminasi informasi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Sub Domain

Alias	: -
Konsep	: Sub Domain
Definisi	: Pembagian area dari website purbalinggakab.go.id . Contoh subdomain diantaranya: 1. data.purbalinggakab.go.id 2. geoportal.purbalinggakab.go.id
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Sub domain wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah sub domain di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi**

Alias : -
 Konsep : Badan publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan keterbukaan informasi
 Definisi : Badan publik di Perangkat Daerah Kab. Purbalingga yang sudah melaksanakan UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan merupakan turunan dari kegiatan PPID yang ada di Kabupaten Purbalingga.
 Referensi Pemilihan : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
 b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Badan publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan keterbukaan informasi wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah badan publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang



melaksanakan keterbukaan informasi di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Daftar Informasi Publik (DIP)**

Alias : -

Konsep : Daftar Informasi Publik (DIP)

Definisi : Catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan sesuai dengan Perbup No. 90 Tahun 2016 tentang DIP dan SK Sekda tiap tahun.

Referensi Pemilihan : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah.

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Daftar Informasi Publik (DIP) wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Daftar Informasi yang Dikecualikan**

Alias : -

Konsep : Daftar informasi yang dikecualikan

Definisi : Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana



	dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena membutuhkan verifikasi tentang urgensi dan sensitivitas informasi.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Daftar Informasi yang Dikecualikan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Alias	: -
Konsep	: SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Definisi	: Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional c. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Stasiun Radio

Alias	: -
Konsep	: Stasiun radio
Definisi	: Stasiun yang memberikan layanan penyiaran audio (suara) yang disiarkan melalui udara sebagai gelombang radio (dalam bentuk radiasi elektromagnet) dari sebuah antena pemancar ke alat penerima.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Stasiun radio wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah stasiun radio di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Stasiun Televisi

Alias	: -
Konsep	: Stasiun televisi
Definisi	: Suatu stasiun penyiaran yang menyebarkan siarannya dalam bentuk audio dan video secara bersama-sama ke televisi penerima di wilayah tertentu.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada



	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Stasiun televisi wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah stasiun televisi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kantor Pos

Alias	: -
Konsep	: Kantor Pos
Definisi	: Suatu unit pelaksana teknis yang menyediakan Jasa Pos dan giro secara lengkap dan pelayanannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kantor Pos wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Kantor Pos di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ BTS (Base Transceiver Station)

Alias	: -
Konsep	: BTS (<i>Base Transceiver Station</i>)
Definisi	: Infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.



Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa Jumlah BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Provider

Alias	: -
Konsep	: <i>Provider</i>
Definisi	: Pihak penyelenggara jasa telekomunikasi yang membangun jaringan infrastruktur.
Referensi Pemilihan	: Desk Data Prioritas sesuai dengan Daftar Data Prioritas yang telah disepakati pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: <i>Provider</i> wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah <i>provider</i> di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA STATISTIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Data yang Terupload

Alias	: -
Konsep	: Data yang terupload
Definisi	: Data yang terpublikasi pada Portal Open Data Purbalingga
Referensi Pemilihan	: Renstra Dinkominfo 2021-2026
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Data yang terupload wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah data yang terupload di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

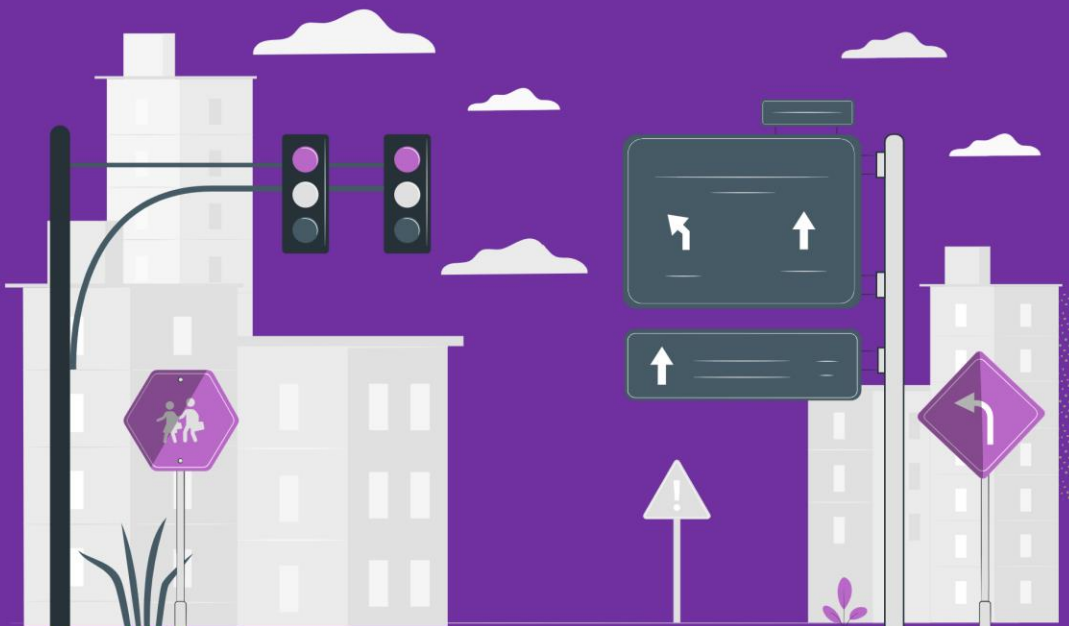
❖ Data yang Seharusnya Terupload

Alias	: -
Konsep	: Data yang seharusnya terupload
Definisi	: Data yang seharusnya terpublikasi pada Portal Open Data Purbalingga
Referensi Pemilihan	: Renstra Dinkominfo 2021-2026
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Data yang seharusnya terupload wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah data yang seharusnya terupload di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



DINAS PERHUBUNGAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



SENSUS KENDARAAN WAJIB UJI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)

Alias	: -
Konsep	: Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Definisi	: Kendaraan bermotor plat R yang wajib melakukan uji kelayakan (angkutan penumpang dan angkutan barang).
Referensi Pemilihan	: a. PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, meliputi semua kendaraan b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lolos Uji KIR

Alias	: -
Konsep	: Kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji KIR
Definisi	: Kendaraan bermotor yang lolos Uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: a. PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, meliputi semua kendaraan b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Kendaraan bermotor wajib uji yang lolos Uji KIR wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji KIR?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Moda Angkutan Umum

Alias	: -
Konsep	: Angkutan umum
Definisi	: Sistem transportasi yang disediakan untuk masyarakat umum, diperasikan secara umum dan diatur oleh pemerintah.
Referensi Pemilihan	: a. PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, meliputi semua kendaraan b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Mikro Bus 2. Angkutan Kota 3. Angkutan Desa 4. Taksi
Aturan Validasi	: Moda angkutan umum wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah moda angkutan umum di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Traffic Light

Alias	: -
Konsep	: <i>Traffic light</i>



Definisi	: Lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (<i>zebra cross</i>), dan tempat arus lalu lintas lainnya.
Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. b. Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. c. Permenhub Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. d. Permenhub Nomor 49 Tahun 2014 Tentang APILL.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: <i>Traffic light</i> wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah <i>traffic light</i> di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Warning Light

Alias	: -
Konsep	: <i>Warning light</i>
Definisi	: Lampu yang dipasang di jalan untuk memberikan peringatan kepada pengendara tentang situasi yang berpotensi berbahaya atau kondisi khusus.
Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. b. Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. c. Permenhub Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. d. Permenhub Nomor 49 Tahun 2014 Tentang APILL.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: <i>Warning light</i> wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah *warning light* di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)

Alias : -
Konsep : Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)
Definisi : Bagian dari rambu petunjuk yang menyediakan informasi kepada pengemudi tentang tujuan dan fasilitas-fasilitas sepanjang jalan. Dengan harapan pengemudi yang belum mengenal arah tujuannya dapat memberi informasi kepada pengemudi dalam memilih jalan. Contoh : SPBU, masjid, dll.
Referensi Pemilihan : a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
b. Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
c. Permenhub Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.
d. Permenhub Nomor 49 Tahun 2014 Tentang APILL.
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Rambu Jalan

Alias : -
Konsep : Rambu jalan
Definisi : Tanda atau marka yang dipasang di sepanjang jalan untuk memberikan informasi, peringatan, atau perintah kepada



pengendara agar dapat berkendara dengan aman dan tertib. Contoh : Jalan naik, jalan turun, jalan berkelok-kelok, dilarang mendahului, dll.

Referensi Pemilihan	:	a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. b. Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. c. Permenhub Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. d. Permenhub Nomor 49 Tahun 2014 Tentang APILL.
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Rambu jalan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah rambu jalan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Guardril

Alias	:	-
Konsep	:	<i>Guardril</i>
Definisi	:	Alat keselamatan jalan yang terbuat dari baja lembaran yang dibentuk (<i>forming</i>) dengan mesin <i>cold-roll</i> sehingga menghasilkan beam baja profil atau disebut W-Beam. Ketebalan baja juga sudah ditentukan untuk menghindari resiko terburuk bagi kendaraan yang menabraknya. Dengan ketebalan tersebut, maka beam akan lentur/ <i>flexible</i> terhadap benturan keras dari kendaraan. Sehingga dapat memberikan keamanan pada kendaraan yang melintas pada jalan di perbukitan/tebing atau jalan yang menanjak dimana kontur tanah di sekitar badan jalan tersebut lebih rendah atau bahkan curam



Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. b. Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. c. Permenhub Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. d. Permenhub Nomor 49 Tahun 2014 Tentang APILL.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: <i>Guandril</i> wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah <i>guandril</i> di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Paku Marka

Alias	: -
Konsep	: Paku marka
Definisi	: Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan dilengkapi dengan pemantul cahaya reflektor berwarna kuning, merah maupun putih. Berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas khususnya pada cuaca gelap maupun malam hari, membatasi daerah kepentingan lalu lintas dan juga bisa sebagai tanda pengingat ketika pengendara melewati batas.
Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. b. Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. c. Permenhub Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. d. Permenhub Nomor 49 Tahun 2014 Tentang APILL.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Paku marka wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah paku marka di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

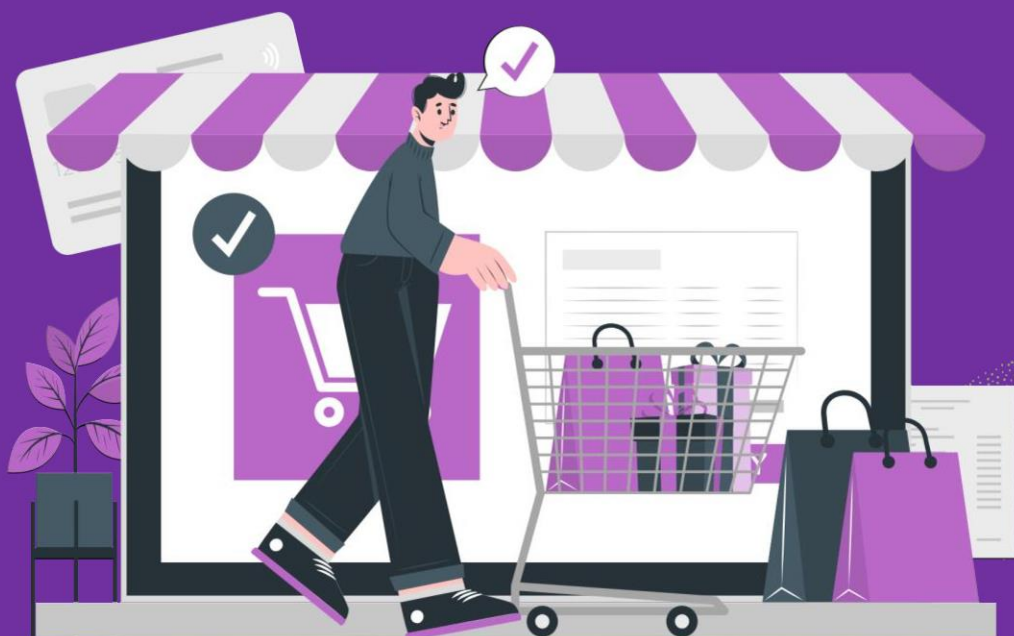
❖ Traffic Cone

Alias	: -
Konsep	: <i>Traffic cone</i>
Definisi	: Biasa disebut sebagai kerucut lalu lintas memiliki ciri yang mudah dikenali yakni berbentuk kerucut dan memiliki warna mencolok perpaduan warna oranye dan putih. Kerucut lalu lintas sendiri pada umumnya terbuat dari karet dan plastik. Biasanya digunakan untuk pengaturan lalu lintas dan memiliki sifat sementara. Biasanya perangkat tersebut dipakai untuk mengatur lalu lintas karena sedang ada perbaikan jalan, kecelakaan di jalan raya ataupun menyebrangkan anak sekolah.
Referensi Pemilihan	: a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. b. Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. c. Permenhub Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. d. Permenhub Nomor 49 Tahun 2014 Tentang APILL.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Mikro Bus 2. Angkutan Kota 3. Angkutan Desa 4. Jumlah Taksi
Aturan Validasi	: <i>Traffic cone</i> wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah <i>traffic cone</i> di Kabupaten Purbalingga?



DINAS KOPERASI DAN UKM

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KOPERASI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Koperasi

Alias	: -
Konsep	: Koperasi
Definisi	: Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <i>Open Loop</i> dan <i>Close Loop</i>
Aturan Validasi	: Koperasi wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah koperasi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Koperasi Aktif

Alias	: -
Konsep	: Koperasi aktif
Definisi	: Koperasi dengan beberapa kriteria seperti masih melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), masih menyetorkan laporan bulanan dan ada aktivitas ekonomi di dalamnya serta masih melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Koperasi aktif wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah koperasi aktif di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Koperasi Sehat

Alias	: -
Konsep	: Koperasi sehat
Definisi	: Koperasi yang secara keuangan dan kelembagaan dinyatakan sehat dari hasil KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi). KKPKK mencakup tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Koperasi sehat wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah koperasi sehat di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas

Alias	: -
Konsep	: Koperasi kategori sangat berkualitas dan berkualitas
Definisi	: Koperasi berdasarkan hasil dari penilaian tim monev memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perkoperasian dan hasil penilaian KKPKK.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Koperasi kategori sangat berkualitas dan berkualitas wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah koperasi kategori sangat berkualitas dan berkualitas di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Koperasi Produksi

Alias	: -
Konsep	: Koperasi produksi
Definisi	: Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Koperasi produksi wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah koperasi produksi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Koperasi Konsumen

Alias	: -
Konsep	: Koperasi konsumen
Definisi	: Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat, dimana anggotanya adalah pengguna akhir dari barang-barang yang disediakan koperasi.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Koperasi konsumen wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah koperasi konsumen di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Koperasi Simpan Pinjam

Alias	: -
Konsep	: Koperasi Simpan Pinjam
Definisi	: Lembaga keuangan bukan bank dengan usaha utamanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Konvensinal dan Syariah
Aturan Validasi	: Koperasi Simpan Pinjam wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Jumlah Koperasi Jasa

Alias	: -
Konsep	: Jumlah Koperasi Jasa
Definisi	: Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Jumlah Koperasi Jasa wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Koperasi Jasa di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Koperasi Pemasaran**

Alias : -
 Konsep : Koperasi Pemasaran
 Definisi : Koperasi yang usaha utamanya pemasaran barang atau jasa anggota.
 Referensi Pemilihan : Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Koperasi Pemasaran wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Koperasi Pemasaran di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ **UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Alias : -
 Konsep : UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
 Definisi : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak Rp 500.000.000.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang



	Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **UMKM Bersertifikat/Berijin**

Alias	: -
Konsep	: UMKM bersertifikat/berijin
Definisi	: Usaha mikro yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), hak merk dan halal.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. NIB 2. Halal 3. Hak Merk
Aturan Validasi	: UMKM bersertifikat/berijin wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah UMKM bersertifikat/berijin di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **UMKM Naik Kelas (Usaha Mikro menjadi Wirausaha)**

Alias	: -
Konsep	: UMKM naik kelas (usaha mikro menjadi wirausaha)



Definisi	: UMKM yang berkembang dari usaha mikro menjadi usaha kecil serta memiliki : NIB dan SKU (Surat Keterangan Usaha), memiliki sertifikat halal, memiliki perijinan dari PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ke halal, sudah mengikuti pelatihan marketing <i>online</i> , lolos kurasi produk.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: UMKM naik kelas (usaha mikro menjadi wirausaha) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah UMKM naik kelas (usaha mikro menjadi wirausaha) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **UMKM yang Difasilitasi Promosi Pemasaran**

Alias	: -
Konsep	: UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran
Definisi	: UMKM yang difasilitasi pemasarannya baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> (Tuka Tuku). Tuka Tuku merupakan <i>platform marketplace</i> yang menjual berbagai produk unggulan dari UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: Pemasaran <i>online</i> dan <i>offline</i>
Aturan Validasi	: UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **UMKM yang Difasilitasi Melalui Internet**

Alias	: -
Konsep	: UMKM yang difasilitasi melalui internet
Definisi	: UMKM yang difasilitasi pemasarannya secara <i>online</i> (Shopee, Bukalapak, Waralaba).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: UMKM yang difasilitasi melalui internet wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah UMKM yang difasilitasi melalui internet di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Paguyuban UMKM Difasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha**

Alias	: -
Konsep	: Paguyuban UMKM difasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha
Definisi	: Jumlah paguyuban UMKM yang didampingi usahanya oleh Dinkop UKM mulai dari branding produk, kemasan, maupun pemasaran.



Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Paguyuban UMKM difasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah paguyuban UMKM difasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Produk UMKM yang Bersertifikat Depkes (Departemen Kesehatan) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia)**

Alias	: -
Konsep	: Produk UMKM yang bersertifikat Depkes (Departemen Kesehatan) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia)
Definisi	: Produk UMKM yang sudah tersertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan halal.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Produk UMKM yang bersertifikat Depkes (Departemen Kesehatan) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah produk UMKM yang bersertifikat Depkes (Departemen Kesehatan) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Penyerapan Tenaga Kerja di UMKM**

Alias : -

Konsep : Penyerapan tenaga kerja di UMKM

Definisi : Tenaga kerja yang dipekerjakan dan dimanfaatkan dalam operasional usaha UMKM.

Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Penyerapan tenaga kerja di UMKM wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah penyerapan tenaga kerja di UMKM di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

Alias : -

Konsep : Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Definisi : Kontribusi sektor-sektor UMKM (di luar sektor pertanian dan jasa) terhadap total PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku).

Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang



Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah kontribusi UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU. SATU PINTU

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA INVESTASI PMA DAN PMDN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Perusahaan Penanaman Modal Asing

Alias	: Perusahaan PMA
Konsep	: PMA
Definisi	: Badan usaha yang modal dan kepemilikannya berasal dari warga negara atau badan hukum negara lain, dan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi perusahaan PMA
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah perusahaan PMA?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Alias	: Perusahaan PMDN
Konsep	: PMDN
Definisi	: Badan usaha yang modal dan kepemilikannya berasal dari warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi perusahaan PMDN
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah perusahaan PMDN?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Investasi PMA

Alias	: -
Konsep	: PMA
Definisi	: Nominal investasi dari PMA.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi investasi PMA
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah nilai investasi PMA?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Investasi PMDN

Alias	: -
Konsep	: PMDN
Definisi	: Nominal investasi dari PMDN.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi investasi PMDN
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah nilai investasi PMDN?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA

Alias	: -
Konsep	: PMA
Definisi	: Setiap orang yang berusia produktif dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa yang terdaftar pada perusahaan PMA.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi tenaga kerja pada perusahaan PMA
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tenaga Kerja pada Perusahaan PMDN

Alias	: -
Konsep	: PMDN
Definisi	: Setiap orang yang berusia produktif dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa yang terdaftar pada perusahaan PMDN.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi tenaga kerja pada perusahaan PMDN
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMDN?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kepeminatan Investasi

Alias	: -
Konsep	: Investasi
Definisi	: Kepeminatan untuk berinvestasi di Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi kepeminatan investasi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kepeminatan investasi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENERBITAN IZIN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Persetujuan Bangunan Gedung

Alias	: PBG
Konsep	: Bangunan gedung
Definisi	: Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung c. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PBG
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PBG yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Izin Reklame

Alias	: -
Konsep	: Reklame
Definisi	: Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan penyelenggaraan reklame.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame b. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi izin reklame
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah izin reklame yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan

Alias	: -
Konsep	: Perusahaan pengangkutan
Definisi	: Izin untuk mendirikan kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi izin mendirikan perusahaan pengangkutan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah izin mendirikan perusahaan pengangkutan yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Izin Pemakaian Tanah Pengairan

Alias	: -
Konsep	: Tanah pengairan
Definisi	: Izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang dan atau badan yang akan menggunakan/ memakai/ memanfaatkan tanah pengairan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Dan Pengairan Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi izin pemakaian tanah pengairan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah izin pemakaian tanah pengairan yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Izin Bidang Kesehatan

Alias	: -
Konsep	: Bidang kesehatan
Definisi	: Izin yang diberikan oleh instansi/ pejabat berwenang kepada orang atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan bidang kesehatan atau kegiatan yang memerlukan pengawasan bidang kesehatan.



Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi izin bidang kesehatan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah izin bidang kesehatan yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Nomor Induk Berusaha

Alias	: NIB
Konsep	: Nomor Induk Berusaha
Definisi	: Bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi NIB
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah NIB yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Serifikat Standar

Alias	: SS
Konsep	: Serifikat Standar
Definisi	: Pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.



Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi sertifikat standar
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah sertifikat standar yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Izin Berusaha

Alias	:	-
Konsep	:	Izin berusaha
Definisi	:	Persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi izin berusaha
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah izin berusaha yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Surat Izin Usaha Perikanan

Alias	:	-
Konsep	:	Usaha perikanan
Definisi	:	Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana



produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Referensi Pemilihan	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi surat izin usaha perikanan
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah surat izin usaha perikanan yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Izin Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner

Alias	:	-
Konsep	:	Pelayanan jasa laboratorium veteriner
Definisi	:	Layanan jasa yang rnernberikan pelayanan kesehatan hewan atau medik reproduksi.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi izin pelayanan jasa laboratorium veteriner
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah izin pelayanan jasa laboratorium veteriner yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya



❖ **Izin Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner
(Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Indonesia)**

Alias	: -
Konsep	: Pelayanan jasa medik veteriner
Definisi	: Layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan untuk warga negara indonesia.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi izin praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Izin praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia) yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Izin Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner
(Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Asing)**

Alias	: -
Konsep	: Pelayanan jasa medik veteriner
Definisi	: Layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan untuk warga negara asing.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi izin praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah izin praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing) yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Izin Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)**

Alias	: -
Konsep	: Pelayanan jasa medik veteriner
Definisi	: Layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi izin praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah izin praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner) yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik**

Alias	: -
Konsep	: Sertifikat cara budi daya ternak yang baik



Definisi	: Pemberian sertifikat terhadap kelompok budi daya ternak melalui serangkaian pemeriksaan dan atau pengujian serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi sertifikat cara budi daya ternak yang baik
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sertifikat cara budi daya ternak yang baik yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik

Alias	: -
Konsep	: Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik
Definisi	: Pemberian sertifikat terhadap kelompok pembibitan ternak melalui serangkaian pemeriksaan dan atau pengujian serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi sertifikat cara pembibitan ternak yang baik
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sertifikat cara pembibitan ternak yang baik yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil

Alias	: PSAT-PDUK
Konsep	: PSAT- PDUK
Definisi	: Bentuk perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil yang mengedarkan PSAT-PDUK dalam kemasan eceran di wilayah Republik Indonesia. Untuk mendapatkan registrasi PSAT-PDUK, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PSAT-PDUK
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PSAT-PDUK yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tanda Daftar Gudang

Alias	: -
Konsep	: Tanda Daftar Gudang
Definisi	: Surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi tanda daftar gudang



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)**

Alias : SKPL-B dan SKPL-C
Konsep : Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)
Definisi : Surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
Referensi Pemilihan : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi SKPL-B dan SKPL-C
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah SKPL-B dan SKPL-C yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri**

Alias : -
Konsep : Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
Definisi : Bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
Referensi Pemilihan : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan

Alias	: -
Konsep	: Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
Definisi	: Legalitas yang diberikan kepada pengguna jalan untuk pendayagunaan bagian-bagian jalan guna melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ **Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota)**

Alias	: -
Konsep	: Izin pengusahaan sumber daya air (wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota)
Definisi	: Izin untuk menggunakan sumber daya air permukaan (wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota) untuk melakukan kegiatan usaha.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi izin pengusahaan sumber daya air (wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah izin pengusahaan sumber daya air (wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota) yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Label Pengawasan/ Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten**

Alias	: -
Konsep	: Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten



Definisi	: Keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga**

Alias	: P-IRT
Konsep	: Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
Definisi	: Jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi P-IRT
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah P-IRT yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah**

Alias	: -
Konsep	: Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah
Definisi	: Bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan olahan pangan siap saji.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah**

Alias	: -
Konsep	: Sertifikat laik sehat - di wilayah
Definisi	: Pemberian sertifikat kepada pemilik tempat usaha yang memenuhi syarat kesehatan di bidang hygiene sanitasi.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada



	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi sertifikat laik sehat - di wilayah
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sertifikat laik sehat - di wilayah yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga**

Alias	: SPP-IRT
Konsep	: Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
Definisi	: Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota/ Bupati (melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau bisa juga melalui Dinas Kesehatan) terhadap produk IRT (Industri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi syarat, dengan tujuan menjamin keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan yang diproduksi di wilayah kerja Walikota/ Bupati.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi SPP-IRT
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah SPP-IRT yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU

Alias	:	-
Konsep	:	Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU
Definisi	:	Izin operasional yang diberikan kepada klinik non-BLU (Badan Layanan Umum).
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Bangunan Memiliki Izin Mendirikan Bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung

Alias	:	IMB / PBG
Konsep	:	IMB/ PBG
Definisi	:	Bangunan yang telah melewati proses perizinan resmi dari pihak berwenang.
Referensi Pemilihan	:	a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung c. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi IMB / PBG
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah IMB / PBG yang diterbitkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Kesesuaian Persyaratan

Alias	: -
Konsep	: Kesesuaian
Definisi	: Kesesuaian persyaratan perizinan dengan jenis layanan yang diajukan di MPP Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai
Aturan Validasi	: Harus mengisi kesesuaian persyaratan
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan perizinan dengan jenis layanan yang diajukan di MPP Kab. Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kemudahan Prosedur

Alias	: -
Konsep	: Kemudahan
Definisi	: Kemudahan prosedur pelayanan perizinan dan pengaduan di MPP Kabupaten Purbalingga
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak mudah 2. Kurang mudah 3. Mudah 4. Sangat mudah
Aturan Validasi	: Harus mengisi kemudahan prosedur
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara terhadap prosedur pelayanan perizinan dan pengaduan di MPP Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Waktu Penyelesaian

Alias	: -
Konsep	: Waktu penyelesaian
Definisi	: Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak cepat 2. Kurang cepat 3. Cepat 4. Sangat cepat
Aturan Validasi	: Harus mengisi waktu penyelesaian
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu pelaksanaan pelayanan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Biaya/Tarif

Alias	: -
Konsep	: Biaya/tarif
Definisi	: Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara



	yang besarnya ditetapkan penyelenggara dan masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Sangat mahal 2. Cukup mahal 3. Murah 4. Gratis
Aturan Validasi	: Harus mengisi biaya/ tarif
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajiban biaya / tarif dalam pelayanan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Kesesuaian Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

Alias	: -
Konsep	: Kesesuaian
Definisi	: Kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai
Aturan Validasi	: Harus mengisi kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Kompetensi Pelaksana

Alias	: -
Konsep	: Kompetensi pelaksana
Definisi	: Kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak kompeten 2. Kurang kompeten 3. Kompeten 4. Sangat kompeten
Aturan Validasi	: Harus mengisi kompetensi pelaksana
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara, tentang kompetensi para petugas pelayanan baik dari aspek pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman di MPP Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kesopanan dan Keramahan Perilaku Pelaksana

Alias	: -
Konsep	: Kesopanan, keramahan
Definisi	: Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak sopan dan ramah 2. Kurang sopan dan ramah 3. Sopan dan ramah 4. Sangat sopan dan ramah
Aturan Validasi	: Harus mengisi kesopanan dan keramahan perilaku pelaksana
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait



kesopanan dan keramahan di MPP Kab.
Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

Alias : -

Konsep : Pengaduan, saran dan masukan

Definisi : Pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut.

Referensi Pemilihan : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : 1. Tidak ada
2. Ada tapi tidak berfungsi
3. Berfungsi kurang maksimal
4. Dikelola dengan baik

Aturan Validasi : Harus mengisi penanganan pengaduan, saran dan masukan

Kalimat Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Kualitas Sarana dan Prasarana**

Alias : -

Konsep : Kualitas

Definisi : Kualitas sarana dan prasarana pelayanan di MPP Kabupaten Purbalingga.

Referensi Pemilihan : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : 1. Buruk
2. Cukup
3. Baik
4. Sangat baik

Aturan Validasi : Harus mengisi kualitas sarana dan prasarana



Kalimat Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya



DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA WISATAWAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Kunjungan Wisatawan Domestik/ Nusantara

Alias	: -
Konsep	: Wisatawan domestik/ nusantara
Definisi	: Perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kunjungan wisatawan domestik/ nusantara
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kunjungan wisatawan domestik/ nusantara?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Alias	: -
Konsep	: Wisatawan mancanegara
Definisi	: Perjalanan yang dilakukan di luar negara tempat tinggalnya, lama perjalanan kurang dari 12 bulan di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanan tidak untuk bekerja atau memperoleh penghasilan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kunjungan wisatawan mancanegara



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Rumah Makan/ Restoran

Alias : -
 Konsep : Rumah makan/ restoran
 Definisi : Usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makan minum.
 Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi rumah makan/ restoran
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah rumah makan/ restoran?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Organisasi Pemuda

Alias : -
 Konsep : Organisasi pemuda
 Definisi : Lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik.
 Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi organisasi pemuda
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah organisasi pemuda?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Bidang Organisasi Pemuda

Alias	: -
Konsep	: Organisasi pemuda
Definisi	: Pengelompokan organisasi pemuda yang mencakup organisasi bidang politik, organisasi bidang ekonomi, organisasi bidang sosial.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Organisasi pemuda bidang politik 2. Organisasi pemuda bidang ekonomi 3. Organisasi pemuda bidang sosial
Aturan Validasi	: Harus mengisi bidang organisasi pemuda
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah organisasi pemuda bidang politik? 2. Berapa jumlah organisasi pemuda bidang ekonomi? 3. Berapa jumlah organisasi pemuda bidang sosial?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Organisasi Pemuda yang Aktif

Alias	: -
Konsep	: Organisasi pemuda
Definisi	: Lembaga organisasi pemuda yang kepengurusannya masih berjalan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi organisasi pemuda yang aktif
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah organisasi pemuda yang aktif?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi

Alias	: -
Konsep	: Organisasi kepemudaan
Definisi	: Organisasi pemuda dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah berupa hibah, bantuan konsumsi kegiatan dan pelatihan - pelatihan keterampilan lainnya.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi organisasi kepemudaan yang difasilitasi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pemuda yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Pemuda Pelopor

Alias	: -
Konsep	: Pemuda
Definisi	: Pemuda yang mempunyai inovasi dan kreatifitas, untuk mengembangkan berbagai hal seperti pemberdayaan ekonomi, masyarakat, pariwisata, kesehatan maupun pendidikan dengan harapan pemuda memiliki ide-ide baru yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.



Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan pemuda pelopor
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan pemuda pelopor?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kemitraan Pemuda dengan Stakeholder

Alias	: -
Konsep	: Kemitraan pemuda dengan stakeholder
Definisi	: Kerjasama antara pihak pemuda dengan pihak individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi kegiatan atau program pembangunan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kemitraan pemuda dengan stakeholder
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kemitraan pemuda dengan stakeholder?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pemuda Berprestasi dalam Berbagai Sektor di Tingkat Nasional dan Provinsi

Alias	: -
Konsep	: Pemuda berprestasi
Definisi	: Pemuda (usia 16 - 30 tahun berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan) yang mendapatkan



	penghargaan berupa piala, piagam, dan medali pada kompetensi tingkat nasional maupun provinsi.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pemuda berprestasi dalam berbagai sektor di tingkat nasional dan provinsi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pemuda berprestasi dalam berbagai sektor di tingkat nasional dan provinsi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Atlet yang Berprestasi di Tingkat Nasional

Alias	: -
Konsep	: Atlet
Definisi	: Atlet yang ikut serta dalam pertandingan nasional pada level tertinggi dan mampu mencapai prestasi tinggi sebagai tim nasional.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi atlet yang berprestasi di tingkat nasional
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Atlet yang Berprestasi di Tingkat Provinsi

Alias	:	-
Konsep	:	Atlet
Definisi	:	Atlet yang ikut serta dalam pertandingan tingkat provinsi pada level tertinggi dan mampu mencapai prestasi tinggi sebagai tim provinsi.
Referensi Pemilihan	:	a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi atlet yang berprestasi di tingkat provinsi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Kompetisi Olahraga

Alias	:	-
Konsep	:	Kompetisi olahraga
Definisi	:	Sistem pertandingan yang dipakai dalam suatu yang dimana pemain akan bertanding satu sama lain untuk memperoleh hadiah, penghargaan atau popularitas pada kegiatan olahraga.
Referensi Pemilihan	:	a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-



Aturan Validasi	: Harus mengisi kompetisi olahraga
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kompetisi olahraga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Partisipasi Atlet dalam Kejuaraan Olahraga**

Alias	: -
Konsep	: Atlet
Definisi	: Partisipasi atlet dalam mengikuti lomba olahraga baik tingkat baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi partisipasi atlet dalam kejuaraan olahraga
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah partisipasi atlet dalam kejuaraan olahraga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Prestasi Olahraga Tingkat Nasional**

Alias	: -
Konsep	: Prestasi olahraga
Definisi	: Hasil optimal yang dicapai oleh seorang atlet atau tim/regu dalam bentuk kemampuan dan keterampilan kompetisi beregu maupun individu di tingkat nasional.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi prestasi olahraga tingkat nasional
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah prestasi olahraga tingkat nasional?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi

Alias	: -
Konsep	: Prestasi olahraga
Definisi	: Hasil optimal yang dicapai oleh seorang atlet atau tim/regu dalam bentuk kemampuan dan keterampilan kompetisi beregu maupun individu di tingkat provinsi.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi prestasi olahraga tingkat provinsi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi

Alias	: -
Konsep	: Prestasi olahraga
Definisi	: Hasil optimal yang dicapai oleh seorang atlet atau tim/regu dalam bentuk kemampuan dan keterampilan kompetisi beregu maupun individu di tingkat nasional dan provinsi.



Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Kelompok Olahraga Difasilitasi**

Alias	: -
Konsep	: Kelompok olahraga
Definisi	: Regu atau kelompok pada kegiatan kompetensi olahraga yang diberikan fasilitas prasarana dan sarana oleh pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan kompetensi olahraga.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kelompok olahraga difasilitasi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kelompok olahraga difasilitasi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Wasit yang Bersertifikat

Alias	: -
Konsep	: Wasit
Definisi	: Orang yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan olahraga sepakbola yang bersertifikat/lisensi C1 (pertandingan tingkat nasional), C2 (pertandingan tingkat daerah) dan C3 (pertandingan tingkat cabang).
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi wasit yang bersertifikat
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah wasit yang bersertifikat?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pelatih yang Bersertifikat

Alias	: -
Konsep	: Pelatih
Definisi	: Pelatih segala cabang olahraga yang telah mendapatkan sertifikasi atau pengakuan resmi atas kualifikasi dan kompetensi mereka dalam bidang pelatihan.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi pelatih yang bersertifikat
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pelatih yang bersertifikat?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Sarana Olahraga

Alias	: -
Konsep	: Sarana olahraga
Definisi	: Sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga.
Referensi Pemilihan	: a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi sarana olahraga
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sarana olahraga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



DINAS KEARSIPAN DAN. PERPUSTAKAAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Perpustakaan

Alias	: -
Konsep	: Perpustakaan, perpustakaan umum, perpustakaan desa/ kelurahan, perpustakaan sekolah/ madrasah, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan khusus, perpustakaan keliling
Definisi	: Pengelompokan perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan umum, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan khusus, perpustakaan keliling.
Referensi Pemilihan	: UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Perpustakaan Umum 2. Perpustakaan Desa/Kelurahan 3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah 4. Perpustakaan Pondok Pesantren 5. Perpustakaan Rumah Ibadah 6. Perpustakaan Khusus 7. Perpustakaan Keliling
Aturan Validasi	: Harus mengisi jenis perpustakaan
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah perpustakaan umum? 2. Berapa jumlah perpustakaan desa/kelurahan? 3. Berapa jumlah perpustakaan sekolah/madrasah? 4. Berapa jumlah perpustakaan pondok pesantren?



5. Berapa jumlah perpustakaan rumah ibadah?
6. Berapa jumlah perpustakaan khusus?
7. Berapa jumlah perpustakaan keliling?
8. Berapa jumlah perpustakaan?
- Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Tenaga Perpustakaan

- Alias : -
- Konsep : Tenaga perpustakaan, pustakawan, tenaga pengelola perpustakaan
- Definisi : Pengelompokan tenaga perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan pengelola perpustakaan.
- Referensi Pemilihan : UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Referensi Waktu : 31 Desember 2023
- Tipe Data : Integer
- Klasifikasi Isian : 1. Tenaga Pustakawan
2. Tenaga Pengelola Perpustakaan
- Aturan Validasi : Harus mengisi jenis tenaga perpustakaan
- Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah tenaga pustakawan?
2. Berapa jumlah tenaga pengelola perpustakaan?
3. Berapa jumlah tenaga perpustakaan?
- Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Koleksi Perpustakaan

- Alias : -
- Konsep : Perpustakaan
- Definisi : Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- Referensi Pemilihan : UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi koleksi perpustakaan
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah koleksi perpustakaan?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Judul Buku Perpustakaan

Alias : -
 Konsep : Perpustakaan
 Definisi : Judul buku perpustakaan di seluruh perpustakaan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
 Referensi Pemilihan : UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : 1. Karya Umum
 2. Filsafat
 3. Agama
 4. Ilmu Sosial
 5. Bahasa
 6. Ilmu Murni
 7. Ilmu Terapan
 8. Seni dan Olahraga
 9. Kesusastaan
 10. Sejarah dan Geografi
 Aturan Validasi : Harus mengisi judul buku perpustakaan
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah judul buku perpustakaan?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Koleksi ebook

Alias : -
 Konsep : *ebook*
 Definisi : Koleksi buku dalam bentuk media elektronik.



Referensi Pemilihan	: UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi koleksi ebook
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah koleksi ebook?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pengunjung Perpustakaan Umum dan Keliling

Alias	: -
Konsep	: Pengunjung perpustakaan, perpustakaan umum, perpustakaan keliling
Definisi	: Masyarakat yang datang berkunjung ke perpustakaan umum/keliling terdiri dari satu maupun banyak orang dengan tujuan mencari informasi yang dibutuhkan. Ini mencakup orang-orang yang datang ke perpustakaan untuk membaca, meminjam buku, melakukan penelitian, menghadiri acara, atau menggunakan sumber daya informasi lainnya yang tersedia.
Referensi Pemilihan	: UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pengunjung perpustakaan umum dan keliling
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah pengunjung perpustakaan umum? 2. Berapa jumlah pengunjung perpustakaan keliling? 3. Berapa jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PEMBINAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Objek Pembinaan Kearsipan

Alias	: -
Konsep	: Objek Pembinaan Kearsipan, Perangkat Daerah, Desa/ Kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, BUMD, Perseorangan
Definisi	: Pengelompokan objek pembinaan kearsipan yang terdiri dari Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, BUMD dan Perseorangan
Referensi Pemilihan	: Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Perangkat Daerah 2. Desa/Kelurahan 3. Organisasi Masyarakat 4. Organisasi Politik 5. BUMD 6. Perseorangan
Aturan Validasi	: Harus mengisi jenis objek pembinaan kearsipan
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah perangkat daerah yang menjadi obiek pembinaan kearsipan? 2. Berapa jumlah desa/kelurahan yang menjadi obiek pembinaan kearsipan? 3. Berapa jumlah organisasi masyarakat yang menjadi obiek pembinaan kearsipan? 4. Berapa jumlah organisasi politik yang menjadi obiek pembinaan kearsipan?



5. Berapa jumlah BUMD yang menjadi obyek pembinaan kearsipan?
6. Berapa jumlah perseorangan yang menjadi obyek pembinaan kearsipan?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Arsip yang Telah Didokumentasikan**

Alias : -

Konsep : Arsip

Definisi : Arsip yang telah dibuatkan daftar arsip pada LKD (Lembaga Kearsipan Daerah).

Referensi Pemilihan : Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi arsip yang telah didokumentasikan

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah arsip yang telah didokumentasikan?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Arsip Dinamis**

Alias : -

Konsep : Arsip

Definisi : Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Referensi Pemilihan : Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi arsip dinamis

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah arsip dinamis?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya



❖ **Arsip Statis**

Alias	: -
Konsep	: Arsip
Definisi	: Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi arsip statis
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah judul arsip statis?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Arsip Foto**

Alias	: -
Konsep	: Arsip
Definisi	: Arsip yang isi informasinya berupa gambar statik (<i>still image</i>), yang penciptaannya menggunakan peralatan khusus.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi arsip foto
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah arsip foto?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ **Arsip Video**

Alias	: -
Konsep	: Arsip
Definisi	: Arsip yang isi informasinya berupa citra bergerak (<i>moving image</i>) yang terekam media magnetik.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi arsip video
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah arsip video?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Arsip Tekstual**

Alias	: -
Konsep	: Arsip
Definisi	: Arsip yang informasinya terekam dalam betuk tulisan / teks dalam lembaran berbasis kertas.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi arsip tekstual
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah arsip tekstual?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Arsip kearsitekturan**

Alias	: -
Konsep	: Arsip
Definisi	: Arsip yang mempresentasikan objek tidak bergerak seperti pembangunan gedung, monumen/tugu, benteng, gerbang, tempat



ibadah, makam, waduk, jembatan, dan sejenisnya yang meliputi tahapan design konsep (proposal design, sketsa, gambar skematis, gambar perspektif, gambar presentasi, model tiga dimensi); tahapan site survei (rencana); tahapan konstruksi (gambar kerja, rancang bangun, rencana kunci, *change order*; dan tahapan pasca konstruksi (*annotated plans*, gambar terukur).

Referensi Pemilihan	: Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi arsip kearsitekturan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah arsip kearsitekturan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Tenaga Arsiparis pada Perangkat Daerah

Alias	: -
Konsep	: Tenaga Arsiparis, Perangkat Daerah
Definisi	: Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi tenaga arsiparis pada perangkat daerah



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah tenaga arsiparis pada perangkat daerah?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Tenaga Arsiparis pada BUMD

Alias : -
 Konsep : Tenaga Arsiparis, BUMD
 Definisi : Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada BUMD.
 Referensi Pemilihan : Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Harus mengisi tenaga arsiparis pada BUMD
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah tenaga arsiparis pada BUMD?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pengembangan Kearsipan berbasis TI/ Alih media Sistem Informasi

Alias : -
 Konsep : Alih media informasi
 Definisi : Kegiatan konversi dari berkas fisik menjadi berkas elektronik dengan tujuan menghemat ruangan arsip dan menjaga arsip yang tersimpan
 Referensi Pemilihan : Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pengembangan kearsipan berbasis TI/ alih media sistem informasi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pengembangan kearsipan berbasis TI/ alihmedia sistem informasi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

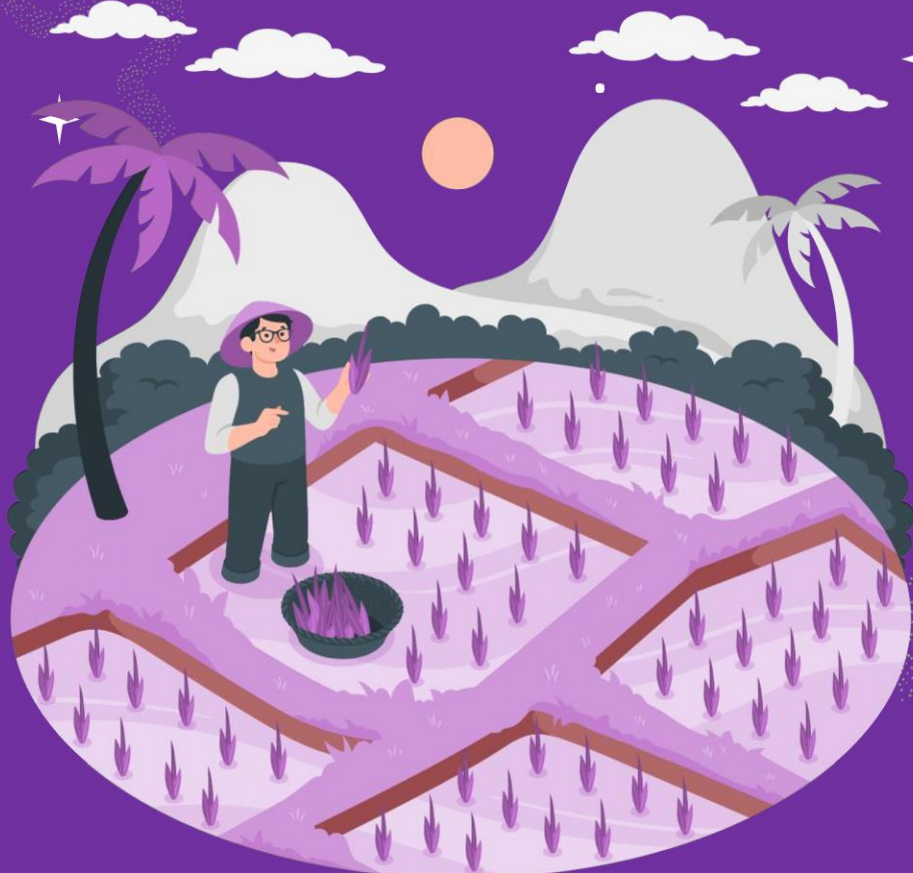
❖ **Pengawasan Arsip Internal**

Alias	: -
Konsep	: Arsip
Definisi	: Penilaian dari Dinarpus Kab. Purbalingga kepada objek pengawasan kearsipan dengan standar aspek yang sudah ditentukan. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi : a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pengawasan arsip internal
Kalimat Pertanyaan	: Berapa nilai pengawasan arsip internal Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



DINAS PERTANIAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERKEBUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Areal Perkebunan

Alias	: -
Konsep	: Areal perkebunan
Definisi	: Perkebunan yang menghasilkan kayu-kayu tanaman perkebunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis atas komoditi yang dihasilkan dari tanaman yang bersangkutan.
Referensi Pemilihan	: Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: 1. Areal tanaman tahunan 2. Areal tanaman semusim
Aturan Validasi	: Areal perkebunan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa luas areal perkebunan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Produksi Hasil Perkebunan

Alias	: -
Konsep	: Produksi hasil perkebunan
Definisi	: Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Purbalingga dalam satuan ton.
Referensi Pemilihan	: Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: 1. Produksi tanaman tahunan 2. Produksi tanaman semusim
Aturan Validasi	: Produksi hasil perkebunan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah produksi hasil perkebunan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Lahan Pertanian

Alias	: -
Konsep	: Lahan pertanian
Definisi	: Lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, termasuk budidaya tanaman dan ternak yang mencakup area yang digunakan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan kegiatan pertanian lainnya. Luas lahan pertanian dapat diukur dalam hektar (ha) atau kilometer persegi (km ²) tergantung pada skala pengukuran yang digunakan.
Referensi Pemilihan	: Pedoman Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan 2015
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: 1. Lahan sawah 2. Lahan kering
Aturan Validasi	: Lahan pertanian wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah lahan pertanian di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Produksi Hasil Tanaman Pangan

Alias	: -
Konsep	: Produksi hasil tanaman pangan
Definisi	: Tanaman pangan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Pedoman Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan 2015
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float



Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Produksi hasil tanaman pangan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah produksi hasil tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Luas Areal Hortikultura

Alias	: -
Konsep	: Luas areal hortikultura
Definisi	: Luas areal hortikultura merujuk pada ukuran total lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian hortikultura. Hortikultura sendiri adalah cabang pertanian yang fokus pada budidaya tanaman hias, buah-buahan, sayuran, bunga, dan tanaman hias lainnya. Luas areal hortikultura mencakup lahan-lahan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman hortikultura.
Referensi Pemilihan	: Pedoman Statistik Pertanian Hortikultura (SPH)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Luas areal hortikultura wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah luas areal hortikultura di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Produksi Hortikultura

Alias	: -
Konsep	: Produksi hortikultura
Definisi	: Produksi hortikultura adalah suatu kegiatan pertanian yang melibatkan budidaya dan pengelolaan tanaman hortikultura dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam hal kualitas, kuantitas, dan nilai ekonomi.



Referensi Pemilihan	: Pedoman Statistik Pertanian Hortikultura (SPH)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Produksi hortikultura wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah produksi hortikultura di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PETERNAKAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Usaha Peternakan

Alias	: -
Konsep	: Usaha peternakan
Definisi	: Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Purbalingga
Referensi Pemilihan	: Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Usaha peternakan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah usaha peternakan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Hewan Ternak

Alias	: -
Konsep	: Hewan ternak
Definisi	: Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Referensi Pemilihan	: Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: 1. Ternak besar 2. Ternak kecil 3. Ternak unggas
Aturan Validasi	: Hewan ternak wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah hewan ternak di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pemotongan Ternak

Alias	: -
Konsep	: Pemotongan ternak
Definisi	: Tindakan atau proses pengambilan hidup ternak untuk diolah menjadi produk daging yang dapat dikonsumsi.
Referensi Pemilihan	: Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Pemotongan ternak wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pemotongan ternak di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pos IB (Inseminasi Buatan)

Alias	: -
Konsep	: Pos IB (Inseminasi Buatan)
Definisi	: Tempat memasukkan semen/mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi buatan dengan tujuan agar ternak betina menjadi bunting.
Referensi Pemilihan	: Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Float
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Pos IB (Inseminasi Buatan) wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah Pos IB (Inseminasi Buatan) di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Akseptor

Alias : -
 Konsep : Akseptor
 Definisi : Ternak yang dikawin suntik untuk pertama kalinya.
 Referensi Pemilihan : Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Float
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Akseptor wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah akseptor di Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Inseminasi

Alias : -
 Konsep : Inseminasi
 Definisi : Metode reproduksi yang digunakan untuk menghasilkan keturunan dengan mengintroduksi sperma dari hewan jantan yang dipilih ke dalam saluran reproduksi hewan betina.
 Referensi Pemilihan : Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Float
 Klasifikasi Isian : -
 Aturan Validasi : Inseminasi wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah inseminasi di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Akseptor Diperiksa (PKB)

Alias : -
Konsep : Akseptor diperiksa (PKB)
Definisi : Akseptor yang dilakukan proses PKB. PKB (Pemeriksaan Kebuntingan) adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk memverifikasi keberhasilan proses inseminasi.
Referensi Pemilihan : Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Float
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Akseptor diperiksa (PKB) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah akseptor diperiksa (PKB) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Akseptor Bunting

Alias : -
Konsep : Akseptor bunting
Definisi : Sapi yang dipastikan bunting setelah PKB.
Referensi Pemilihan : Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan hewan Tahun 2022
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Float
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Akseptor bunting wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah akseptor bunting di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA NERACA PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Ekspor

Alias	: -
Konsep	: Ekspor
Definisi	: Pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Ekspor wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah ekspor di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Impor

Alias	: -
Konsep	: Impor
Definisi	: Pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Impor wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah impor di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Surplus/Defisit Neraca Perdagangan**

Alias : -
Konsep : Surplus/defisit neraca perdagangan
Definisi : Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor dalam suatu periode tertentu.
Referensi Pemilihan : Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Float
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Surplus/defisit neraca perdagangan wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah surplus/defisit neraca perdagangan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA SARANA PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ **Pasar Tradisional (rakyat)**

Alias : -
Konsep : Pasar tradisional (rakyat)
Definisi : Tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat



	berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
Referensi Pemilihan	: Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Pasar tradisional (rakyat) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pasar tradisional (rakyat) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pedagang Kaki Lima (PKL)

Alias	: -
Konsep	: Pedagang Kaki Lima (PKL)
Definisi	: Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
Referensi Pemilihan	: Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ UTP (Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya)

Alias	: -
Konsep	: UTP (Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya)
Definisi	: Alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. sehingga ukuran dapat distandarisasi sesuai dengan barang yang akan diperdagangkan.
Referensi Pemilihan	: Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: UTP (Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah UTP (Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



SATPOL PP

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PELANGGARAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUM) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alias	: Pelanggaran K3/ Trantribum
Konsep	: Pelanggaran K3/ Trantribum
Definisi	: Pelanggaran yang terjadi dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau dalam hal ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum). Pelanggaran K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Pelanggaran Trantibum merujuk pada perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
Referensi Pemilihan	: a. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga b. Perbup Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan Dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pelanggaran K3/ trantribum
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pelanggaran K3/ trantribum?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ **Penjaringan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar**

Alias	:	Penjaringan PGOT
Konsep	:	PGOT
Definisi	:	Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatur dan mengendalikan keberadaan dan perilaku kelompok PGOT di Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	:	a. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga b. Perbup Purbalingga Nomor 300/444 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penertiban Penanganan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi penjaringan PGOT
Kalimat Pertanyaan	:	1. Berapa kali kegiatan penjaringan PGOT? 2. Berapa jumlah PGOT yang terjaring?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ **Penjaringan Pedagang Kaki Lima**

Alias	:	Penjaringan PKL
Konsep	:	PKL
Definisi	:	Kegiatan penertiban dan pembinaan pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya ataupun trotoar.
Referensi Pemilihan	:	Perbup Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan Dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-



Aturan Validasi	: Harus mengisi penjarangan PKL
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa kali kegiatan penjarangan PKL? 2. Berapa jumlah PKL yang terjaring?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penjarangan Razia Anak Sekolah**

Alias	: Penjarangan RAS
Konsep	: RAS
Definisi	: Penjarangan pelajar yang berada diluar sekolah pada saat jam pelajaran sekolah.
Referensi Pemilihan	: Desk Satu Data Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penjarangan RAS
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa kali kegiatan penjarangan RAS? 2. Berapa jumlah RAS yang terjaring?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penjarangan Pekerja Seks Komersial**

Alias	: Penjarangan PSK
Konsep	: PSK
Definisi	: Tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang atau aparat keamanan untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menindak pelaku prostitusi di suatu wilayah. Komunitas PSK yang melanggar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga
Referensi Pemilihan	: Perda Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penjarangan PSK



Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa kali kegiatan penjarangan PSK?
2. Berapa jumlah PSK yang terjaring?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Penjarangan Minuman Keras**

Alias : Penjarangan Miras
Konsep : Miras
Definisi : Kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangkap individu yang terlibat dalam peredaran atau konsumsi minuman keras (miras) ilegal sebagai penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan : Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi penjarangan miras
Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa kali kegiatan penjarangan miras?
2. Berapa jumlah miras yang terjaring?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

Alias : DBHCHT
Konsep : DBHCHT
Definisi : Kegiatan yang menjarang penggunaan rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi, diperoleh, atau diperdagangkan secara ilegal, biasanya melibatkan pelanggaran terhadap Undang-undang atau regulasi terkait.
Referensi Pemilihan : UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
Referensi Waktu : 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi DBHCHT
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kegiatan penjangkaran DBHCHT?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Razia Reklame

Alias	: -
Konsep	: Reklame
Definisi	: Kegiatan penertiban reklame yang terbit tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame. Penertiban reklame melibatkan proses pemantauan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap reklame yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	: Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi razia reklame
Kalimat Pertanyaan	: Berapa kali kegiatan penertiban reklame?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Reklame yang Dilakukan Penertiban

Alias	: -
Konsep	: Reklame
Definisi	: Reklame yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame
Referensi Pemilihan	: Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Reklame Banner 2. Reklame Baliho 3. Reklame Spanduk 4. Reklame habis masa izin 5. Vendor/ pesang iklan
Aturan Validasi	: Harus mengisi reklame yang dilakukan penertiban
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah reklame banner yang dilakukan penertiban? 2. Berapa jumlah reklame baliho yang dilakukan penertiban? 3. Berapa jumlah reklame spanduk yang dilakukan penertiban? 4. Berapa jumlah reklame habis masa izin yang dilakukan penertiban? 5. Berapa jumlah vendor yang dilakukan penertiban? 6. Berapa jumlah reklame yang dilakukan penertiban?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Penjaringan Protokol Kesehatan**

Alias	: -
Konsep	: Protokol kesehatan
Definisi	: Proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di suatu daerah guna memastikan kepatuhan terhadap langkah-langkah pencegahan penyebaran penyakit Covid-19.
Referensi Pemilihan	: Perbup Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi penjarangan protokol kesehatan
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa kali kegiatan penjarangan protokol kesehatan? 2. Berapa jumlah orang yang terjaring penjarangan protokol kesehatan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kasus kriminalitas

Alias	: -
Konsep	: Kasus kriminalitas
Definisi	: Kasus tindak pidana atau pelanggaran hukum yang tercatat, dilaporkan, atau ditangani oleh lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, atau pengadilan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Termuat Dalam Lampiran yaitu terkait Aspek daya Saing daerah dimana dalam point 9
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kasus kriminalitas
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kasus kriminalitas?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Aparat Pamong Praja

Alias	: -
Konsep	: Aparat Pamong Praja
Definisi	: Perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat terdiri atas PNS dan PTO.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8740)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi aparat pamong praja
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah aparat pamong praja di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Aparat Pamong Praja Berdasarkan Status

Alias	: -
Konsep	: Aparat Pamong Praja
Definisi	: Pengelompokan aparat pamong praja berdasarkan status.
Referensi Pemilihan	: Pasal 256 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. PTO (Petugas Teknis Operasional)
Aturan Validasi	: Harus mengisi aparat pamong praja berdasarkan status



Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah aparat pamong praja PNS di Kabupaten Purbalingga?
	2. Berapa jumlah aparat pamong praja PTO di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Aparat Perlindungan Masyarakat**

Alias	: Aparat Linmas
Konsep	: Kasus kriminalitas
Definisi	: Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi aparat linmas
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah aparat linmas di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Anggota Belanegara**

Alias	: -
Konsep	: Anggota Belanegara
Definisi	: Anggota masyarakat yang telah disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik



	Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
Referensi Pemilihan	: Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 " Setiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Dalam Pembelaan Negara"
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi anggota belanegara
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah anggota belanegara di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pos Keamanan

Alias	: -
Konsep	: Pos keamanan
Definisi	: Pos keamanan yang ada di masing-masing kecamatan dan rumah dinas jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda)). Pos keamanan disamping berfungsi untuk penjagaan juga berfungsi bagi para tamu yang akan berkepentingan dinas bisa melaporkan serta meminta informasi tempat lokasi yang akan dituju, disamping itu juga guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan.
Referensi Pemilihan	: Pasal 30 Ayat (1) "Tiap-tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Usaha Pertahanan Dan Keamanan Negara"
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pos keamanan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pos keamanan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Pos Keamanan Lingkungan

Alias	: Pos Kamling
Konsep	: Pos Kamling
Definisi	: Pos yang digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan (RT). Pos kamling yang aktif digunakan masyarakat untuk jaga tangga juga sebagai media menjalin kemitraan dengan masarakat guna memimalisir dampak gangguan ketentrman dan ketertiban umum di masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan ("Perkapolri 23/2007")
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pos kamling
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pos kamling di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kendaraan Operasional Roda 2

Alias	: -
Konsep	: Kendaraan Operasional
Definisi	: Kendaraan roda 2 yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi kendaraan operasional roda 2
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kendaraan operasional roda 2 untuk pelaksanaan kegiatan Satpol PP?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4

Alias	: -
Konsep	: Kendaraan operasional
Definisi	: Kendaraan roda 4 yang meliputi kendaraan operasional pejabat eselon, kendaraan dinas khusus pengawalan, kendaraan operasional lapangan, truk pengangkut hasil kegiatan seperti penertiban reklame dan juga hasil operasi penertiban Cita kondisi Gangguan Trantibumlinmas
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kendaraan operasional roda 4
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kendaraan operasional roda 4 untuk pelaksanaan kegiatan Satpol PP?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PELAYANAN BENCANA KEBAKARAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Kejadian Kebakaran

Alias	: -
Konsep	: Kebakaran
Definisi	: Peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dapat dikehendaki dan menimbulkan kerugian baik kerugian materi atau non materi, serta menghilangkan nyawa
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RISP b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kejadian kebakaran
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kejadian kebakaran?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kejadian Kebakaran yang Terlayani dalam Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time)

Alias	: -
Konsep	: Kebakaran
Definisi	: Kejadian kebakaran yang berhasil mendapatkan respon dari aparat pemadam kebakaran dalam waktu yang ditentukan setelah laporan atau panggilan darurat diterima. Dari posisi start sampai ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan



	pemadaman/pengendalian kebakaran tidak kurang dari 15 menit.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kejadian kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (respon time)
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kejadian kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (respon time)?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 Liter

Alias	: -
Konsep	: Mobil pemadam kebakaran
Definisi	: Kendaraan pemadam kebakaran yang memiliki kapasitas tangki air antara 3.000 hingga 5.000 liter.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pos Melayani Kebakaran

Alias	: PMK
Konsep	: PMK (Pos Melayani Kebakaran)



Definisi	: Fasilitas atau pos yang memiliki peralatan pemadam kebakaran, seperti mobil pemadam kebakaran, tangki air, peralatan pemadam api, alat komunikasi, dan peralatan darurat lainnya. PMK juga biasanya dilengkapi dengan personel yang terlatih dalam penanganan kebakaran dan pertolongan pertama.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RISPK b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi PMK
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah PMK?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Wilayah Melayani Kebakaran

Alias	: WMK
Konsep	: WMK (Wilayah Melayani Kebakaran)
Definisi	: Pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan, WMK juga merupakan batas wilayah layanan sebuah Instansi Pemadam Kebakaran di Kabupaten.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RISPK b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang



Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi WMK
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah WMK?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Aparatur Pemadam Kebakaran

Alias	: -
Konsep	: Aparatur pemadam kebakaran
Definisi	: Anggota atau personel pemadam kebakaran yang ada dalam suatu organisasi, termasuk pemadam kebakaran profesional, sukarelawan, staf administrasi, dan personel pendukung lainnya.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi aparatur pemadam kebakaran
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah aparatur pemadam kebakaran?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Alias	: -
Konsep	: Aparatur pemadam kebakaran
Definisi	: Anggota atau personel pemadam kebakaran yang ada dalam suatu organisasi, termasuk pemadam kebakaran



	profesional, sukarelawan, staf administrasi, dan personel pendukung lainnya.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Penanganan Kebakaran)**

Alias	: -
Konsep	: Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Definisi	: Sejauh mana instansi atau tim pemadam kebakaran dapat merespons dan menangani kejadian kebakaran dengan cepat dan efisien.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RISPK b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Tingkat waktu tanggap (respon time rate) penanganan kebakaran)
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah kejadian kebakaran yang terlayani dalam tingkat tanggap (respon time)? 2. Berapa jumlah kejadian kebakaran?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran

Alias	: -
Konsep	: Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran
Definisi	: Layanan dan upaya yang diselenggarakan untuk merespons dan mengatasi berbagai jenis bencana, baik yang terkait dengan kebakaran maupun bencana non-kebakaran.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran? 2. Berapa jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terlayani?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Anggota Barisan Relawan Kebakaran

Alias	: Anggota Balakar
Konsep	: Anggota Balakar



Definisi	: Anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.
Referensi Pemilihan	: Pasal 3 Ayat (1) huruf d Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi anggota balakar
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah anggota balakar di Kabupaten Purbalingga??
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



SETDA BAGIAN PEMERINTAHAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PROGRAM BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, PEMERINTAHAN DESA SERTA OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Kecamatan yang Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai Standar

Alias	: -
Konsep	: Standar PATEN
Definisi	: Kecamatan yang sudah menerapkan standar PATEN sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai standar
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai standar?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Peraturan Bupati tentang Batas Desa/ Kelurahan yang Ditetapkan

Alias	: -
Konsep	: Peraturan Bupati tentang batas desa/ kelurahan
Definisi	: Peraturan Bupati tentang batas desa/ kelurahan yang sudah ditetapkan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi peraturan bupati tentang batas desa/ kelurahahan yang ditetapkan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah peraturan bupati tentang batas desa/ kelurahahan yang ditetapkan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Memorandum of Understanding

Alias	: MoU
Konsep	: MoU
Definisi	: Dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi MoU
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah MoU?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Perjanjian Kerja Sama

Alias	: PKS
Konsep	: PKS
Definisi	: Dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga



Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Float
Klasifikasi Isian : -
Aturan Validasi : Harus mengisi PKS
Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah PKS?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya



SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI HIBAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Usulan Proposal Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan

Alias	: -
Konsep	: Usulan proposal tempat ibadah dan lembaga keagamaan
Definisi	: Fasilitasi tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi usulan proposal tempat ibadah dan lembaga keagamaan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah usulan proposal tempat ibadah dan lembaga keagamaan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Realisasi Usulan Proposal Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan

Alias	: -
Konsep	: Realisasi usulan proposal tempat ibadah dan lembaga keagamaan
Definisi	: Usulan proposal tempat ibadah dan lembaga keagamaan sesuai dengan kondisi lapangan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas



	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi realisasi usulan proposal tempat ibadah dan lembaga keagamaan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah realisasi usulan proposal tempat ibadah dan lembaga keagamaan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Usulan Proposal Pendidikan Keagamaan (TPQ, MADIN, RA/BA, MA, MTS, POMPES, MI dan Lain-lain)**

Alias	: -
Konsep	: Usulan Proposal Pendidikan Keagamaan (TPQ, MADIN, RA/BA, MA, MTS, POMPES, MI dan lain-lain)
Definisi	: Usulan fasilitasi tempat pendidikan keagamaan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi usulan proposal pendidikan keagamaan (TPQ, MADIN, RA/BA, MA, MTS, POMPES, MI dan lain-lain)



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah usulan proposal pendidikan keagamaan (TPQ, MADIN, RA/BA, MA, MTS, POMPES, MI dan lain-lain)?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Realisasi Usulan Proposal Pendidikan Keagamaan (TPQ, MADIN, RA/BA, MA, MTS, POMPES, MI dan Lain-lain)**

Alias : -

Konsep : Realisasi Usulan Proposal Pendidikan Keagamaan (TPQ, MADIN, RA/BA, MA, MTS, POMPES, MI dan lain-lain)

Definisi : Usulan Proposal Pendidikan Keagamaan (TPQ, MADIN, RA/BA, MA, MTS, POMPES, MI dan lain-lain) sesuai dengan kondisi lapangan

Referensi Pemilihan : Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

Referensi Waktu : 31 Desember 2022

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi realisasi usulan proposal pendidikan keagamaan (TPQ, MADIN, RA/BA, MA, MTS, POMPES, MI dan lain-lain)

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah realisasi usulan proposal pendidikan keagamaan (TPQ, MADIN, RA/BA, MA, MTS, POMPES, MI dan lain-lain)?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI BANTUAN KESEJAHTERAAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Usulan ke Pemerintah Bantuan Insentif Pengajar Keagamaan

Alias	: -
Konsep	: Usulan ke pemerintah bantuan insentif pengajar keagamaan
Definisi	: Permohonan atau pengajuan proposal yang diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan insentif.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pengasuh Pondok Pesantren, Guru Ngaji Pondok Pesantren, Guru Madrasah Diniyah, Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, dan Takmir Masjid yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi usulan ke pemerintah bantuan insentif pengajar keagamaan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah usulan ke pemerintah bantuan insentif pengajar keagamaan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Realisasi Usulan ke Pemerintah Bantuan Insentif Pengajar Keagamaan

Alias	: -
Konsep	: Realisasi usulan ke pemerintah bantuan insentif pengajar keagamaan



Definisi	: Usulan ke pemerintah bantuan intensif pengajar keagamaan sesuai dengan kondisi lapangan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pengasuh Pondok Pesantren, Guru Ngaji Pondok Pesantren, Guru Madrasah Diniyah, Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, dan Takmir Masjid yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi realisasi usulan ke pemerintah bantuan insentif pengajar keagamaan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah realisasi usulan ke pemerintah bantuan insentif pengajar keagamaan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



SETDA BAGIAN ORGANISASI

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI NILAI SAKIP KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Perencanaan Kinerja

Alias	: -
Konsep	: Perencanaan kinerja
Definisi	: Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi perencanaan kinerja
Kalimat Pertanyaan	: Berapa nilai komponen perencanaan kinerja?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pengukuran Kinerja

Alias	: -
Konsep	: Pengukuran kinerja
Definisi	: Pengukuran atas capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) untuk memastikan kemajuan pencapaian target diukur tepat waktu.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Harus mengisi pengukuran kinerja
Kalimat Pertanyaan	: Berapa nilai komponen pengukuran kinerja?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pelaporan Kinerja

Alias	: -
Konsep	: Pelaporan kinerja
Definisi	: Laporan akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan perangkat daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi pelaporan kinerja
Kalimat Pertanyaan	: Berapa nilai komponen pelaporan kinerja?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Evaluasi Internal

Alias	: -
Konsep	: Evaluasi internal
Definisi	: Perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa mendatang.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi evaluasi internal
Kalimat Pertanyaan	: Berapa nilai komponen evaluasi internal?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)**

Alias	: -
Konsep	: SAKIP
Definisi	: Integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi SAKIP
Kalimat Pertanyaan	: Berapa nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ **Kesesuaian Persyaratan**

Alias	: -
Konsep	: Kesesuaian
Definisi	: Kesesuaian persyaratan perizinan dengan jenis layanan yang diajukan di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga



Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai
Aturan Validasi	: Harus mengisi kesesuaian persyaratan
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kemudahan Prosedur

Alias	: -
Konsep	: Kemudahan
Definisi	: Kemudahan prosedur pelayanan perizinan dan pengaduan di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak mudah 2. Kurang mudah 3. Mudah 4. Sangat mudah
Aturan Validasi	: Harus mengisi kemudahan prosedur
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Waktu Penyelesaian

Alias	: -
Konsep	: Waktu penyelesaian



Definisi	: Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak cepat 2. Kurang cepat 3. Cepat 4. Sangat cepat
Aturan Validasi	: Harus mengisi waktu penyelesaian
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Biaya/Tarif**

Alias	: -
Konsep	: Biaya/tarif
Definisi	: Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan penyelenggara dan masyarakat.
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Sangat mahal 2. Cukup mahal 3. Murah 4. Gratis
Aturan Validasi	: Harus mengisi biaya/ tarif
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Kesesuaian Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Alias	: -
Konsep	: Kesesuaian
Definisi	: Kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai
Aturan Validasi	: Harus mengisi kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan
Kalimat Pertanyaan	: Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Kompetensi Pelaksana

Alias	: -
Konsep	: Kompetensi pelaksana
Definisi	: Kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
Referensi Pemilihan	: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Tidak kompeten 2. Kurang kompeten 3. Kompeten 4. Sangat kompeten
Aturan Validasi	: Harus mengisi kompetensi pelaksana



Kalimat Pertanyaan : Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Kesopanan dan Keramahan Perilaku Pelaksana

Alias : -
Konsep : Kesopanan, keramahan
Definisi : Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.
Referensi Pemilihan : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : 1. Tidak sopan dan ramah
2. Kurang sopan dan ramah
3. Sopan dan ramah
4. Sangat sopan dan ramah
Aturan Validasi : Harus mengisi kesopanan dan keramahan perilaku pelaksana
Kalimat Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Alias : -
Konsep : Pengaduan, saran dan masukan
Definisi : Pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut.
Referensi Pemilihan : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : 1. Tidak ada
2. Ada tetapi tidak berfungsi
3. Berfungsi kurang maksimal
4. Dikelola dengan baik



Aturan Validasi : Harus mengisi penanganan pengaduan, saran dan masukan

Kalimat Pertanyaan : Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Kualitas Sarana dan Prasarana**

Alias : -

Konsep : Kualitas

Definisi : Kualitas sarana dan prasarana pelayanan di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga.

Referensi Pemilihan : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : 1. Buruk
2. Cukup
3. Baik
4. Sangat baik

Aturan Validasi : Harus mengisi kualitas sarana dan prasarana

Kalimat Pertanyaan : Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya



SETDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Kegiatan Pembangunan yang Selesai Tepat Waktu

Alias	:	-
Konsep	:	Kegiatan pembangunan yang selesai tepat waktu
Definisi	:	Kegiatan pembangunan yang selesai tepat waktu di Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	:	Dokumen Renstra 2018-2026
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi jumlah kegiatan pembangunan yang selesai tepat waktu
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah jumlah kegiatan pembangunan yang direncanakan diselesaikan yang selesai tepat waktu?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Kegiatan Pembangunan

Alias	:	-
Konsep	:	Kegiatan pembangunan
Definisi	:	Kegiatan pembangunan di Kabupaten Purbalingga
Referensi Pemilihan	:	Dokumen Renstra 2018-2026
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi jumlah kegiatan pembangunan
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah jumlah kegiatan pembangunan yang direncanakan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya



SETDA BAGIAN PENGADAAN ✦ BARANG DAN JASA

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Paket Tender pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Alias	: -
Konsep	: Paket tender pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Definisi	: Permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia yang diajukan ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. b. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik d. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi paket tender pada LPSE
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah paket tender pada LPSE?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Efisiensi Tender pada SPSE

Alias	: -
Konsep	: Efisiensi tender pada SPSE
Definisi	: Selisih Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada paket yang memiliki pemenang (terlelang) dengan Harga Penawaran Terkoreksi (HPT) atau Harga Negosiasi (HN).



Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. b. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik d. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi efisiensi tender pada SPSE
Kalimat Pertanyaan	: Berapa nilai efisiensi tender pada SPSE?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Jumlah Sengketa/Aduan terkait Pengadaan Barang/Jasa

Alias	: -
Konsep	: Sengketa/ aduan terkait pengadaan barang/ jasa
Definisi	: Sengketa/aduan yang muncul dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa terkait proses pemilihan penyedia barang/jasa.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. b. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik



	d. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2024
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi sengketa/ aduan terkait pengadaan barang/ jasa
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah sengketa/ aduan terkait pengadaan barang/ jasa?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Keberhasilan Lelang Pekerjaan

Alias	: -
Konsep	: Keberhasilan lelang pekerjaan
Definisi	: Perbandingan jumlah pemilihan penyedia yang memiliki pemenang (terlelang) terhadap jumlah total pelaksanaan pemilihan penyedia.
Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. b. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik d. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Float
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi keberhasilan lelang pekerjaan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa tingkat keberhasilan lelang pekerjaan?



Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Efisiensi Pelaksanaan E-procurement

Alias : -

Konsep : Efisiensi pelaksanaan e-procurement

Definisi : Perbandingan Selisih Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan Harga Penawaran Terkoreksi (HPT) atau Harga Negosiasi (HN) terhadap jumlah Total HPS pada paket yang memiliki pemenang (terlelang)

Referensi Pemilihan : a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
b. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
d. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga

Referensi Waktu : 31 Desember 2024

Tipe Data : Float

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi efisiensi pelaksanaan E-procurement

Kalimat Pertanyaan : Berapa tingkat efisiensi pelaksanaan E-procurement?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Jumlah Pemilihan Penyedia yang Memiliki Pemenang (Terlelang)

Alias : -

Konsep : Jumlah pemilihan penyedia yang memiliki pemenang (terlelang)

Definisi : Jumlah proses pengadaan barang atau jasa di mana telah berhasil menetapkan



pemenang lelang. Pemenang merujuk pada penyedia barang atau jasa yang berhasil memenangkan tender atau proses seleksi, dan selanjutnya akan ditunjuk untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh lembaga atau instansi yang mengadakan pengadaan.

Referensi Pemilihan	:	a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. b. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik d. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi jumlah pemilihan penyedia yang memiliki pemenang (terlelang)
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah pemilihan penyedia yang memiliki pemenang (terlelang)?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Jumlah Total Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Alias	:	-
Konsep	:	Jumlah total pelaksanaan pemilihan penyedia
Definisi	:	Jumlah total keseluruhan dari semua kegiatan pengadaan yang telah dilakukan, termasuk pemilihan penyedia yang berhasil (pemenang) dan juga termasuk yang tidak berhasil (tidak ada pemenang).



Referensi Pemilihan	: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. b. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik d. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi jumlah total pelaksanaan pemilihan penyedia
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah total pelaksanaan pemilihan penyedia?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



SETDA BAGIAN HUKUM.

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PRODUK HUKUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Dokumen Fasilitas Produk Hukum

Alias	: -
Konsep	: Produk hukum
Definisi	: Fasilitas produk hukum yang dilaksanakan oleh biro hukum dan OPD terkait produk hukum di Kabupaten.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi dokumen fasilitas produk hukum
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah dokumen fasilitas produk hukum?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Laporan Fasilitas Penyusunan Raperda

Alias	: -
Konsep	: Raperda
Definisi	: Laporan yang dihasilkan dalam proses fasilitas penyusunan Raperda.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	:	Harus mengisi laporan fasilitasi penyusunan raperda
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah laporan fasilitasi penyusunan raperda?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Peraturan Daerah

Alias	:	-
Konsep	:	Peraturan
Definisi	:	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	:	31 Desember 2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi peraturan daerah
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah peraturan daerah?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Peraturan Daerah Baru

Alias	:	-
Konsep	:	Peraturan daerah
Definisi	:	Peraturan perundang-undangan yang baru disahkan dan sebelumnya tidak ada peraturan perundang-undangan tersebut.
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	:	31 Desember 2022



Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi peraturan daerah baru
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah peraturan daerah baru?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Peraturan Daerah Perubahan

Alias	: -
Konsep	: Peraturan daerah
Definisi	: Perubahan terhadap peraturan yang dapat berupa penambahan, penyisipan, penghapusan atau penggantian sebagian materi Peraturan Daerah.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi peraturan daerah perubahan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah peraturan daerah perubahan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Peraturan Daerah Pencabutan

Alias	: -
Konsep	: Peraturan daerah
Definisi	: Peraturan daerah yang diganti dengan peraturan yang baru, maka peraturan yang lama harus dicabut dengan tegas.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



Referensi Waktu	:	31 Desember 2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi peraturan daerah pencabutan
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah peraturan daerah pencabutan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Keputusan Bupati

Alias	:	-
Konsep	:	Keputusan bupati
Definisi	:	Penetapan bupati yang bersifat konkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	:	31 Desember 2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi keputusan bupati
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah keputusan bupati?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Keputusan Bupati Baru

Alias	:	-
Konsep	:	Keputusan bupati
Definisi	:	Keputusan bupati yang disahkan baru dan sebelumnya tidak ada keputusan bupati yang sama.
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



	Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi keputusan bupati baru
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah keputusan bupati baru?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Keputusan Bupati Perubahan

Alias	: -
Konsep	: Keputusan bupati
Definisi	: Perubahan keputusan bupati dapat berupa penambahan, penyisipan, penghapusan atau penggantian sebagian materi keputusan bupati.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi keputusan bupati perubahan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah keputusan bupati perubahan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Keputusan Bupati Pencabutan

Alias	: -
Konsep	: Keputusan bupati
Definisi	: Keputusan bupati yang diganti dengan keputusan bupati yang baru, keputusan bupati yang lama harus dicabut dengan tegas.



Referensi Pemilihan : Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Referensi Waktu : 31 Desember 2022

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi keputusan bupati pencabutan

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah keputusan bupati pencabutan?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Evaluasi Raperda

Alias : -

Konsep : Evaluasi Raperda

Definisi : Pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang leb

Referensi Pemilihan : Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Referensi Waktu : 31 Desember 2022

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Harus mengisi evaluasi raperda

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah evaluasi raperda?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya



❖ Produk Hukum Daerah yang Didokumentasikan

Alias	: -
Konsep	: Produk Hukum
Definisi	: Jumlah produk hukum (Perda, Perbup, Keputusan Bupati) yang didokumentasikan melalui pemindaian dan penggandaan
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi produk hukum daerah yang didokumentasikan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Produk Hukum Daerah yang Diinformasikan

Alias	: -
Konsep	: Produk Hukum
Definisi	: Jumlah produk hukum (Perda, Perbup, Keputusan Bupati) yang diinformasikan melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perUndang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015



	tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi produk hukum daerah yang diinformasikan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Jenis Produk Hukum

Alias	: -
Konsep	: Produk hukum, perda, perbup, keputusan bupati
Definisi	: Jenis produk hukum yang terdiri dari Perda, Perbup dan Keputusan Bupati.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Peraturan daerah 2. Peraturan bupati 3. Keputusan bupati
Aturan Validasi	: Harus mengisi jenis produk hukum
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah peraturan daerah? 2. Berapa jumlah peraturan bupati? 3. Berapa jumlah keputusan bupati?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Nomor Register Perda

Alias	: -
Konsep	: Perda



Definisi	: Urutan atau nomor registrasi dari Peraturan Daerah (Perda) yang telah diterbitkan oleh sebuah lembaga pemerintahan daerah.
Referensi Pemilihan	: Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi nomor register perda
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah nomor register perda?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YANG BEKERJASAMA DENGAN KABUPATEN TAHUN 2023

❖ Lembaga Bantuan Hukum Aktif

Alias	: LBH Aktif
Konsep	: LBH
Definisi	: Lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan Kabupaten Purbalingga dalam pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi LBH aktif
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah LBH aktif yang bekerja sama dengan Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Lembaga Bantuan Hukum Baru

Alias	: LBH Baru
Konsep	: LBH
Definisi	: LBH yang baru saja didirikan atau dibentuk dalam waktu satu tahun terakhir.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi LBH baru
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah LBH baru yang bekerja sama dengan Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Lembaga Bantuan Hukum Lama

Alias	: LBH Lama
Konsep	: LBH
Definisi	: LBH yang telah beroperasi dan berdiri dalam waktu yang relatif lama, dibandingkan dengan LBH yang baru didirikan.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Referensi Waktu	: 31 Desember 2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi LBH lama
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah LBH lama yang bekerja sama dengan Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



SETDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SD'A

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA BUMD (BADAN USAHA MILIK DAERAH) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ BUMD Keuangan

Alias	: -
Konsep	: BUMD
Definisi	: BUMD yang usaha utamanya bergerak di sektor keuangan dan atau perbankan.
Referensi Pemilihan	: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi BUMD keuangan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah BUMD keuangan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ BUMD Non Keuangan

Alias	: -
Konsep	: BUMD
Definisi	: BUMD yang usaha utamanya bergerak di sektor selain keuangan
Referensi Pemilihan	: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Harus mengisi BUMD non keuangan
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah BUMD non keuangan di Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ **Capaian Target Laba Perusda**

Alias	:	-
Konsep	:	Capaian target laba Perusda
Definisi	:	Laba atau keuntungan yang diperoleh oleh BUMD setiap tahun.
Referensi Pemilihan	:	Rencana Strategis Sekretariat Daerah Purbalingga Tahun 2021-2026
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi capaian target laba Perusda
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa capaian target laba Perusda?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ **Capaian Target Deviden Perusda**

Alias	:	-
Konsep	:	Capaian target deviden Perusda
Definisi	:	Deviden atau bagian laba yang disetor oleh BUMD kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga setiap tahun.
Referensi Pemilihan	:	Rencana Strategis Sekretariat Daerah Purbalingga Tahun 2021-2026
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus mengisi capaian target deviden Perusda
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa capaian target deviden Perusda?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya



RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



**KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI
KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP
RSUD DR. R. GOETENG TAROENADIBRATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023**

❖ **Pasien Rawat Jalan**

Alias	: -
Konsep	: Pasien rawat jalan
Definisi	: Pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pasien rawat jalan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ **Pasien Rawat Inap**

Alias	: -
Konsep	: Pasien rawat inap
Definisi	: Pasien yang masuk ke rumah sakit dengan menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan penunjang medik lainnya.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi : Wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah pasien rawat inap di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
 Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pasien Rawat Jalan per Debitur

Alias : -
 Konsep : Pasien rawat jalan per debitur
 Definisi : Pengelompokkan kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan debitur yaitu umum, JKN PBI, JKN Non PBI, Jamkesda, KPS, SKTM, Jampersal.
 Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 Referensi Waktu : 31 Desember 2023
 Tipe Data : Integer
 Klasifikasi Isian : 1. Umum
 2. JKN PBI
 3. JKN Non PBI
 4. Jamkesda
 5. KPS
 6. SKTM
 7. Jampersal
 Aturan Validasi : Wajib diisi
 Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah pasien rawat jalan umum di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
 2. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna JKN PBI di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
 3. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna JKN Non PBI di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?



4. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna Jamkesda di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
5. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna KPS di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
6. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna SKTM di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
7. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna Jampersal di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pasien Rawat Inap per Debitur

Alias : -

Konsep : Pasien rawat inap per debitur

Definisi : Pengelompokkan kunjungan pasien rawat inap berdasarkan debitur yaitu umum, JKN PBI, JKN Non PBI, Jamkesda, KPS, SKTM, Jampersal.

Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : 1. Umum
2. JKN PBI
3. JKN Non PBI
4. Jamkesda
5. KPS
6. SKTM
7. Jampersal

Aturan Validasi : Wajib diisi



- Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah pasien rawat inap umum di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
2. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna JKN PBI di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
3. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna JKN Non PBI di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
4. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna Jamkesda di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
5. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna KPS di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
6. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna SKTM di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
7. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna Jampersal di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pasien Rawat Jalan per Poli

- Alias : -
- Konsep : Pasien rawat jalan per poli
- Definisi : Pengelompokkan kunjungan pasien rawat jalan per poli yang ada di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga.
- Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Referensi Waktu : 31 Desember 2023



Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : 1. Poli gigi
2. Poli gigi edodonsi
3. Poli THT
4. Poli jiwa
5. Poli kulit dan kelamin
6. Poli penyakit syaraf
7. Poli urologi
8. Poli kandungan
9. Poli penyakit dalam
10. Poli bedah
11. Poli anak
12. Poli paru
13. Poli mata
14. Poli bedah anak
15. Poli Orthopaedi
16. Poli bedah mulut
17. Poli jantung
18. Poli bedah onkologi
19. Poli THT onkologi

Aturan Validasi : Wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli gigi?
2. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli gigi edodonsi?
3. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli THT?
4. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli jiwa?
5. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli kulit dan kelamin?
6. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli penyakit syaraf?
7. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli urologi?
8. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli kandungan?



9. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli penyakit dalam?
10. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli bedah?
11. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli anak?
12. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli paru?
13. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli mata?
14. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli bedah anak?
15. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli Orthopaedi?
16. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli bedah mulut?
17. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli jantung?
18. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli bedah onkologi?
19. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli THT onkologi?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pasien Rawat Inap per Poli

Alias : -

Konsep : Pasien rawat inap per poli

Definisi : Pengelompokkan kunjungan pasien rawat inap per poli yang ada di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga.

Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : 1. Poli gigi



2. Poli gigi edodonsi
3. Poli THT
4. Poli jiwa
5. Poli kulit dan kelamin
6. Poli penyakit syaraf
7. Poli urologi
8. Poli kandungan
9. Poli penyakit dalam
10. Poli bedah
11. Poli anak
12. Poli paru
13. Poli mata
14. Poli bedah anak
15. Poli Orthopaedi
16. Poli bedah mulut
17. Poli jantung
18. Poli bedah onkologi
19. Poli THT onkologi

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Aturan Validasi | : | Wajib diisi |
| Kalimat Pertanyaan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli gigi? 2. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli gigi edodonsi? 3. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli THT? 4. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli jiwa? 5. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli kulit dan kelamin? 6. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli penyakit syaraf? 7. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli urologi? 8. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli kandungan? 9. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli penyakit dalam? |



10. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli bedah?
11. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli anak?
12. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli paru?
13. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli mata?
14. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli bedah anak?
15. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli Orthopaedi?
16. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli bedah mulut?
17. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli jantung?
18. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli bedah onkologi?
19. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli THT onkologi?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI INDIKATOR PELAYANAN RSUD DR. R. GOETENG TAROENADIBRATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Tempat tidur rumah sakit

Alias	: -
Konsep	: Tempat tidur rumah sakit
Definisi	: Tempat tidur yang dirancang untuk orang yang membutuhkan perawatan kesehatan
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -



Aturan Validasi	: Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah tempat tidur di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Hari perawatan

Alias	: -
Konsep	: Hari perawatan
Definisi	: Satuan pengukuran yang menunjukkan bahwa layanan rawat inap telah diterima/didapatkan oleh seorang pasien di dalam periode satu kali 24 jam.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pasien yang dirawat pada suatu periode di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pasien keluar

Alias	: -
Konsep	: Pasien keluar
Definisi	: Pasien yang keluar dari rumah sakit baik keluar sembuh, meninggal, ataupun keluar untuk dirujuk ke rumah sakit lainnya.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah pasien keluar di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Lama dirawat**

Alias : -

Konsep : Lama dirawat

Definisi : berapa hari seorang pasien dirawat pada satu episode rawat inap.

Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa hari seorang pasien dirawat pada satu episode rawat inap di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Periode**

Alias : -

Konsep : Periode

Definisi : Rentang waktu yang dapat ditentukan oleh penyusun laporan

Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : -

Aturan Validasi : Wajib diisi

Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah hari dalam satu periode yang digunakan dalam penyusunan laporan?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya



RSUD PANTI NUGROHO

METADATA VARIABEL STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA



**KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI
KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP
RSUD PANTI NUGROHOKABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

❖ **Pasien Rawat Jalan**

Alias	:	-
Konsep	:	Pasien rawat jalan
Definisi	:	Pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah pasien rawat jalan di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ **Pasien Rawat Inap**

Alias	:	-
Konsep	:	Pasien rawat inap
Definisi	:	Pasien yang masuk ke rumah sakit dengan menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan penunjang medik lainnya.
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Wajib diisi



Kalimat Pertanyaan : Berapa jumlah pasien rawat inap di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ **Pasien Rawat Jalan per Debitur**

Alias : -
Konsep : Pasien rawat jalan per debitur
Definisi : Pengelompokkan kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan debitur yaitu umum, JKN PBI, JKN Non PBI, Jamkesda, KPS, SKTM, Jampersal.
Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu : 31 Desember 2023
Tipe Data : Integer
Klasifikasi Isian : 1. Umum
2. JKN PBI
3. JKN Non PBI
4. Jamkesda
5. KPS
6. SKTM
7. Jampersal
Aturan Validasi : Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan : 1. Berapa jumlah pasien rawat jalan umum di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
2. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna JKN PBI di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
3. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna JKN Non PBI di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
4. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna Jamkesda di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?



5. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna KPS di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
6. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna SKTM di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
7. Berapa jumlah pasien rawat jalan pengguna Jampersal di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pasien Rawat Inap per Debitur

Alias	: -
Konsep	: Pasien rawat inap per debitur
Definisi	: Pengelompokkan kunjungan pasien rawat inap berdasarkan debitur yaitu umum, JKN PBI, JKN Non PBI, Jamkesda, KPS, SKTM, Jampersal.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Umum 2. JKN PBI 3. JKN Non PBI 4. Jamkesda 5. KPS 6. SKTM 7. Jampersal
Aturan Validasi	: Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah pasien rawat inap umum di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga? 2. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna JKN PBI di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?



3. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna JKN Non PBI di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
4. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna Jamkesda di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
5. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna KPS di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
6. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna SKTM di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
7. Berapa jumlah pasien rawat inap pengguna Jampersal di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?

Dapat Diakses Umum : 1-Ya

❖ Pasien Rawat Jalan per Poli

Alias : -

Konsep : Pasien rawat jalan per poli

Definisi : Pengelompokkan kunjungan pasien rawat jalan per poli yang ada di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.

Referensi Pemilihan : Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Referensi Waktu : 31 Desember 2023

Tipe Data : Integer

Klasifikasi Isian : 1. Poli Kebidanan dan Kandungan
2. Poli anak
3. Poli Bedah
4. Poli Gigi dan Mulut
5. Poli Penyakit Dalam
6. Poli Neurologi (Saraf)
7. Poli THT-KL
8. Poli Kulit dan Kelamin

Aturan Validasi : Wajib diisi



Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli kebidanan? 2. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli anak? 3. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli bedah? 4. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli gigi dan mulut? 5. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli penyakit dalam? 6. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli neurologi (saraf)? 7. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli THT-KL? 8. Berapa jumlah pasien rawat jalan di poli kulit dan kelamin?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pasien Rawat Inap per Poli

Alias	: -
Konsep	: Pasien rawat inap per poli
Definisi	: Pengelompokkan kunjungan pasien rawat inap per poli yang ada di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: 1. Poli Kebidanan dan Kandungan 2. Poli anak 3. Poli Bedah 4. Poli Gigi dan Mulut 5. Poli Penyakit Dalam 6. Poli Neurologi (Saraf) 7. Poli THT-KL 8. Poli Kulit dan Kelamin
Aturan Validasi	: Wajib diisi



Kalimat Pertanyaan	: 1. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli kebidanan? 2. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli anak? 3. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli bedah? 4. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli gigi dan mulut? 5. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli penyakit dalam? 6. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli neurologi (saraf)? 7. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli THT-KL? 8. 8. Berapa jumlah pasien rawat inap di poli kulit dan kelamin?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI INDIKATOR PELAYANAN RSUD PANTI NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

❖ Tempat tidur rumah sakit

Alias	: -
Konsep	: Tempat tidur rumah sakit
Definisi	: Tempat tidur yang dirancang untuk orang yang membutuhkan perawatan kesehatan
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah tempat tidur di RSUD Panti Nugroho?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Hari perawatan

Alias	: -
Konsep	: Hari perawatan
Definisi	: Satuan pengukuran yang menunjukkan bahwa layanan rawat inap telah diterima/didapatkan oleh seorang pasien di dalam periode satu kali 24 jam.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pasien yang dirawat pada suatu periode di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya

❖ Pasien keluar

Alias	: -
Konsep	: Pasien keluar
Definisi	: Pasien yang keluar dari rumah sakit baik keluar sembuh, meninggal, ataupun keluar untuk dirujuk ke rumah sakit lainnya.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	: 31 Desember 2023
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	: Berapa jumlah pasien keluar di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	: 1-Ya



❖ Lama dirawat

Alias	:	-
Konsep	:	Lama dirawat
Definisi	:	berapa hari seorang pasien dirawat pada satu episode rawat inap.
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa hari seorang pasien dirawat pada satu episode rawat inap di RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya

❖ Periode

Alias	:	-
Konsep	:	Periode
Definisi	:	Rentang waktu yang dapat ditentukan oleh penyusun laporan
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Referensi Waktu	:	31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Wajib diisi
Kalimat Pertanyaan	:	Berapa jumlah hari dalam satu periode yang digunakan dalam penyusunan laporan?
Dapat Diakses Umum	:	1-Ya



METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL



Buku ini merupakan sebuah kumpulan metadata variabel statistik sektoral di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Buku ini menyajikan deskripsi mendetail mengenai variabel-variabel statistik sektoral yang meliputi atribut nama variabel, alias, konsep, definisi, referensi pemilihan, referensi waktu, tipe data, klasifikasi isian, aturan validasi, kalimat pertanyaan, serta dapat diakses umum.

Metadata Variabel Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga merupakan referensi bagi para peneliti, analis dan pembuat kebijakan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang data statistik sektoral Kabupaten Purbalingga. Informasi yang tersedia dalam buku ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam melakukan analisis, perencanaan, serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan dan program pembangunan di Kabupaten Purbalingga.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

2024